# BALAIRUNG

EDISI 14/TH V/1991

Rp 1500,00

# MEMBENAHI STRATEGI PENDIDIKAN TINGGI



**POLITIK MAHASISWA MENJELANG PEMILU 1992**

**SARASEHAN PERS MAHASISWA SE-INDONESIA GAGAL**

ISSN : 0215 – 076X

Dalam bahasa Cina, ilmu fisika konon disebut *wu li*. Tapi kata *wu li* bisa juga berarti nonsens. Seorang anak agaknya tak perlu ditakut-takuti dengan nonsens untuk bisa menemukan sendiri sebuah gambaran tentang realitas. Kecuali kalau kita memang setuju bahwa sekolah sama dengan rumah sakit dan penjara.

**(Goenawan Mohammad)**

koleksi Lais Abid




RADITYA DJATI

BALAIRUNG dan BULAKSUMUR

Berbag i kerja, berpacu melayani pembaca

Melayani banyak orang memang bukan peker jaan ringan. Apalagi dalam masyarakat akademis, yang berilmu dan kritis. Namun betapapun beratnya kami tetap harus bertahan. perlu mencoba terobosan-terobo san baru agar menyajikan yang terbaik untuk pembaca.

Salah satu terobosan itu adalah dengan diterbitkannya Surat Kabar Mahasiswa Universitas Gadjah Mada BULAKSUMUR. Majalah BALAIRUNG yang terbit tiga bulan sekali, rasanya kurang memadahi untuk menampung berita-berita kampus dan sekitarnya yang terus mengalir dengan cepat. Untuk itu sebuah surat kabar dalam bentuk tabloid, dengan periode terbit yang lebih pendek, adalah sebuah alternatif.

Bagaimana kalau terjadi persaingan? Satu pertanyaan yang perlu kami jawab. Dalam hal ini ada pembagian tugas antara BALAIRUNG dan BULAKSUMUR. BULAKSUMUR praktis hanya menyajikan berita-berita cepat di sekitar kampus UGM. Sedangkan BALAIRUNG lebih pada penyajian tulisan dan berita-berita yang sedikit banyak dibungkus dengan telaah ilmiah. Dengan demikian sasaran pembacanyapun jelas berbeda. Ini pula yang membuat kami merasa perlu untuk mengadakan peninjauan rubrikasi. Hasilnya, beberapa rubrik terpaksa kami tinggalkan, diantaranya rubrik Jerat, Catatan Peristiwa dan Pojok. Sebagai gantinya kami munculkan dua rubrik. Jepret, rubrik yang pada dua edisi lalu tidak muncul kini kami sajikan lagi. Satu lagi, Humaniora. Rubrik baru ini bakal menyajikan sekitar masalah perilaku dan kebudayaan.

Meski begitu, kalaupun persaingan itu tetap terjadi kami berharap hal itu sehat adanya. Apalagi kami tetap dalam satu atap lembaga, yaitu Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM).

BPPM UGM sendiri saat ini mengelola tiga departemen. Dua departemen penerbitan, yaitu Majalah BALAIRUNG dan Surat Kabar BULAKSUMUR, ditam bah satu departemen yang meng urusi diskusi, seminar dan pen didikan pers. Kami menyebutnya Departemen Pelatihan dan Peng kajian.

Tak cuma itu, upaya agar BALAIRUNG dapat melayani pembaca dengan baik. Beberapa waktu lalu kami menata·struktur baru setelah terjadi pergantian pengurus melalui Musyawarah Balairung, 9 – 11 Maret 1991 lalu. Pengurus lama yang paripurna masa tugasnya digantikan oleh muka-muka baru yang lebih segar. Kepada mereka yang meninggalkan BALAIRUNG kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan selamat berjuang di medan yang baru.

Para pengurus baru yang dilantik pada tanggal 18 Mei 1991 langsung menempati pos-pos mereka yang baru dan menjalankan tugas-tugasnya. Diantaranya menghadiri Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia di IKIP Bandung, 8 – 10 Juli 1991. Sarasehan itu sendiri adalah kelanjutan dari Temu Aktivis Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia di Wanagama, yang diselenggarakan bertepatan dengan Lustrum I Majalah BALAIRUNG bulan Februari lalu. Acara yang nyaris gagal, karena tidak direkomendasi oleh Direktur Kemahasiswaan Depdikbud itu akhirnya tetap dilaksanakan, meskipun secara informal. Laporan selengkapnya kami sajikan dalam rubrik Kemahasiswaan edisi ini.

Pembaca yang budiman, pengurus baru, struktur baru serta rubrik-rubrik baru, semua itu tak lain karena upaya kami untuk menyajikan yang terbaik bagi pembaca. Sebab , tanpa pembaca, kami bukan apa-apa.

**Penjaga Dapur**

**BALAIRUNG**
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Diterbitkan Oleh:** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ☐ **Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK REKTOR No. UGM/82/7789/UM/01/37, International Standard Series Number: 0125 – 176 X ☐ **Pelindung:** Prof. Dr. Ir. Mochamad Adnan, M.Sc. (Rektor UGM). ☐ **Penasehat:** Ir. Haryana, M.Arch. (Purek III UGM), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., Ir. Dra. Larasati Suliantoro S., Drs. Jakob Oetama., Ir. Boma Wikan Tyoso, M.Sc., Ph.D., Drs. Amir Effendi Siregar, MA. ☐ **Pemimpin Umum:** Abdul Rahman. ☐ **Pemimpin Redaksi:** Nur Hidayat. ☐ **Pemimpin Perusahaan:** Islami Rusdianawati. ☐ **Sekretaris Umum:** Retno Suprihatin. ☐ **Sekretaris Redaksi:** Hesty D. Lestari. ☐ **Redaktur Pelaksana:** Riestianti, Wahyudi Marhaen PE, Maria Selastiningsih. ☐ **Dewan Redaksi:** Abdul Rahman, Amir Fatah Sofyan, Islami Rusdianawati, Hesty D. Lestari, Kelik Supriyanto, Retno Suprihatin, Suseno, Riestianti, Wahyudi Marhaen PE, Maria Selatiningsih, Ustarmen JP. ☐ **Reporter:** Rifa'i Arfan, Seno Joko Suyono, ☐ **Redaktur Artistik:** Amir Fatah Sofyan. ☐ **Staf Artistik:** M. Arifin. ☐ **Fotografer:** Kelik Supriyanto. ☐ **Iklan:** Ustarmen JP. ☐ **Keuangan:** Riestianti. ☐ **Distribusi:** Maryoto ☐ **Staf. Sekret. Umum:** M. Shodiq. ☐ **Magang Pengurus:** Baskoro Tri Caroko, Anna Fahmi, Andrie Risman Fatah, Ahmad Ridwan Dalimunthe, Raditya Djati. ☐ **Alamat:** Bulaksumur B 21 Yogyakarta 55281, Telp. 88688 psw. 676. ☐ **Percetakan:** Liberty Offset, Jl. Jayengprawiran 21, Telp. 2908 Yogyakarta. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

**BPPM UGM**
☐ **Ketua Umum:** Didik Supriyanto ☐ **Sekretaris Umum:** Wahyudi Marhaen PE. ☐ **Bendahara Umum:** Maria Selastiningsih. ☐ **Ketua Departemen Pelatihan dan Pengkajian:** Muhammad Cholili Bustomi ☐ **Ketua Bidang Pelatihan:** Didik Purwadi. ☐ **Ketua Bidang Pengkajian:** Wahyu Widiarto ☐ **Ketua Bidang Data dan Informasi:** Fuad Nashori ☐**Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar:** Didik Supriyanto ☐ **Ketua Departemen Penerbitan Majalah:** Abdul Rahman.

Redaksi menerima tulisan dan foto sesuai dengan visi dan isi majalah ini. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan hendaknya diketik rapi di atas kertas foilo, sepasi rangkap. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai perangko secukupnya. Isi tulisan tidak mesti sejalan dengan pendapat redaksi.

## ISI







**KULIT MUKA: AMIR FATAH SOFYAN**

## KEMAHASISWAAN

Satu lagi sandungan menghambat langkah aktivis pers-mahasiswa untuk berhimpun: sarasehan pers mahasiswa se-Indonesia di Bandung gagal. Mendirikan sebuah organisasi memang bukan hal yang mudah. Sampai dimana usaha para aktivis pers mahasiswa mewujudkan harpaannya?.





## IPTEK



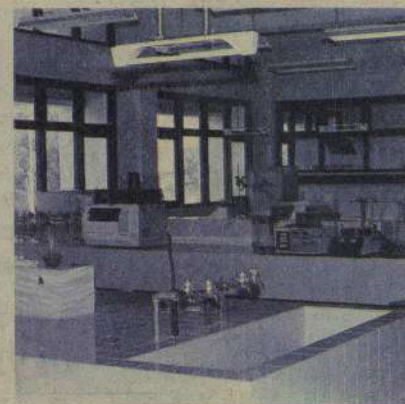
Enam mahasiswa Teknologi Pertanian menciptakan alat penjernih limbah yang sederhana dan efektif. Dengan memanfaatkan *chitosan*, mereka mendapat juara II dalam LKIP Mahasiswa Tingkat Nasional di Lampung.



## LINGKUNGAN

UGM dan Departemen Kesehatan mulai menjajagi kerjasama pendirian suatu lembaga kesehatan kerja dan keselamatan lingkungan laboratorium.
Sudah demikian parahkah kondisi lingkungan UGM, sehingga diperlukan lembaga semacam ini?





## LAPORAN KHUSUS

Beberapa pihak mengkhawatirkan pemuda cenderung kepada sikap ketergantungan dalam berpolitik. Organisasi pemuda banyak yang "organisasi papan nama". Bagaimana kemandirian pemuda dalam berpolitik menjelang Pemilu 1992?.





Abdul Rahman




**GOYANG SIPIL.** Wisudawan Teknik Sipil bermaksud menggoyang dunia dengan kesarjanaan, ijazah, dan traktor. Asal tidak membangun jembatan goyang.

# Ucapan Terima kasih

Pertama-tama saya ingin bersyukur kehadirat ALLAH SWT karena dengan izinnya kami dapat berkunjung ke UGM. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pihak Senat Mahasiswa UGM dan khususnya Student Magazine, **Balairung,** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis di ruangan majalah ini.

Di kesempatan ini saya ingin mengundang rekan-rekan di UGM untuk berkunjung ke Universitas Brunei Darussalam. Kami akan setia menanti kedatangan rekan-rekan.

Akhir kata, terima kasih dan semoga diketemukan lagi.
Wassalam.

Ketua rombongan: Siti Norain HJ ABD Ghafor.
Timbalan Setia Usaha Persatuan Mahasiswa Universitas Brunai Darussalam, Jl. Gadong Brunei 3186, Brunei Darussalam.

# Mohon Berlangganan

Saya sudah membeli Majalah **Balairung** Edisi 13 Th. 1991. Membaca indeks pada edisi tersebut, saya juga ingin membaca **Balairung** nomor 10 Th. 1988. Untuk itu bersama surat ini, saya kirimkan uang Rp1.500,00 sesuai dengan arahan Redaksi pada **Balairung 13,** Kontak. Rasanya senang sekali bila permohonanku itu dikabulkan dan syukur bila saya bisa mendapat edisi-edisi lain yang sudah lewat. Tolong saya diberitahu bila masih ada, dan bila edisi lama sudah habis, kirimkan saja edisi yang akan datang.

Ir. Harimurti FT.
IFAD. Jl. Teuku Umar 52
Bandar Lampung, 35142

*Kami masih memiliki edisi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harga per eksemplar Rp 1.000,00 kami tunggu wesel anda – **Red.***

# Perluasan Pangsa Pasar

Sebagai salah seorang mahasiswa yang berminat dengan **Balairung,** rasanya saya perlu memberikan saran-saran untuk **Balairung.**

Berangkat dari pengamatan saya selama ini, ternyata majalah **Balairung** tidak semuanya terjual habis, bahkan mungkin hanya tujuh puluh persen. Kalau memang benar demikian lalu dikemanakan yang tiga puluh persen lainnya. Saya pikir kalau yang sisanya itu tidak dicari jalan keluarnya maka percuma saja, mubazir. Terus terang saja saya turut prihatin dengan kondisi semacam itu.

Oleh karena itu saya mencoba untuk mempersembahkan ide-ide, antara lain;

1. Karena **Balairung** disukai masyarakat mahasiswa, maka **Balairung** perlu perluasan pangsa pasar, perlu **Balairung** disebar di seluruh Indonesia.
2. Alangkah baiknya kalau **Balairung** juga turut memperluas jaringannya sampai pada alumni-alumni UGM yang ada di luar negeri sekaligus meminta mereka menulis untuk **Balairung.** Mungkin mereka bisa memberikan masukan lewat tulisan-tulisan mereka akan masalah-masalah kemahasiswaan dan aktivitas-aktivitas mahasiswa di negara-negara maju.

Muhammad Khomsun MZ
Sastra Asia Barat'89 UGM.

*Terima kasih atas saran Anda. Sebagai permulaan, kami tunggu karya Anda – **Red.***

# Tetap Terbit dan Eksis

Sekitar tahun 1989 saya pernah mengirim surat untuk redaksi "BALAIRUNG". Entah karena apa saya tidak meneria balasan sesuai dengan apa yang saya harapkan dalam surat tersebut.

Kemudian secara kebetulan saya membaca BALAIRUNG No. 10 tahun 1989 di mana surat saya dimuat dalam rubrik Kontak, sementara informasi yang saya inginkan tetap tidak/belum sampai, meskipun dalam catatan redaksi informasi yang dimaksud sudah dikirim.

Meskipun demikian, dalam rentang waktu yang cukup lama (dua tahun), saya masih berharap tetap terbit dan eksis. Dan keinginan saya untuk mengoleksi terbitan-terbitan Balairung (karena saya percaya bahwa BALAIRUNG masih merupakan bacaan alternatif, di tengah kehidupan pers yang masih menganut pola "yes men").

Oleh sebab itu bersama ini saya kirimkan lagi perangko balasan. Syukur bila Redaksi/Tata Usaha berkenan mengirimkan langsung BALAIRUNG, sementara harga saya kirim belakangan. BRAVO BALAIRUNG, semoga tetap eksis.

Drs. Ahmad Muzakir
Kantor Departemen Penerangan Jl. Brigjen Hasan Basri No. 40 Kota Baru, Kalimantan Selatan.

*Kami masih memiliki edisi-edisi yang Anda minta (rubrik kontak BALAIRUNG No. 10/Th.III/1989) kecuali edisi I Th.I/1986/perdana. Segera kami kirimkan begitu wesel Anda kami terima – **Red.***

## TERIMA KASIH

Atas bantuan yang diberikan kepada Majalah Mahasiswa UGM BALAIRUNG, segenap pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Drs. Hasan Basri Durin**
   Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat
2. **Ir. Firdaus Malik**
   Wakil Gubernur KDH Tingkat I RIAU
3. Jenderal (Purn.) Soemitro
   Direktur PT. Sinar Cakra Sakti Jakarta
4. **Drs. Haji Agus Salim Siregar**
   Pimpinan Yayasan Pendidikan H. Agus Salim Medan
5. **Ir. Wardiyasa**
   Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian
6. **Trimarjono, SH**
   Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada Jawa Timur
7. **Siswanto Sudomo, Ph.D**
   Direktur PT Kwalita Eksporindo International Jakarta
8. **Agung Iskandar, SH**
   Biro Direksi PTP III Sei Sikambing Medan
9. **H. Hussen Naro**
   Anggota DPR PPP
10. **Drs. Basroni Rizal**
    PT. Dipa Madura Pradana Surabaya
11. **Ir. Dwi Purwo**
    Direktur PT. Aneka Kimia Surabaya

# TEORI MEMEGANG BURUNG




"Bola keterbukaan" telah menggelinding. Begitulah para analis politik mencoba memahami teka-teki rimba perpolitikan di republik ini. Memang, berbicara masalah yang ada kaitannya dengan "buka-bukaan" ini selalu menarik perhatian.

Warga republik ini dengan penuh antusias (sekaligus was-was) mencoba menikmati nuansa keindahan "adegan buka-bukaan" ini. Orang mulai memberanikan diri ribut-ribut tentang suksesi kepemimpinan nasional, pembatasan jabatan presiden, Petisi 50, dan masih banyak lagi isu yang sempat terlontar. Banyak orang menilai, semua itu suatu kemajuan. Akan tetapi, tatkala Rendra dan Teater Koma dilaranag mannggung, beberapa aktivis mahasiswa Bandung dan Yogya ditangkap, Arief Budiman di*cekel*; banyak kalangan yang secara spontan berkomentar: keterbukaan mengalami *set-back* lagi.

Mensekneg Moerdiono kemudian melemparkan "*teori burung" berkenaan dengan masalah keterbukaan ini. Konon, keterbukaan itu ibarat seekor burung. Kalau dipegang terlampau kencang, dia akan mati. Sebaliknya kalau terlampau longgar, dia akan lepas dari tangan.*

*Persoalannya sekarang adalah, bagaimana caranya supaya si-pemegang* dan *si-terpegang* itu bersesuaian. Yang memegang dan yang dipegang sama-sama enaknya, begitulah kira-kira. Atau dengan kata lain, bagaimana burung itu tetap nyaman dalam genggaman tanpa membuatnya "sesak napas".

Bahkan, beberapa orang sempat pula mempertanyakan: bagaimana jika sang burung itu lepas dan *"mbalelo"* menyerang dan mematuki sang-tuan yang telah sekian lama merasakan betapa nikmatnya memegang burung itu. Lihatlah Uni Soviet, Polandia, Rumania. Sudah sekian lama bangsa-bangsa di negeri komunis itu disumbat mulutnya. Tiba-tiba Gorbachev muncul dan mengeluarkan maklumat: sekarang anda sekalian boleh ngomong sebebasnya tanpa perlu takut. *Glasnot* menjamin anda mengeritik dan mengusulkan apa saja. Rakyatpun serentak menyodorkan serentetan panjang tuntutan mereka kepada sang pemimpin: kebebasan pers, kebebasan berbicara, demokrasi dalam kehidupan politik, dan sebagainya.

Masalah pegang-memegang burung ini memang menarik. Sekali lagi, permasalahannya adalah bagaimana ukuran kekuatan atau tangan yang pas supaya burung tadi tidak lepas, tetapi juga merasa cukup nyaman dalam genggaman tuannya. Harus ada keseimbangan, kata *Menpan Sarwono*. Tokoh dalam praktek, yang namanya keseimbangan itu tidak mudah didefinisikan. Betulkah demikian?

Keterbukaan bukanlah masalah yang pelik, kata Bapak kost-ku. Kata "buka", siapa sih yang tidak faham? Barangkali, yang kurang difahami atau aspek yang menjadi kontroversi adalah apa saja yang boleh dibuka? Jelas, tidak semua hal layak dibicarakan secara blak-blakan. Keterbukaan pada hakekatnya adalah *state of mind,* di mana setiap warga negara bisa merasa bebas untuk mengemukakan pendapatnya perihal apa saja yang erat kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi, pagar atau batasan yang harus dipakai supaya kita tidak tergelincir ke ekses-ekse. ılah kepentingan nasional.

Sebuah pertanyaan baru muncul di benak ini: bagaimana batasan kepentingan nasional itu? "Ya, Pancasila, UUD 1945 serta GBHN", seorang penatar P-4 menjawab dengan lantang.

Tetapi bung, masalahnya, seringkali ada satu pihak yang mau menang sendiri dan menentukan sendiri batasan kepentingan nasional itu!!!

tawangsari, 25 juli 1991
**Sidik Jatmika**
mahasiswa Hubungan Internasional
Fisipol UGM.

# PENDIDIKAN PEMBEBASAN

Mereka yang memusuhi sekolah tidak sedikit. Sebut saja Ivan Ilich yang menyerukan semangat *deschooling,* agar masyarakat terbebas dari sekolah. Atau Rabindranath Tagore, pemikir India dan orang Asia pertama yang mendapatkan hadiah Nobel untuk kesusasteraan. Pada masa kanak-kanaknya sekolah merupakan "siksaan yang tak tertahankan". Sekolah bagaikan penjara. Sekolah seolah-olah telah berubah menjadi lembaga yang penuh dengan peraturan-peraturan, sering membuat pusing kepala, dan mengurungnya dalam sel-sel yang disebut kelas.

Mungkin saja Ivan Illich dan Rabindranath Tagore dengan bersemangat akan menunjukkan setumpuk bukti bahwa banyak ilmuwan kaliber dunia yang mempunyai sejarah sekolah yang morat marit. Contohnya Thomas A. Edison yang hanya sempat sekolah tiga bulan. Pada usia 12 tahun ia harus cepat-cepat mencari nafkah. Ternyata dikemudian hari ia mampu membuat dunia terang di malam hari. Dunia pun tahu bahwa masa sekolah A. Einstein tidak begitu menyenangkan karena Einstein kecil dianggap lambat berkembang. Dan dikemudian hari ia menciptakan teori relativitas.

Sekolah, dalam arti luas, sebagai lembaga rekayasa manusia, memang telah menjadi mitos bahwa disitulah tempat seseorang menjadi "orang". Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, "bekal" untuk menjadi "orang" lebih banyak didapat di luar dinding-dinding kelas. Dalam perjalanannya lembaga sekolah sering terjerumus menjadi lembaga yang sekedar memindahkan informasi dari satu ke lainnya, bahkan lebih jauh lagi menjadi lembaga komersial. Hasil produknya sering dikatakan tidak siap pakai, tidak mandiri. Untuk itulah, menurut Paulo freire, diperlukan semangat pembebasan untuk mendobrak itu semua.

"Pendidikan yang membebaskan berisi perilaku-perilaku pemahaman (*act of cognition*) bukannya pengalihan-pengalihan informasi," tulis Paulo. Terciptanya dialog adalah mutlak dalam hal ini, karena dengan berdialoglah manusia menjadi bermakna, dihargai dan sederajat. Paulo kemudian memperkenalkan apa yang disebutnya dengan pendidikan "hadapan masalah" (*problem-posing*) yang menjawb hakikat kesadaran. Pendidikan ini menegaskan manusia sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi (*becoming*) sebagai sesuatu yang tidak pernah selesai dan terus mencari.



M. ARIFIN

Paulo Freire tidak sendiri dalam hal ini, bahkan konsepnya bukan hal baru. Sejak zaman Yunani kuno, Plato dan Socrates telah mendidik murid-muridnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Metode ini dikenal dengan metode tanya-jawab (*dialogue method*), yang mengandalkan keaktifan murid. Pada tahun 1931 Fakultas Hukum di Harvard University melihat bahwa sarjana-sarjana hukum mereka mendapat kesulitan dalam menerapkan pengetahuan mereka pada masyarakat. Maka digunakanlah metode belajar menggunakan kasus (*case-study method*). Pada 1974, Howard Barrows, seorang ahli syaraf menyempurnakannya dengan sebuah metoda intruksional yang disebut Belajar Mandiri dan Bertolak dari Masalah. Metode ini kemudian diterapkan diberbagai fakultas kedokteran seluruh dunia.

Kemandirian, itulah yang ingin dicapai. Secara umum, kemandirian diartikan mempunyai lima komponen utama yakni bebas, tidak tergantung orang lain dan bertindak atas kemauan sendiri; progresif dan ulet; berinisiatif, kreatif, mampu berpikir dan bertindak secara orisinal; pengendalian dari dalam (*internal locus of control*) mampu mengendalikan tindakan; kepercayaan pada diri sendiri dan kemantapan diri (self-esteem, self-confident). Mampukah sistem pendidikan kita menciptakan kemandirian?.

Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang menjanjikan hal tersebut. Namun kondisi yang dipaparkan oleh hasil evaluasi tridharma Pendidikan Tinggi tahun 1989 berbicara lain. Terungkap, kemandirian belajar mahasiswa ternyata perlu diperbaiki, sistem kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya, kurikulum yang kaku dan sering ketinggalan perkembangan laju iptek, juga disorot peran dosen dan mahasiswa. Hal yang terakhir ini memegang peranan penting. Terungkap dari dua pengumpulan pendapat mahasiswa tentang proses belajar-mengajar yang berhasil dihimpun redaksi. Dosen dituntut untuk menciptakan suasana dialogis, rasa ingin tahu, bukan suasana yang monoton, otoriter. Penyampaian informasi yang searah ditolak. Mahasiswa sebaliknya, dituntut untuk lebih aktif dan serius mengikuti kuliah.

Itu semua demi pertumbuhan kehidupan intelektualitas sivitas akademika itu sendiri. Kehidupan intelektual memerlukan suasana kreativitas dan kebebasan dimana ada kemungkinan dialog dan kesempatan terbuka lebar untuk memperoleh informasi dan bersikap kritis. Untuk itu, penggunaan mimbar akademik harus benar-benar maksimal, lepas dari "ketakutan-ketakutan" atau "kekhawatiran-kekhawatiran" yang berlebihan demi "stabilitas nasional". Tak ketinggalan tangan-tangan birokrasi yang kadang-kadang mencekik, perlu dihilangkan. Tentu saja semuanya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Biarkanlah kehidupan intelektual bebas bereksperimen, menemukan, mencari dan mengabdi. Sebab, kalau tidak, lembaga perekayasaan manusia ini dapat menjadi "penjara" dalam bentuk lain.

**Nur Hidayat**



# MAHASISWA BUKAN BURUNG BEO

Gatote yogya '87

# MEMBENAHI STRATEGI PENDIDIKAN TINGGI

*Banyak belajar*
*Banyak lupa*
*Sedikit belajar*
*Sedikit lupa*
*. . . . lebih baik tidak belajar*

Ungkapan tersebut telah menjadi *guyonan* khas mahasiswa pada hari-hari ujian semester. Mungkin untuk mengendorkan urat syaraf menghadapi bahan ujian yang bertumpuk. Tetapi ungkapan ini juga bisa menggambarkan betapa sulitnya untuk membiarkan diri belajar. Belajar bagai momok menakutkan dan sering diartikan begitu sempit: menghapal dan memecahkan soal dengan hitungan. Belajar belum menjadi kebiasaan, lebih-lebih suatu kebutuhan. Dengan kondisi seperti ini -- apabila benar terjadi -- bagaimana jadinya proses belajar mengajar perguruan tinggi?.

Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UGM tahun 1989 lalu mengungkapkan lebih jauh sekaligus menggambarkan kompleknya masalah yang saling kait mengkait. Evaluasi yang dihadiri oleh semua Dekan, Pembantu Dekan, Kepala-kepala Pusat, para mahasiswa yang diwakili oleh Senat Mahasiswa secara umum menyimpulkan proses belajar-mengajar perlu diperbaiki agar dapat menciptakan motivasi mahasiswa untuk berkembang secara mandiri. Kedisiplinan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti perkuliahan perlu ditingkatkan. Lama studi juga menjadi masalah karena hanya sebagian kecil mahasiswa yang dapat menyelesaikan programS1 -- yang dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun -- tepat pada waktunya.

Tampaknya hal-hal tersebut di atas disebabkan pelaksanaan sistem kredit yang dirasa kurang efektif. Hal ini terlihat dari kemandirian mahasiswa yang rendah, terlalu banyak menggantungkan bahan kuliah. Padahal bahan kuliah tersebut berasal dari kuliah tatap muka yang merupakan proses penyampaian searah tanpa terjadi dialog seperti diskusi, atau tanya jawab. Selain itu, evaluasi juga menyinggung bagian terpenting dari proses belajar-mengajar perguruan tinggi yakni kurikulum. Kurikulum hendaknya selalu dievaluasi secara berkala dan haruslah antisipatif, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan iptek yang cepat.

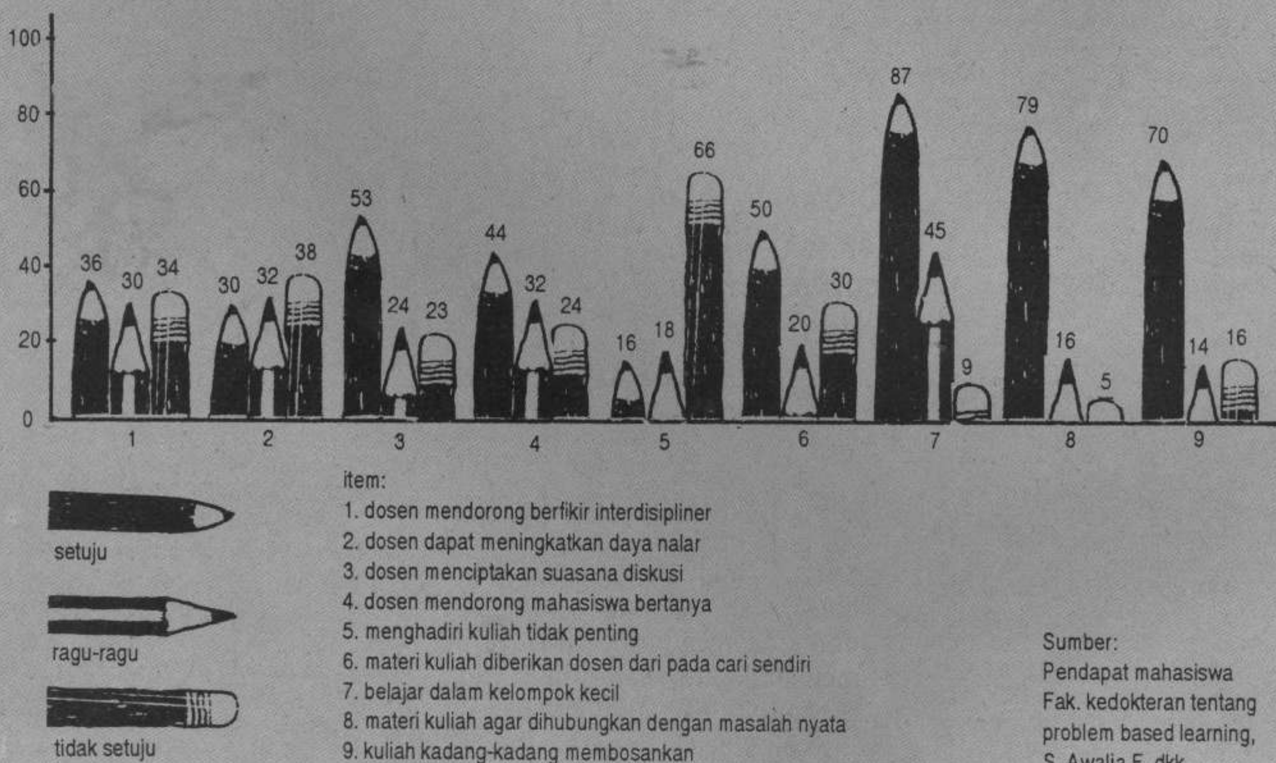
**Kemandirian Mahasiswa**

Fakultas Kedokteran UGM setidaknya telah menjadari masalah-masalah itu. Perkembangan iptek yang cepat menuntut reevaluasi dan reorientasi yang terus menerus sistem pendidikan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilaksanakan pada ROME I (Reorientation of Medical Education) di Surabaya, kemudian ROME II tahun 1983 di New Delhi dan ROME III Tahun 1987. Hasil reorientasi ini ditujukan kepada kemandirian mahasiswa dalam belajar dengan berpindahnya pusat perhatian dari dosen (*teacher-centered*) ke mahasiswa (*studen-centered*); juga dikembangkan proses belajar-mengajar berdasarkan masalah (*problem based learning*). Untuk itu diperlukan bukan saja *hospital oriented* tetapi juga *community oriented*.

Berdaarkan pengamatan terhadap pelaksanaan belajar-mengajar di FK selama ini, Satuan Tugas Pengembngan Pendidikan FK UGM menemukan beberapa hal; pengetahuan dasar yang diberikan sering tidak relevan dengan kepentingan klinis dan komunitas; belajar selalu tidak dalam konteks permasalahan; pengetahuan dan praktek klinis diberikan pada akhir kurikulum; mahasiswa pasif, kurang inisiatif, dan tergantung pada dosen; kuliah diselenggarakan dengan kelas besar, satu arah dan kurang diskusi. Untuk itulah Satgas berusaha mengembangkan pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip-prinsip SPICES yang menekankan pada kemandirian mahasiswa yakni: *Self directed learning, Problem based learning, Integrated teaching, Community oreinted, Early clinical exposure,* dan *Student centered.*

Prinsip-prinsip SPICES memang diperuntukkan khusus bagi FK. Namun beberapa prinsip diantaranya tentu dapat diterapkan pada fakultas lain dan tentu saja dengan modifikasi. Prinsip-prinsip tersebut memang memang menuntut peran aktif sivitas akademika yang besar terutama sekali dosen dalam proses belajar-mengajar yang menentukan kualitas tidak kualitasnya produk perguruan tinggi. Untuk itu **S. Awalia Febriana, Ahsandin, Oryzati, Agnes Y. Purwitasari,** dan **Kardimin,** semuanya mahasiswa FK UGM, melakukan penelitian dengan menyebar kuestioner kepada 125 mahasiswa kedokteran angkatan 1990 – 1985. Penelitian ini berusaha mengungkap pendapat mahasiswa tentang aspirasi mereka sendiri, dosen dan metode belajar-mengajar berdasarkan masalah (problem based learning) yang telah diterapkan FK sejak tahun 1985.

Ternyata peran dosen dalam meningkatkan daya penalaran yang kritis, mendorong mahasiswa berpikir secara interdisipliner dan membuat mahasiswa untuk bertanya adalah




**Amir Fatah Sofyan**

tidak memuaskan. 34% mahasiswa menjawab tidak setuju terhadap pernyataan *dosen mendorong mahasiswa untuk lebih berpikir interdisipliner*, selebihnya yang setuju adalah 36%, 30% lainnya ragu-ragu (lihat tabel 1). Terhadap pernyataan *dosen dapat meningkatkan daya nalar mahasiswa*, 30% setuju, 32% ragu-ragu dan yang terbanyak tidak setuju 38%. Tetapi di lain pihak para mahasiswa setuju 53% bahwa dosen telah menciptakan suasana diskusi dalam kuliah, 24% ragu-ragu, 23% lainnya tidak setuju. Selain itu terhadap pernyataan *dosen mendorong mahasiswa bertanya* 44% menyatakan setuju, 32% ragu-ragu dan 24% lainnya tidak setuju. Peran dosen dalam memberi kesempatan mahasiswa untuk menggali lebih dalam pengetahuan terhadap materi kuliah juga dianggap memuaskan dengan 66% setuju, 4% ragu-ragu, dan 20% tidak setuju. Berdasarkan pengumpulan pendapat ini, peran dosen dapat dikatakan memuaskan mahasiswanya. Namun penelitian ini juga menyarankan para dosen selalu dilatih secara berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar-mengajar.

**Kuliah Membosankan**

Pada bagian peran mahasiswa, ditemukan hal yang menarik yakni mahasiswa kedokteran menganggap perkuliahan itu penting dan memilih untuk diberi informasi daripada mencari informasi atau materi kuliah sendiri. Tetapi dilain pihak, mereka memilih belajar dalam kelompok kecil. Hal ini terlihat dari 66% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan *menghadiri kuliah tidaklah penting*. 18% ragu-ragu dan 16% menyatakan tidak setuju. Untuk itu mereka memilih materi kuliah diberikan oleh dosen daripada mencari sendiri, 50% setuju, 20% ragu-ragu, 30% tidak setuju.

Para mahasiswa Kedokteran tersebut menghendaki perkuliahan haruslah dalam kelompok kecil 87% setuju, 45% ragu-ragu, 9% tidak setuju. Selain itu, 79% mahasiswa menghendaki materi yang disampaikan agar dihubungkan dengan masalah yang nyata terjadi. 16% menyatakan ragu-ragu dan 5% menyatakan tidak setuju. Namun, ini yang menarik, sebanyak 70% menyatakan setuju terhadap pernyataan *kuliah kadang-kadang membosankan*. 14% lainnya menyatakan ragu-ragu dan 16% tidak setuju. Dan ternyata 36% mengaku bahwa perlu persiapan sebelum kuliah, sebanyak 34% meragukannya dan 30% lainnya berpendapat tidak setuju. Angka-angka dari dua pernyataan terakhir ini membuat para peneliti menyimpulkan perkuliahan yang membosankan kemudian disebabkan oleh pelaksanaan *problem based learning* belum sempurna terlaksana secara integratif. Selain itu, mahasiswa yang tidak melakukan persiapan sebelum perkuliahan dimulai kemungkinan disebabkan perkuliahan tersebut hanya berpengaruh kecil terhadap nilai akhir mereka. Penelitian ini baru pendahuluan yang tentunya memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

**Perlu Diperbaiki**

Untuk mengetahui kondisi belajar-mengajar mahasiswa lainnya, BALAIRUNG menyebar 100 kuestioner kepada mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 1989 dan sebelumnya. Para mahasiswa diminta pendapatnya sekaligus alasan terhadap pernyataan-pernyataan yang mencakup suasana perkuliahan, proses belajar-mengajar dan materi kuliah. Seperti mahasiswa Kedokteran, 72% mahasiswa Hukum menjawab setuju terhadap pernyataan *perkuliahan sekarang pada umumnya cenderung membosankan*. 14% ragu-ragu, dan 13,3% tidak setuju (Tabel 2). Alasan mereka yang setuju lebih ditimpakan kepada dosen yang memberi kuliah antara lain kuliah hanya mendikte, tidak ada keseimbangan antara teori dan praktek. Salah seorang menuliskan alasannya, "Kuliah hanya mendengar. Bikin ngantuk!"

Itulah sebabnya 50,6% menyatakan tidak setuju bahwa cara dosen mengajar selama ini memuaskan, menimbulkan suasana diskusi. Alasan yang mereka berikan, dosen hanya memberi ceramah, hanya memberi catatan, monoton. 40% meragukannya dengan alasan tidak semua dosen bertindak demikian; sebagian lagi menjawab itu tergantung dari dosen tersebut. 9,3% sisanya menyatakan setuju. Akhirnya hampir 89,3%, beranggapan cara mengajar dosen perlu diperbaiki. Alasan-alasan yang dikemukakan beragam yaitu karena dosen monoton dan otoriter dalam mengajar, hanya satu arah, tidak menguasai materi dengan baik. Namun lebih banyak dari mereka tidak memberikan alasan. 10,7% lainnya menyatakan ragu-ragu dengan alasan ada yang harus diperbaiki ada juga yang tidak. Dan tidak ada yang memilih tidak setuju.

Lalu apa yang dikehendaki para mahasiswa Hukum tersebut? Selain perbaikan mutu dosen seperti di atas, 86,7% menghendaki proses belajar-mengajar dilakukan dengan kelompok keci. 8% meragukannya dan 4% tidak setuju dan 1,3% tidak menjawab. Alasan pilihan terbanyak ini adalah agar mahasiswa aktif, dapat berdiskusi, dan efektif. Dalam suasana tersebut yakni dengan diskusi, praktek dan pekerjaan rumah, materi kuliah diberikan. Sebanyak 85,3% mahasiswa menyetujuinya, 9,3% ragu-ragu dan selebihnya tidak setuju. Namun yang menarik ada beberapa dari mereka yang menyatakan ragu-ragu memberikan alasan. "Diskusi boleh-boleh saja. Tapi PR *no way*. Bikin repot. "Mereka juga menolak penyampaian materi kuliah yang satu arah 80%, 8% meragukannya dan 9,2% menjawab setuju, selebihnya tidak menjawab.

Amir Fatah Sofyan

| Menghadiri kuliah tidak penting. | |
|---|---|
| setuju | 16% |
| ragu-ragu | 18% |
| tidak setuju | 66% |



TABEL I ITEMS 5

Amir Fatah Sofyan

| Kuliah kadang-kadang membosankan. | |
|---|---|
| setuju | 70% |
| ragu-ragu | 14% |
| tidak setuju | 16% |



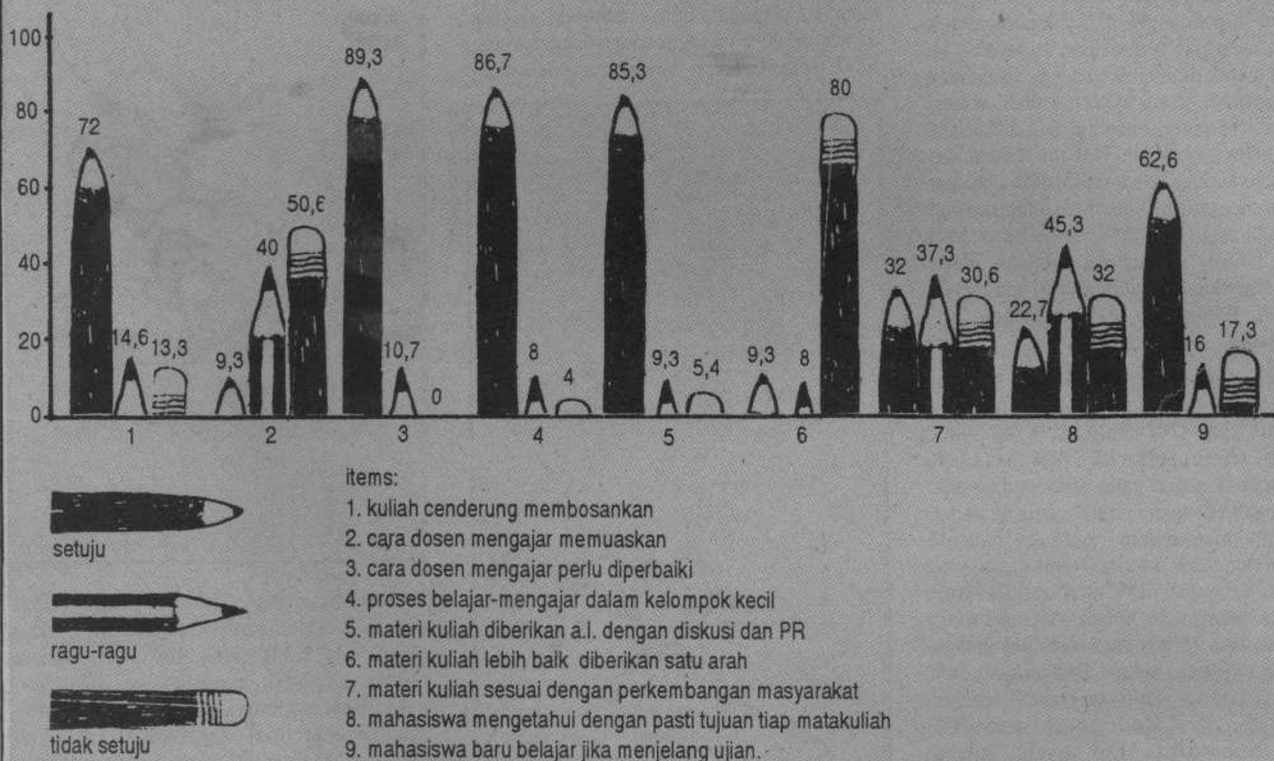
TABEL I ITEMS 9

Terhadap matakuliah yang diajarkan, para mahasiswa Hukum menjawab ragu-ragu 37,3% terhadap pernyataan *materi kuliah yang diberikan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat*. Pada umumnya mereka beralasan ada materi yang sesuai ada juga yang menjawab terlambat atau kuno. 30,6% lainnya menjawab tidak setuju dan 32% setuju. Mereka juga menjawab ragu-ragu 45,3% mengadapi pernyataan mahasiswa mengetahui dengan pasti apa tujuan tiap matakuliah yang diberikan. Alasannya ada yang sudah mengetahui ada juga yang belum. Sebagian lain menjawab tidak setuju 32%, kebanyakan dengan alasan mahasiswa mengikuti suatu matakuliah karena keharusan bukan karena kebutuhan, 22,7% lainnya menyatakan setuju. Dan pada akhirnya mereka juga mengaku baru belajar jika menjelang ujian 62,6%. Alasannya pada umumnya karena sudah menjadi kebiasaan atau juga karena malas. 16% ragu-ragu dan sisanya 17,3% tidak setuju, dan selebihnya 4% tidak menjawab.

dosennya yang kurang memuaskan. Apakah memang demikian keadaan dosen? Dari segi mutu, Dirjen Dikti telah menggariskan dosen yang mengajar di program S1 haruslah mempunyai gelar tambahan (S1 plus). Dan tiap universitas sebaiknya mempunyai 30 – 40% dosen dengan S1 plus dari dosen keseluruhan. Data dari Memorandum Akhir Jabatan Rektor 1986 – 1990, pada masa Pak Koesnadi, menunjukkan UGM mempunyai lebih kurang 2000 dosen tetap. Tetapi 193 diantaranya menjalankan tugas belajar di dalam negeri dan 251 lainnya di luar negeri, menurut data tahun 1989. Dari jumlah tersebut terdapat 1.197 atau sekitar 59,85% dosen dengan S1 plus. Apabila ditambah dengan dosen S2 dan S3 maka angka mencapai 82,05% yang berarti telah melebihi target nasional.

Dengan kekuatan seperti di atas, para dosen tersebut mengajar kurang lebih 26.000 mahasiswa UGM program S1, jumlah yang dianggap masih dapat dikelola secara baik. Itu dapat dilihat dari rasio total dossen-mahasiswa di UGM yang dihitung berdasarkan data Memorandum adalah 1 : 15. Apabila diperinci lagi menurut fakultas, maka rata-rata seorang menghadapi 3 sampai 39 mahasiswa, dengan rasio terkecil pada Fak. Kedokteran dan terbanyak adalah FISIPOL. Proses belajar-mengajar dengan rasio 1:39 memang masih dapat terselenggara dengan baik. Jika demikian, apabila data-data ini benar, maka tidak ada masalah dari segi mutu dan rasio dosen-mahasiswa. Tetapi kenapa mahasiswa tetap saja mengeluh?.

"Tentu saja, derajat pendidikan dosen berpengaruh terhadap kemampuan mengajar. Makin tinggi pendidikan makin menguasai materi yang diberikan. Tetapi ada dua unsur pokok yang harus dikuasai yakni penguasaan materi dan kemampuan menyajikan. Keduanya harus seimbang. Ada dosen yang pandai betul, tapi penyajiannya kurang baik, sehingga mahasiswanya jadi bingung", kata **Prof. Dr. Masrun, MA** salah satu pengurus konsorsium Fak. Psikologi yang juga menjabat Sekretaris Senata UGM. Seorang dosen selain sebagai ilmuan juga sebagai pendidik dan pembimbing. Menurut Prof. Masrun, dalam kuliah para dosen pada prinsipnya berusaha mendorong mahasiswa untuk mencari dan menemukan sendiri secara mandiri. "Jadi yang penting bukan menyajikan materi sebanyak mungkin. Kuliah itu membahas yang prinsip-prinsip saja. Bahkan ada asumsi yang mengatakan bahwa kuliah itu hanya memberi petunjuk bagaimana mahasiswa mempelajari materi kuliah", katanya lebih lanjut.




Amir Fatah Sofyan

**Kualitas Dosen**

Data-data ini memang baru berupa pengumpulan pendapat mahasiswa dan memerlukan analisa lebih lanjut. Tetapi beberapa kecenderungan telah tampak. Yang paling menonjol adalah keluhan mahasiswa terhadap dosennya yang kurang memuaskan.

Mengenai hal ini **Ir. Priyono,** staf pengajar MIPA, berpendapat kedua belah pihak yaitu dosen dan mahasiswa haruslah aktif dan saling mendukung. Ir. Priyono mengakui, "Memang seringkali agak sulit bagi saya.

Dosen sering dianggap salah kalau mahasiswanya tidak mandiri. Tapi menurut saya, kalau saya ajak berdiskusi banyak mahasiswa mendadak menjadi pendiam. Ada pertanyaan? Diam." "Kebudayaan" mahasiswa yang seperti itu memang bukan "barang baru" lagi.

**Pelaksanaan Sistem Kredit**

Persoalan memang tidak sampai pada hubungan dosen-mahasiswa saja tetapi lebih luas daripada itu misalnya saja permasalahan yang dilempar oleh Prof. Masrun: masalah pelaksanaan sistem Kredit. Telah diketahui umum bahwa yang dilaksanakan selama ini memang bukan sistem kredit yang murni. "Yang salah itu bukan sistem kredit atau sistem paketnya, tetapi sistem penyajiannya." kata Prof. Masrun. Menurutnya, sistem kredit sebenarnya memberi kesempatan mahasiswa untuk mengambil matakuliah sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa. Jika prinsip ini dilaksanakan dengan sempurna, maka matakuliah yang disajikan tidak terbatas. "Sekarang itu banyak fakultas yang matakuliahnya terbatas karena mungkin dosennya sedikit. Akibatnya apa? Sistem Kredit tersebut dipaketkan," tuturnya. Selain itu, sistem kredit sebenarnya berusaha menghapus tembok-tembok yang mengkotak-kotakkan fakultas satu dengan yang lain. Karena sistem kredit memungkinkan seorang mahasiswa Psikologi untuk kuliah di Fakultas ISIPOL jika ia membutuhkan ilmu sosial.

Kenapa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan? "Hambatannya banyak. Pertama adalah masalah tenaga edukatif yang terbatas. Kedua, tiap fakultas menyusun kurikulum yang hanya berlaku untuk fakultasnya. Dalam penyusunannya, tidak ada komunikasi antar fakultas." Jelas Prof. Masrun. Hal ini dibenarkan oleh **drh. Boesono** dari Sub-unit Pengembangan Akademik yang merupakan sub-unit dari Unit Pengembangan UGM. "Salah satu tujuan utama dari unit pengembangan adalah mengusahakan penyatuan *self -sufficient* fakultas-fakultas tersebut," ujarnya. Kebanyakan fakultas-fakultas mengembangkan disiplin ilmunya sendiri-sendiri. "Padahal itu nantinya akan menimbulkan kekacauan bahkan kesalahan," tutur drh. Boesono lagi. Ia memberi contoh pengembangan ilmu statistik yan dipakai oleh beberapa fakultas seperti Psikologi, Ekonomi, Pertanian satu sama lain mengembangkan rumus sendiri dan tidak standar.

Usaha-usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas bukannya tidak ada. Unit Pengembangan UGM -- yang mempunyai dua sub unit lainnya yaitu sub unit pengembangan fisik dan sub unit sistem Informasi-- berusaha meningkatkan kemampuan operasional dosen antara lain memperkecil rasio dosen-mahasiswa, menyelenggarakan program Pasca Sarjana untuk mempertinggi pengetahuan dosen, menyelenggarakan cras program untuk menghasilkan lebih banyak sarjana serta menyelenggarakan Program Mengajar V untuk mempertinggi keterampilan mengajar. Sejak 1989 UGM telah melaksanakan Program Pendekatan Terapan (*Applied Approach*) bagi para dosen.

Program ini bertujuan menyiapkan tenaga dosen untuk mengembangkan bahan perkuliahan yanag pada gilirannya diharapkan dapat mengaktifkan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Diperkirakan, program ini cocok untuk diterapkan bagi mahasiswa baru, untuk dapat belajar secara mandiri. Untuk itu, proses belajar-mengajar dengan program ini akan lebih berhasil jika dilaksanakan dengan kelas kecil lebih kurang 50 mahasiswa.

Namun, menurut edaran dari Unit Pengembangan UGM hambatan pelaksanaan program ini bukannya tidak ada seperti: kekurangan ruang kuliah, adanya kelas-kelas besar berisi 100 mahasiswa, kekurangan dosen dan asisten, jumlah buku bacaan yang terbatas, pembiayaan kegiatan-kegiatan lain, yang semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Agaknya satu aspek lagi lupa dicantumkan seperti yang ditulis oleh seorang responden: "Meskipun mutu keilmuan dosen baik, akan tetapi bagaimana mungkin dia akan menjadi dosen yang baik sementara dia harus berpikir bagaimana besok bisa makan?".

**Nur Hidayat  Suseno  Seno J. Suyono**

Kuliah cenderung membosankan

| | |
|---|---|
| setuju | 72% |
| ragu-ragu | 14.6% |
| tidak setuju | 13,3% |




TABEL II ITEMS 1

Amir Fatah Sofyan

Cara dosen mengajar perlu diperbaiki.

| | |
|---|---|
| setuju | 89,3% |
| ragu-ragu | 10,7% |
| tidak setuju | 0% |



TABEL II ITEMS 3

Amir Fatah Sofyan

# BUNGA-BUNGA KUSAM PENDIDIKAN TINGGI

Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional telah menetapkan arah pendidikan nasional yakni bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan kata lain, undang-undang ini --terlepas dari kekurangan-kekurangannya-- menjamin terwujudnya manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan.

Setelah sekian lama berlaku sejak diundangkan, bagaimanakah hasilnya?. Tentu saja hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang spontan, dapat dilihat langsung hasilnya. Paling tidak memerlukan waktu 5 – 10 tahun untuk melihat undang-undang tersebut dapat dikatakan berhasil. Namun tidak ada salahnya apabila kita melihat kondisi yang ada berdasarkan hasil evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 1989 lalu. Terungkap antara lain proses belajar-mengajar selama ini perlu diperbaiki agar dapat menciptakan motivasi mahasiswa untuk berkembang secara mandiri; pelaksanaan sistem kredit yang dirasakan kurang efektif karena mahasiswa terlalu banyak menggantungkan bahan kuliah tatap muka yang merupakan proses penyampaian searah.

Materi kurikulum juga mendapat sorotan: bagaimanakah suatu rumusan kurikulum yang antisipatif, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan iptek dan masyarakat? Lalu bagaimanakah dengan kreativitas, kualitas berpikir dan kemandirian mahasiswa seperti yang menjadi tujuan UU No. 2 tahun 1989? Bagaimana pula dengan kondisi para dosen? Apa yang seharusnya dilakukan oleh yang berwenang dalam hal ini pihak Depdikbud?.

Temu Wicara kali ini berusaha membahas masalah tersebut dengan mengundang: **Dr. Nopirin** (staf edukatif Fak. Ekonomi UGM), **Dr. R. Syarif** (staf edukatif Laboratorium Ilmu Faal Fak. Kedokteran UGM), **Ika Dewi Ana** (mahasiswa Fak. Kedokteran Gigi UGM), dan secara terpisah **Rifai Arfan** menemui **Lalu Abdul Aziz** (Mahasiswa Fak. MIPA UGM) serta **Heru Dewanto** (Mahasiswa Teknik Sipil UGM). Temu Wicara dipandu oleh **Nur Hidayat** yang sekaligus menuliskannya.

**Masih Tradisional**

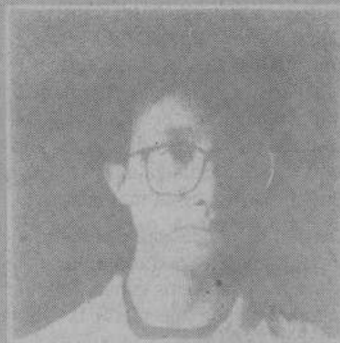
Ika Dewi Ana mengawali perbincangan dengan mengemukakan bahwa undang-undang, peraturan-peraturan dan kurikulum memang merupakan tatanan ideal sebagai suatu sistem. namun fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang bermunculan dalam laju sistem lebih sering meleset dari kondisi yang diidealkan. Kondisi inipun mewarnai wajah pendidikan --termasuk pendidikan tinggi. "Fenomena yang dapat menjadi contoh sederhana adalah semakin sedikitnya jumlah lulusan per periode tertentu dan semakin kecilnya tingkat persaingan nilai. Padahal di sisi lain, regulasi diturunkan standarnya," ungkap Ika sambil mencontohkan UGM yang menurunkan standar IP dari 2,5 menjadi 2.

Fenomena di atas masih ditambah dengan keluhan tentang sikap mental mahasiswa yang "agak menurun" jika tidak dikatakan *amburadul.* "Artinya semakin hari semakin sering dijumpai fenomena *by-pass diseases.* Mahasiswa semakin terjebak pada formulasi "asal lulus" sementara staf pengajar adalah produk formulasi yang sama pula. Keadaan-keadaan yang berlaku tersebut ternyata berkembang subur karena adanya pergeseran orientasi secara massal," kata Ika lebih lanjut. Keadaan ini pada akhirnya merupakan lingkaran setan yang memberi warna kusam pada pendidikan tinggi. Ika kemudian memberi pertanyaan mendasar: apakah memang sistem pendidikan yang ada sekarang ini tidak mampu mengakomodasikan segenap persoalan yang ada?.

Itu karena sistem pendidikan kita masih tradisional," demikian pendapat dr. R. Syarif. "Pelaksanaan pendidikan masih menekankan pendidikan sebagai subjek. Anak didik dijadikan objek pasif yang harus disesuaikan dengan hal-hal yang terdapat di luar dirinya. Itukan sama saja seperti membuat onde-onde, "tuturnya. Salah satu manifestasinya terungkap pada pelaksanaan kuliah dengan penyampaian informasi yang searah. Dalam pandangan dr. Syarif, kuliah terutama ditujukan untuk memberi pengarahan umum dalam memahami konsep dasar yang utama.

Namun apabila jam-jam kuliah terlalu banyak menyita waktu, mahasiswa tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan memproses pengetahuan yang diperoleh secara mendalam (elaborasi). "Akibatnya mahasiswa cenderung mengorganisasi pengetahuan mereka sesuai dengan jalan pikiran si pemberi kuliah, baik secara ensiklopedi maupun hafalan, sehingga pengetahuan tersebut sulit diingat kembali, lebih-lebih digunakan untuk memecahkan suatu masalah," tutur dr. Syarif.

Bila keadaan ini terus berlangsung, menurut dr. Syarif, maka dalam diri mahasiswa tidak akan tertanam kebiasaan belajar mandiri, melainkan hanya tergantung pada kuliah serta mengambil sikap *spoon-fed,* menerima apa saja dalam belajar.



KELIK SUPRIYANTO

**Lalu Abdul Aziz**

Lebih banyak kita mendapatkan sistem pendidikan burung beo. Mahasiswa yang pintar hanyalah mahasiswa yang bisa mengulang kata-kata dosen.

**Kemandirian Belajar**

Untuk itulah Fakultas Kedokteran kini sedang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip SPICES yakni: *self directed learning, problem based learning, integrated teaching, community oriented, early clinical exposure* dan *student centered.* Semuanya ditujukan bagi pembentukan kemandirian mahasiswa dalam melakukan studinya. Diharapkan mahasiswa aktif, mandiri dan mampu mengembangkan karir akademik maupun profesional (*self directed learning*); selain itu mahasaiswa juga belajar dengan berdasarkan masalah yang ada dan diberikan secara terpadu (*problem based learning, integrated teaching*).

Apa yang dipelajari tersebut harus mempunyai relevansi dengan masyarakat (*community oriented*); pengetahuan praktis dan praktek klinis juga diberikan lebih awal (*early clinical exposure*)' dan proses belajar-mengajar dilakukan dengan kelompok-kelompok diskusi, kuliah pakar dengan lingkup kecil (*student centered*). "Jadi mahasiswa harus komprehensif, belajar sendiri, memperdalam sendiri. Kita hanya memberikan kuliah sedikit tapi dalam lingkup luas supaya dia bisa berkembang," ujar dr. Syarif.

Tentu saja, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut memerlukan dukungan semua pihak sivitas akademika. Dan dalam hal ini, dosenlah yang mempunyai peran utama. Para dosen diharapkan menciptakan proses belajar-mengajar yang dua arah misalnya dalam bentuk diskusi, ataupun kelompok-kelompok belajar. Juga diharapkan mampu menciptakan rasa ingin tahu mahasiswa. Tetapi Lalu Abdul Aziz menunjukkan bahwa "Lebih banyak kita mendapatkan proses belajar-mengajar yang searah, hanya dari dosen saja. Mahasiswa cuma mendengarkan. Proses ini seperti sistem pendidikan 'burung beo'. Mahasiswa yang pintar hanyalah mahasiswa yang bisa mengulang kata-kata dosen saja," tutur mahasiswa FMIPA ini.

**Dosen dan Mahasiswa**

Dr. Nopirin, dari Fakultas Ekonomi, juga melihat hal yang sama seperti Abdul. Ia banyak menjumpai dosen yang kurang memberi pengarahan kepada mahasiswa. Misalnya saja memberi pengarahan tentang untuk apa suatu mata kuliah diberikan, materi apa yang diajarkan, dan yang lebih penting lagi tujuan suatu matakuliah diberikan. "Padahal suatu pendidikan tanpa mengetahui tujuannya dapat menimbulkan frustasi," kata Nopirin. Ia kemudian menganjurkan para dosen perlu melengkapi diri dengan "perangkat kuliah" seperti *reading list* dan silabus untuk diberikan kepada mahasiswa. "Dosen banyak yang tidak memperhatikan itu," tambah Nopirin lagi.


KELIK SUPRIYANTO

**Ika Dewi Ana**

Pendidikan nasional sekarang berjalan di atas **doubled standart:** standar ideal terlalu mengawang dan standar realita yang justru acuannya bukan nilai intrinsik.


KELIK SUPRIYANTO

**Nopirin**

Sistem yang dilaksanakan selama ini adalah sistem paket yang diberi sistem kredit. Akibatnya kurikulum tidak fleksibel dan mahasiswa tidak inisiatif.

Di lain pihak, Nopirin melihat banyak mahasiswa mempunyai persepsi yang salah terhadap dosen dengan menganggap dosen itu segala-galanya. Sehingga jika terjadi penurunan kualitas mahasiswa, dosen yang pertama-tama disalahkan. "Padahal itu keliru. Sumber ilmu itu bukan dosen melainkan buku. Baik mahasiswa atau pun dosen mengacu pada buku sebagai sumber ilmu. Jadi fasilitas perpustakaan menjadi sangat penting. Jika memandang dosen segala-galanya, maka akan mengurangi kemandirian mahasiswa".

Dengan berpandangan demikian, menurut Nopirin, mahasiswa dituntut untuk selalu *asking question* dan kritis karena ada sumbernya yaitu buku yang juga merupakan sumber untuk dosen. "Sehingga dalam kuliah akan terjadi dialog. Dosen hanya mengkonfirmasi dan menjelaskan kalau masih ada yang belum jelas, "papar Nopirin.

Persoalan perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa yang ada turut mempengaruhi proses belajar-mengajar. "Untuk tingkat nasional perbandingannya adalah 1 : 23. Untuk tingkat perguruan tinggi negeri 1 : 14 sedangkan swasta 1 : 38. UGM sendiri 1 : 15,5. Saya pikir masih lumayan," tutur Hendro Prabowo memaparkan data-data yang dikumpulkannya. "Kita tak usah khawatir karena sebagian besar dosen kita dari S2 dan S3 ada 44% dan ada 460 orang yang masih belajar di luar negeri," tutur Hendro yang pernah memperoleh juara I LKIP tingkat Nasional dibidang Humaniora dan Sosial Budaya pada 1991.

Hendro juga menunjukkan adanya indikasi yang positif berdasarkan data jumlah karya ilmiah mahasiswa yang dilombakan. Pada 1990/1991 UGM telah mengirimkan 12 judul penelitian yang terdiri dari 11 judul LKIP dan 1 judul LKTI juga mengirimkan 4 tim pameran ilmiah. "Bandingkan dengan UI yang mengirimkan 1 judul dan 1 tim pameran," kata Hendro. Maka ia melihat UGM mengalami kemajuan pesat dengan mahasiswa yang cukup kreatif dan mandiri.

### Hubungan Dialogis dan Egaliter

Heru Dewanto melihat masalah hubungan dosen-mahasiswa dari sisi lain. Untuk menimbulkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa diperlukan suasana egaliter dalam proses belajar-mengajar maupun dalam lingkup yang lebih luas: di dalam kehidupan sivitas akademika kampus. "UGM tampaknya kurang suasana seperti itu. Mungkin disebabkan pengaruh budaya tradisional yang feodal. Seorang mahasiswa terhadap dosen agak jauh jaraknya," jelas Heru.

Pendapat senada diungkap oleh Abdul, "Kita sering mendengar adanya mahasiswa yang sedikit sungkan atau takut pada dosen. Padahal perbedaan antara mahasiswa dan dosen hanya dalam kadar kognitif saja." Suasana egaliter ini pada gilirannya akan menimbulkan hubungan yang bersifat dialogis antara dosen dan mahasiswa.

# PERBAIKAN LEWAT


Prof. Dr. Ir. Mochammad Adnan, M.Sc.

Perguruan Tinggi tidak dapat dikatakan pendidikan pembentukan moral. Ia hanya tempat mengasah keahlian, moral dan kemandirian. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Moral, itu dibentuk di pendidikan dasar. Karena itulah, kini Mendikbud menekankan kepentingan aspek pembentukan dan pendidikan moral di Sekolah Dasar. Perguruan Tinggi bertanggungjawab mengembangkan dan mengasah.

Pendidikan di Perguruan Tinggi dewasa ini kerap disorot. Tentu, ia adalah lembaga yang menelorkan kader pembangunan. UGM pun tak luput. Strategi pendidikan UGM mengarah pada pendekatan terapan. Lembaga pendidikan ini sarat dengan misi pendidikan. Demi kelancaran ada transformasi ilmu dari dosen ke mahasiswa, kita menjalankan program pendekatan terapan. Kami namakan *Pendidikan Dosen Terapan* (Applied Approach). Kini telah menginjak angkatan ke-

Program ini menekankan adanya perbaikan kualitas cara mengajar dosen yang diharap-

Abdul menyebut hubungan ini dengan hubungan yang "simbiose mutualistis", "Jadi dalam menyampaikan matakuliahnya ada proses timbal balik, mahasiswa mendapat pengetahuan dan dosen bisa meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam disiplin ilmu yang ditekuninya," ujar Abdul. Pemikiran-pemikiran inilah hendaknya dituangkan ke dalam kurikulum. Maka kemudian akan timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya konsep ideal suatu kurikulum?

"Pengertian kurikulum sebenarnya lebih luas dari sekedar urut-urutan matakuliah. Itu keliru. Kurikulum menyangkut penentuan bagaimana suatu matakuliah digunakan untuk mencapai sasaran pengajaran. Didalamnya menyangkut masalah penentuan tujuan pengajaran, proses belajar-mengajar isi atau materi kuliah, penyusunan atau organisasi kuliah dan evaluasi yang merupakan *feed back* kurikulum," ujar Nopirin yang pernah menjabat Pembantu Dekan I FE UGM ini. Selain itu, lanjut Nopirin, kurikulum harus selalu dievaluasi apakah telah mencapai target dan tujuannya yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting lagi harus antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, siapakah yang bertugas untuk selalu memonitor kurikulum? "Itu merupakan wewenang dan tugas dari konsorsium masing-masing disiplin ilmu. Konsorsium sebenarnya merupakan *advisory body* pada Dirjen Dikti bagi *academic development*," kata Nopirin menjawab pertanyaan tersebut. Konsep kurikulum yang dihasilkan oleh konsorsium ini kemudian diajukan ke Depdikbud untuk kemudian mengesahkannya. Namun Nopirin mengakui bahwa kemajuan kerja atau hasil-hasil yang dicapai oleh tiap-tiap konsorsium berbeda satu sama lain. "Ada konsorsium yang aktif, ada juga yang melempem. Dirjen Dikti hanya memberi anggaran minim sekali. Padahal konsorsium itu kan terdiri dari berbagai universitas yang berjauhan," jelas Nopirin.

Jika demikian pertanyaan selanjutnya siapakah yang memonitor kerja konsorsium-konsorsium tersebut? Untuk itulah Heru dewanto mengingatkan bukan hanya sebatas hasil kerja saja, namun lebih jauh daripada itu. "Banyak pihak yang berkepentingan terhadap produk pendidikan kita. Misalnya saja militer, politisi ataupun pengusaha. Orang-orang itu punya cukup *power* untuk mempengaruhi kondisi pendidikan termasuk dalam hal ini mempengaruhi kurikulum," tuturnya sambil mencontohkan ada kuliah-kuliah titipan dari militer atau politisi.

Senada dengan Heru, Abdul Aziz melihat mahasiswa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam hal ini. "Mahasiswa sekarang seperti robot. Kita dibentuk mengikuti kehendak *The Man Behind The Education* saja "katanya.

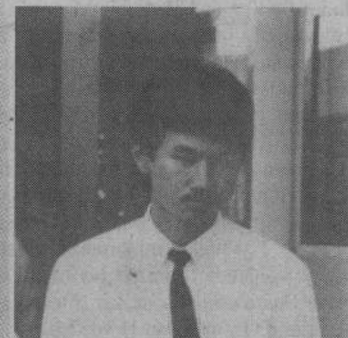
Bagi Heru, keadaan di atas tidak memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kecende-



KELIK SUPRIYANTO

**R. Syarif**

Pelaksanaan pendidikan masih tradisional: menekankan pendidik sebagai subjek. Anak didik dijadikan objek pasif seperti membuat onde-onde.



ISTIMEWA

**Heru Dewanto**

Mahasiswa bukan objek dari pendidikan. Dia punya kebebasan untuk memilih. Mahasiswa bukan kuda sirkus yang dilatih untuk ditampilkan dalam sirkus.

# APPLIED APPROACH

kan lebih komunikatif dan tidak terlalu kaku tetapi merangsang mahasiswa untuk lebih menggali kedalaman ilmu yang diajarkan. Taktiknya adalah *"two-way communication"*.

Proses belajar-mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik terlihat cenderung menerapkan teknik searah. Ini tak luput dari fakta bahwa mahasiswa fakultas-fakultas tersebut besar jumlahnya. Saya pernah menawarkan untuk mengurangi jumlah mahasiswa. Kenyataannya, negara ini masih memerlukan banyak sarjana-sarjana hukum dan sosial politik. Masalahnya, hanya kejenuhan yang berpusat di tempat tertentu.

Menyinggung mutu pengajaran, memang tingginya jenjang pendidikan dosen tidak menjadi jaminan bahwa ia adalah dosen yang kompetern. UGM punya strategi untuk mengatasi masalah itu. Seluruh dosen UGM kami gilir sesuai keluangan masing-masing untuk dididik dalam program Pendidikan Dosen Terapan. Hasilnya sudah terlihat. Ada kemajuan dalam teknik mengajar di ruang kuliah. Namun, tak semua ilmu harus disampaikan lewat ruang kuliah. Transfer tersebut dapat kita lakukan lewat diskusi, seminar dan simposium. Mengingat ini, ada beberapa fakultas yang telah menerapkan metode ini. Kita lihat hasilnya.

**Retno Suprihatin**

rungan masing-masing. "Mahasiswa bukan objek dari pendidikan. Dia punya kebebasan untuk memilih. Mahasiswa bukan kuda sirkus yang dilatih kemudian ditampilkan dalam sirkus," ujar Heru. Tetapi apakah Sistem Kredit Semester yang dijalankan selama ini tidak menjamin hal tersebut?.

**Inti dan Pilihan**

"Sebenarnya Sistem Kredit Semester memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk merencanakan studinya. Tapi yang dilaksanakan selama ini adalah sistem paket yang diberi baju sistem kredit. Akibatnya kurikulum tidak fleksibel dan mahasiswa tidak inisiatif karena tidak bisa menyusun rencana studi," jelas Nopirin. Ia beranggapan bahwa kalau menggunakan sistem kredit, SKS pilihan semestinya lebih banyak daripada SKS inti, dengan prosentase misalnya 60% dibanding 40%. Dengan prosentase pilihan yang lebih banyak tersebut diharapkan mampu menampung aspirasi mahasiswa, perkembangan iptek dan menampung situasi daerah dimana perguruan tinggi itu berada. "Nah, ini yang bisa antisipatif dan fleksibel. Sistem yang sekarang ini terbalik," kata Nopirin lagi sambil mengingatkan di lain pihak, SKS inti harus ada karena itulah yang merupakan standar.

Tampaknya sebagian besar peserta Temu Wicara setuju bahwa konsep ideal kurikulum adalah kurikulum yang mengandung muatan pilihannya lebih banyak. Ini dengan asumsi muatan pilihan tersebut merupakan unsur yang fleksibel dan antisipatif terhadap perkembangan dunia yang terjadi. Bagaimana dengan UGM sendiri? Bagi Heru Dewanto, UGM termasuk lambat mengadaptasi perubahan teknologi. Heru mencontohkan beberapa matakuliah di fakultasnya yang *out of date,* sudah terlalu kuno. "Mungkin ini karena pengaruh budaya yang lambat untuk berinteraksi," tuturnya. Daerah-daerah pesisir dimana terletak UI dan ITB, menurut Heru, lebih cepat dan progresif dalam mengejar dan mengadaptasi perubahan iptek.

Faktor pengaruh budaya seperti yang dikemukakan oleh Heru memang baru dugaan. Tetapi terjadinya perubahan-perubahan iptek yang penting dalam abad ini adalah kenyataan. Seperti yang dikemukakan oleh Ika Dewi Ana, penemuan dan penciptaan terjadi silih berganti, informasi ilmiah diproduksi dengan cepat melipat dua setiap lima tahun. Bahkan dalam disiplin-disiplin tertentu seperti genetika terjadi setiap dua tahun, sehingga menimbulkan kesukaran dalam penyebaran, penyimpanan, penelusuran dan penyerapannya.

Itu saja tampaknya belum cukup. Di dunia teknologi dan profesi terjadi spesialisasi yang terus menerus meskipun ilmu-ilmu yang integratif pesat berkembang. "Semuanya seolah-olah serba revolusioner," tutur Ika.



KELIK SUPRIYANTO

**Hendro Prabowo**

Kita tak usah khawatir karena sebagian besar dosen kita cukup bermutu. Ada sekitar 44% dari S2 dan S3.

**Seperti Tokoh Iyom**

Perubahan-perubahan revolusioner ini juga yang melanda masyarakat kita yang tampaknya masih mengalami masa transisi. Seperti yang ditunjukkan oleh Ika, ada masyarakat yang masih berada dalam tahap pra-ilmiah, ada yang telah memasuki tahap informasi dan banyak yang berada di antara keduanya sehingga yang terjadi adalah semua yang serba tanggung. Ini pada gilirannya juga berpengaruh pada praktek-praktek pendidikan pada masyarakat kita.

Ika memberi contoh, "Buku-buku ilmiah masih merupakan barang mewah, tetapi majalah hiburan dicetak secara modern dalam jumlah besar. Pendidikan berkisar dari tatap muka individual sampai ke jarak jauh yang impersonal. Pemisahan dua dunia jiwa-raga, alamiah-sosial, masih berlangsung pada tingkat pendidikan menengah. Sebaliknya pada tingkat pendidikan tinggi sudah multidisipliner dan *problem oriented.* Sistem paket dan sistem kredit masih bercampur. Gelar akademis masih penting sekali tetapi pemikiran ke arah manusia seutuhnya sudah jauh ke depan."

Hal-hal di atas tersebut menurut Ika yang sebenarnya menjadi pangkal tolak kesenjangan yang terjadi antara ide yang diangankan dalam konsep pendidikan nasional dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Keputusan-keputusan yang bersifat global-nasional lebih banyak diambil di pusat-pusat yang menerima banyak informasi. Padahal persoalan yang berkembang pada masing-masing daerah samasekali beraneka ragam.

Lalu Abdul Aziz melihat satu masalah lagi yakni, "Orientasi kita selalu ke Barat. Mungkin kita harus memaklumi bahwa dengan kondisi kita sekarang, kita belum mampu menciptakan sistem yang bisa membuat kita mandiri dalam membuat kurikulum," katanya. Orientasi seperti ini menurut Ika, "Akhirnya akan menjadi bangsa kita bangsa yang gagap menanggapi setiap perkembangan seperti tokoh Iyom dalam *Matahari-matahari* garapan Arifin C Noer."

**Dimensi Kearifan**

Ika kemudian mencoba mengambil kesimpulan bahwa pendidikan nasional sekarang berjalan di atas *doubled standart;* standar ideal yang terlalu mengawang-awang dan standar realita yang justru acuannya bukan nilai-nilai intrinsik. Yang kedua, Ika beranggapan perlunya dimensi kearifan dalam dunia pendidikan. "Ini dapat diwujudkan dengan memberi warna humaniora dalam pendidikan kita. Jadi naluri kita sebagai manusia, dimensi kemanusiaan kita terbangun." kata Ika.

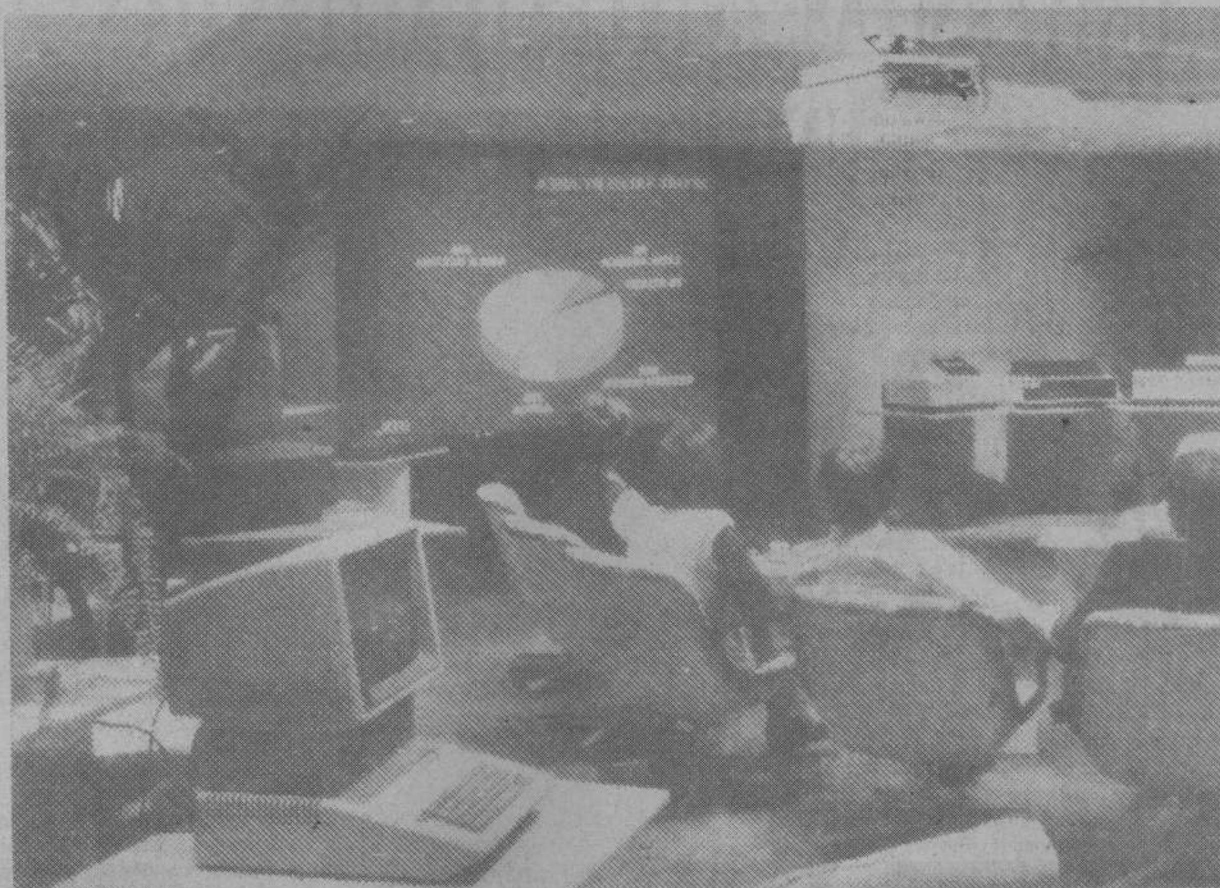
Namun, Ika mengakui bila menjawab bagaimana sistem pendidikan yang ideal, "Saya masih akan tetap bingung," ungkapnya. Pendidikan memang masalah yang tidak mudah dan kompleks. Permasalahannya tidak bisa ditinjau hanya dari satu sisi saja melainkan harus juga memperhatikan sisi lain secara global. Tetapi akan kemana lagi orang akan menoleh ketika menghadapi pertanyaan mendasar tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pembangunan kalau tidak pada bidang perekayasaan manusia ini. Pemikiran-pemikiran di atas paling tidak merupakan masukan segar dalam upaya menumbuhkan "bunga-bunga" sarjana yang "kecantikan" kemampuan dan cakrawala wawasannya memadai dan tidak kusam.

**Nur Hidayat Rifa'i Arfan**

BARCO

Video, Data &
Graphics Projection

**SALES & RENTAL**



**" Masuki dunia layar besar BARCO dan......... temukan kenyamanan dari gambar yang sempurna "**





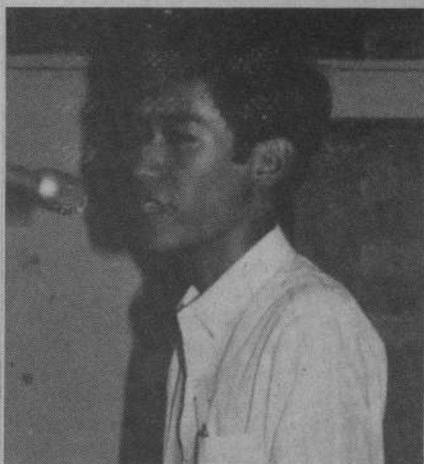
p.t. CAKRA SUDARMA

RIGUNAS GROUP

PT. CAKRA SUDARMA
Jalan Kemang Raya No. 8,
JAKARTA 12730
**Telp. : 799-3334 ; 799-4044**
Telex : 47392 Rimba ia
Fax : 799-6858

SHOWROOM
WIJAYA GRAND CENTER
Blok B - 14 Fax : 720-2910
Jalan Darmawangsa III
**Telp.: 720-2874 ; 720-2895**
**720-2998**

# UNIVERSITAS: INTELEKTUALITAS DAN UNIVERSALITAS


ISTIMEWA

**BUDIAWAN**
Mahasiswa Fak. Sastra Jur. Sejarah UGM

Prof. Koesnadi Hardjosoemantri dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa mahasiswa pada dasarnya adalah *intelektual muda*. Beliau menolak pendapat umum (resmi?) yang menyatakan bahwa mahasiswa adalah *calon intelektual*. Adakah suatu perbedaan mendasar antara kedua istilah itu? Ataukah perbedaan itu sekedar bersifat gradual?

Kalau kita berkata bahwa mahasiswa adalah intelektual muda, maka pada dasarnya dia telah menjadi intelektual. Kita sebut intelektual karena potensi-potensi intelektualitas yang ada padanya telah termanifestasikan dalam cara dia berpikir, berbicara, dan bertindak walaupun mungkin masih dalam tahap yang belum canggih. Sedangkan kalau kita berkata mahasiswa adalah calon intelektual, berarti dia bukan (belum?) intelektual. Mungkin dia memiliki potensi intelektualitas yang tinggi. Namun, meskipun demikian, potensi-potensi itu masih berada di tempat persembunyiannya.

Usaha pembedaan makna kedua istilah di atas berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang *esensi diri* mahasiswa. Selanjutnya, perbedaan persepsi tersebut berimplikasi pada perbedaan strategi pendidikan yang (hendak) diterapkan, dan sekaligus juga pada pola relasi antara mahasiswa dan dosen. Dengan kata lain, persepsi yang berbeda membawa implikasi praktis yang berbeda pula.

### Subjek dan Objek Didik

Kalau mahasiswa dipersepsikan (dan mempersepsikan dirinya) sebagai intelektual muda, maka dalam relasinya dengan dosen dia berkedudukan sebagai dan sekaligus sebagai *mitra dialog*. Dia adalah subjek, yang bersama-sama dengan dosen melakukan penjelajahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sinilah maka model pendidikan yang dialogis merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar. Pengingkaran kebutuhan ini berarti penging-

karan persepsi tadi.

Di lain pihak, kalau mahasiswa dipersepsikan (dan mempersepsikan dirinya) sebagai calon intelektual, maka dalam relasinya dengan dosen dia ditempatkan (dan menempatkan dirinya) sebagai dan adalah *objek didik*. Dia hadir hanya sebagai potensi, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada para dosen untuk digali dan dikelola. Itu berarti dia pasif, karena memang dipasifkan (dan mempasifkan diri). Pola relasi yang demikian ini, yakni pola relasi subjek-objek, kondusif bagi berkembangnya model pendidikan yang monologal. Sebaliknya, model pendidikan yang demikian itu, akan memelihara pola relasi tersebut.

**Pabrik Sarjana dan Komunitas Ilmiah**

Implikasi-implikasi praktis di atas selanjutnya menentukan watak dan orientasi universitas sebagai lembaga. Pada kasus pertama, universitas akan berkembang menjadi sebuah *komunitas ilmiah* dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya, universitas akan menjadi suatu komunitas di mana seluruh anggotanya benar-benar memiliki kepedulian ilmiah, walaupun dalam derajat yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan kepedulian ilmiah adalah suatu devosi terhadap pencarian kebenaran ilmiah.

Oleh karena kebenaran ilmiah itu bersifat relatif, maka usaha pencarian itu tak pernah boleh dianggap paripurna. Itu berarti komunitas tersebut berwatak dinamis. Kemandekan akan menjadi musuh utamanya. Demikian pula rutinitas, yang sebenarnya adalah awal timbulnya kemandekan. Dengan kata lain, setiap usaha pemapanan diri, akan selalu mendapat tantangan dan tentangan yang sengit.

Dalam komunitas ilmiah di atas, tampak bahwa ilmu pengetahuan senantiasa dipandang sebagai proses, yang (harus) terus berproses. Setiap kali muncul temuan baru, tidak dipandang sebagai akhir kerja, melainkan justru awal sebuah kerja. Hal ini tak lain karena temuan baru senantiasa mengundang persoalan-persoalan baru.

Dengan demikian maka komunitas ilmiah pada dasarnya selain bersifat dinamis juga dialektis. Maksudnya, komunitas tersebut senantiasa bergerak dalam tegangan-tegangan ilmiah guna menuju suatu kualitas baru. Namun, kualitas baru itu pun tetap berada dalam tegangan-tegangan sehingga terhasilkan kualitas yang lebih baru lagi. Demikian seterusnya.

Pada kasus kedua, universitas akan berkembang tak lebih sebagai pabrik "sarjana" -- "sarjana" bukan dalam arti yang esensial. Mahasiswa-mahasiswanya kurang lebih adalah bahan-bahan mentah yang hendak diolah guna mendapat nilai tambah. Proses pengolahan berlangsung dari yang bersifat massal hingga eksklusif. Proses yang massal terjadi ketika mereka digiring ke dalam "mesin raksasa" yang bernama "Penararan", "Pengarahan" dan "Kuliah Umum".

> Ketika mahasiswa hendak menginjakkan kakinya ke kampus, maka dia harus berkata bahwa dirinya adalah intelektual muda. Ini bukan arogansi, melainkan untuk membangun kepercayaan diri.

Proses itu berlanjut ke tahap eksklusif, yakni ketika mereka digiring ke dalam "mesin-mesin kecil" yang bernama "tatap muka". Akhirnya proses itu berujung pada sebuah "mesin pengemasan" yang bernama "ujian komprehensif" atau "ujian tesis". Selanjutnya, sebelum produk universitas tersebut dipasarkan (dan memasarkan diri), mereka digiring ke dalam "mesin pelabelan" yang bernama "wisuda"

Selesailah sudah tanggung jawab universitas dalam memberikan nilai tambah kepada mereka. Namun tiap tahun ribuan bahan mentah baru menyerbu "pabrik" tersebut. Ini berarti, proses kerja yang mekanistis itu akan berulang kembali, dan lagi. Begitu seterusnya.

Satu hal tampak jelas dalam universitas sebagai "pabrik", yakni ilmu pengetahuan dipandang sebagai barang jadi, dan kebenaran ilmiah dipandang sebagai sesuatu yang final. Proses eksplorasi, lebih-lebih refleksi, hampir-hampir tidak terjadi sama sekali. Yang terjadi hanyalah reproduksi. Dengan demikian maka *output* yang dihasilkan tak lebih dari barang lama yang dicetak ulang. Hanya, mungkin, merk barang cetakan ulang itu yang diganti biar kelihatan ada inovasi.

**Sebuah Penipuan**

Dari dua macam implikasi di atas, terlihat bahwa pada kasus pertama universitas benar-benar memenuhi "kodrat"-nya, yakni sebagai *Center of Excellences*. Sedangkan pada kasus kedua, universitas telah berjalan menyimpang dari "kodrat"-nya. *Center of Exceleces* hanyalah merupakan sebuah ilusi. Lebih parah lagi kalau itu terus-menerus didengung-dengungkan dengan bangganya, maka hal itu tak lebih sebuah penipuan. Dan jika penipuan itu dianggap sebagai kebenaran, maka ia berkembang menjadi mitos. Di dalam mitos inilah kesadaran dipalsukan, karena realitas dilihat secara terbalik.

Kalau dikaitkan dengan realitas sosial di luar, maka pada kasus pertama universitas akan benar-benar memainkan peran sebagai "jantung" perubahan-perubahan, bukan hanya secara lokal atau nasional, bahkan mungkin bisa mondial karena kebenaran ilmiah (cenderung) bersifat universal. Sedangkan pada kasus kedua, universitas tak lebih sebagai lembaga yang mengabsahkan realitas, dan mendukung kemapanan. Dengan kata lain, pada kasus pertama universitas berpretensi merubah realitas; sementara pada kasus kedua universitas berpretensi melestarikan realitas yang ada, tak peduli apakah realitas itu menindas atau tidak.

**Persepsi yang Salah**

Jelaslah kini bahwa kalau kita hendak berbicara tentang strategi, maka kita harus berangkat dari persepsi: persepsi tentang siapa dan apa mahasiswa itu sesungguhnya. Hal ini

Jika hendak berbicara tentang strategi pendidikan, maka harus berangkat dari persepsi: apa dan siapa mahasiswa itu sesungguhnya.

tak lain karena strategi hanyalah merupakan salah satu implikasi praktis atau kecenderungan dari persepsi. Dengan kata lain, strategi adalah akibat dari suatu persepsi dan sekaligus pemelihara persepsi itu sendiri.

Dari kecenderungan-kecenderungan yang diproyeksikan di atas, tampak jelas bahwa persepsi kedua adalah salah. Sebab, persepsi tersebut akan membawa kecenderungan yang mengakibatkan universitas menyimpang dari "kodrat"-nya. Oleh karena itu persepsi , tersebut harus dikoreksi secara total terlebih dahulu, sebelum kita menyentuh wilayah strategi. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan oleh Prof. Koesnadi benar-benar bersifat visioner.

Sekarang persoalannya adalah bagaimana persepsi yang salah itu hendak dikoreksi? Bukankah persepsi itu dalam kenyataan yang ada telah sedemikian mengakarnya?

Langkah awal, dan ini diharapkan yang paling efektif, harus dimulai dari mahasiswa sendiri. Ketika mahasiswa hendak menginjakkan kakinya ke kampus, maka dia harus berkata bahwa dirinya adalah intelektual muda. Ini bukan sebuah organisasi, melainkan untuk membangun kepercayaan diri. Tanpa kepercayaan diri, entah disadari atau tidak, dia mensubordinasikan dirinya di bawah bayang-bayang hegemoni sang profesor.

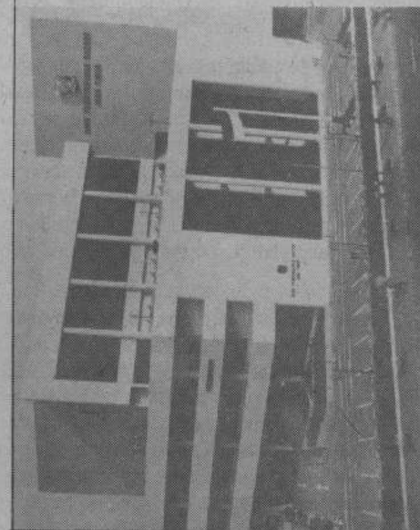
Kata-kata bahwa "saya adalah intelektual muda" tidak akan membangkitkan kepercayaan diri kalau "saya" tidak bersedia menanggung konsekuensi praktis dari kata-kata itu. Konsekuensi kata-kata itu adalah bahwa "saya harus terus-menerus merasa haus akan kebenaran". Implikasi praktisnya adalah bahwa "saya tak boleh berhenti mencari kebenaran". Oleh karena kebenaran ada di mana-mana, maka "saya tak boleh memandang sang profesor, yang paling hebat sekalipun, sebagai satu-satunya sumber kebenaran".

Dengan keyakinan semacam ini, maka "saya akan menolak setiap profesor yang hendak menjadi diktator (ilmu)". Kalau hal itu akan berakibat "fatal" bagi diri "saya", maka setidak-tidaknya "saya" tetap berkata bahwa "saya bukanlah bahan mentah".

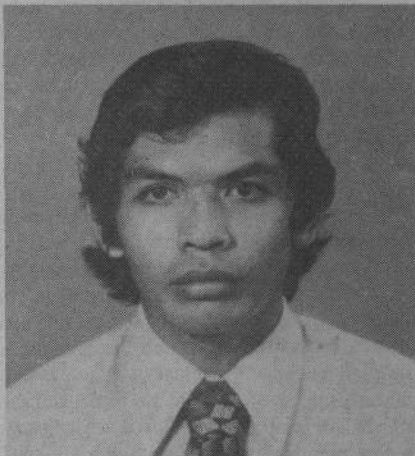
Universitas dengan "saya-saya" seperti di atas akan benar-benar memiliki nafas intelektualitas yang menghembuskan universitalitas.

Kalau kita kembali ke "bumi realitas", hal di atas tampak sebagai sebuah utopia. Memang. Tetapi perubahan sejarah biasanya bermula dari utopia.

P.T. ADHI KARYA ( PERSERO )
GENERAL ENGINEERING CONTRACTORS CABANG IV
JALAN GAYUNG KEBONSARI 167 A, SURABAYA TELP. 814010, 816710, 817710 TELEX. 33117 ADHI IA
KANTOR PUSAT :
JALAN RAYA PASAR MINGGU KM. 18 JAKARTA SELATAN - TELP. 7990965 (Hunting System) P.O. BOX 31/PSM TELEX : 47563 - ADHI IA
model No. 01



# KEMANDIRIAN MAHASISWA DALAM SISTEM KREDIT


ISTIMEWA

**ASMADI ALSA**
Dosen Fak. Psikologi UGM

Salah satu tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tercantum dalam Undang Undang RI No. 2/1989 pasal 9 adalah membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Ini berarti bahwa dalam proses pendidikan formal seseorang, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, terbawa pula misi untuk menumbuh-kembangkan kemandiriannya; yang dalam kenyataan praktisnya hal ini seringkali terbaikan. Sebenarnya peletak dasar kemandirian seseorang adalah pada lingkungan keluarga. Selanjutnya, sebelum anak menginjakkan kakinya di lingkungan Sekolah Dasar, ia terlebih dulu berkenalan dengan lingkungan bermain dan mungkin lingkungan Taman Kanak-Kanak. Oleh karena itu tugas mengembangkan kemandirian siswa, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, tidak dapat dilepaskan dari "wujud" kemandirian yang tumbuh dan dibawa individu dari lingkungan keluarga.

Pada masa remaja akhir dan masa dewasa awal (usia mahasiswa), berdasar teori psikologi perkembangan diharapkan individu sudah dapat mandiri. Tapi dalam kenyataannya pada mahasiswa Indonesia masih banyak diantara mereka yang tidak mempunyai rasa percaya diri, tidak yakin atas kemampuannya sendiri, banyak tergantung atau menggantungkan diri pada orang lain dan bahkan pada keberuntungan atau nasib baik. *Ngepek* sewaktu menempuh ujian, mencatat kuliah dari catat-an kuliah temannya, menerima kuliah tanpa berani bertanya dan berargumentasi, merupakan contoh-contoh manifestasi ketidakmandirian dan kurang rasa percaya diri mahasiswa. Mahasiswa adalah calon penerus pemimpin bangsa; sehingga sangat disayangkan apabila sikap tidak mandiri tersebut akan terbawa sampai mereka menjadi sarjana, terjun ke masyarakat, dan tentunya diharapkan oleh masyarakat untuk membawa kemajuan bagi bangsanya.

**Kemandirian**

Walaupun tidak sepenuhnya efektif bila diterapkan kepada usia mahasiswa, namun pola didik yang berbeda-beda yang diterapkan dosen terhadap mahasiswanya sedikit-banyak masih membawa dampak atas perilaku mahasiswa. Pola didik yang dimaksud secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pola didik yaitu otokratis, demokratis, dan permisif.

Pola didik otokratis adalah cara mendidik yang mengutamakan kepatuhan sebagai acuan perilaku. Pola didik ini mengabaikan komunikasi dan keakraban hubungan antara dosen dan mahasiswa, bahkan acapkali disertai dengan *punishment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang dididik dengan pola ini memiliki sifat-sifat: pasif, kurang spontan, kurang inisiatif, dan mudah putus asa.

Pola didik demokratis ialah cara mendidik yang mementingkan perlunya komunikasi timbal balik yang rasional serta hubungan yang akrab antara dosen mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang dididik dengan pola ini menunjukkan sifat-sifat: pemberani, berinisiatif, kreatif, spontan, tapi juga seringkali menunjukkan sifat tidak taat dan tak mau menyesuaikan diri.

Pola didik permisif adalah cara mendidik yang pada dasarnya memberikan kebebasan berperilaku dan berkehendak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang dididik dengan pola ini menunjukkan sifat-sifat: seringkali tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ditolak lingkungan sosial, dan tidak mampu merencanakan masa depannya.

Dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, ternyata kemandirian paling tinggi dimiliki individu yang dididik dengan pola demokratis. Hal ini dimungkinkan karena ciri-ciri pola didik demokratis paling memungkinkan bagi perkembangan sikap mandiri dan rasa percaya diri individu.

Bagaimana kaitannya antara pola didik dengan pelaksanaan sistem kredit? Secara eksplisit memang tidak tersebut bahwa sistem kredit menerapkan pola didik yang demokratis. Namun suasana yang ada, seperti pengambilan jumlah kredit sesuai dengan kemampuan dan kesempatan, adanya dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa, syarat presensi kuliah minimal 75 persen, dalam batas tertentu kelonggran-kelonggaran diberikan kepada mahasiswa untuk menetapkan jenis kegiatan studi yang dipilih, jumlah SKS yang diambil pada setiap semester, dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan, menunjukkan bahwa sistem kredit cenderung lebih bersuasana demokratis (daripada pola otokratis dan permisif), terutama dibandingkan dengan sistem lama (paket). Sistem lama memiliki ciri-ciri antara lain: presensi kuliah tidak dipersoalkan, dosen pembimbing akademik tidak ada, kurang satu matakuliah harus menunggu satu tahun, mahasiswa sukar mengadakan komunikasi dengan dosen, dan sebagainya.

Sistem kredit ialah sistem pendidikan yang memperhatikan adanya perbedaan individual antara mahasiswa yang satu dengan yang lain.

**Pengalaman Sukses**

Setiap orang mengharapkan untuk berhasil dalam setiap langkah dan perbuatannya, berusaha sebisa mungkin meraih sukses, dan akan bahagia bila mendapatkan kesuksesan tersebut. Kriteria kesuksesan dapat bersifat objektif, yaitu apabila setiap orang memberikan nilai yang sama atas suatu prestasi; tapi juga dapat bersifat subjektif, apabila nilai yang diberikan orang tidak sama atas suatu prestasi. Rasa sukses sifatnya individual dan subjektif. Suatu prestasi tertentu yang oleh seseorang sudah dipandang sebagai suatu kesuksesan, oleh orang lain mungkin belum dipandang kesuksesan, dan oleh orang yang lain lagi bahkan dipandang sebagai suatu kegagalan. Ini semua tergantung pada tingkat aspirasi masing-masing orang.

Untuk menyiasati agar individu merasa sukses atau berhasil, maka ia perlu diberi tugas sesuai dengan kemampuan, dan usahakan memiliki aspirasi yang realistis. Keberhasilan akan lebih dapat diraih apabila kemampuan yang dimiliki memadai untuk mengerjakan sesuatu dan pada orang yang beraspirasi realistis. Aspirasi realistis ialah keinginan yang didasarkan pada kemampuan dan kesempatan yang ada untuk meraihnya dengan sukses. Apakah aspek aspirasi ini terperhatikan dalam sistem kredit?

Sistem kredit ialah sistem pendidikan yang memperhatikan adanya perbedaan individual antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Perbedaan itu bukan hanya perbedaan dalam inteligensi, bakat dan minat, tapi juga perbedaan kesempatan dan waktu yang tersedia bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas belajar. Di sini mahasiswa dilatih untuk berfikir dan bertindak realistis dalam mengambil jumlah satuan kredit pada setiap semestan yang dimilikinya. Oleh karena itu kemungkinan untuk berhasil dalam studinya pada setiap semester akan lebih besar dibandingkan apabila pengambilan jumlah satuan kredit tidak didasarkan atas kemampuan, minat dan kesempatan yang ada.

Kemampuan, bakat dan minat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Unyil lebih sukses di bidang A karena ia memiliki bakat dan atau minat di bidang tersebut, sedangkan Usrok lebih sukses kalau ia menekuni bidang B. Sistem kredit sebagai suatu sistem pendidikan dapat menyalurkan bakat dan atau minat yang berbeda-beda, yakni dengan menyediakan matakuiah eklektik. Mahasiswa secara mandiri dapat mengambil matakuliah yang diminatinya, dan dengan bimbingan dosen menyesuaikan kemampuan dan bakatnya. Dengan demikian kemungkinan berhasil akan lebih besar dibanding apabila ia harus menempuh satu paket matakuliah, yaitu sejumlah matakuliah yang harus diambil dalam satu semester oleh setiap mahasiswa tanpa kecuali (dalam sistem lama).

Dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, ternyata kemandirian paling tinggi dimiliki individu yang dididik dengan pola demokratis.

Keberhasilan atau pengalaman sukses yang menyertai seseorang akan membahagiakan dan membanggakan dirinya. Pengalaman sukses tersebut akan menimbulkan terjadinya mobilisasi energi cadangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi untuk terus mencapai prestasi. Kumulasi keberhasilan yang dicapai seseorang akan menaikkan rasa percaya diri. Apabila orang sudah mempunyai rasa percaya diri, hal ini merupakan awal baik bagi sikap mandiri orang tersebut.

Pengalaman-pengalaman sukses atau kumulasi keberhasilan tersebut akan membentuk konsep diri (*selfconcepet*) yang positif pada seseorang. Ini berarti bahwa orang tersebut mengetahui dan menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan (membentuk *self-image*). Mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan maka *self-esteem* atau harga dirinya naik; ia menilai dirinya berharga. Keyakinan akan kemampuannya menebalkan rasa percaya dirinya sehingga kemandiriannya akan berkembang. Sebaliknya pengalaman gagal yang dialami seseorang akan menjadikan orang rendah diri, keyakinan dan kepercayana dirinya hilang, yang pada gilirannya akan menurunkan sikap mandiri yang mungkin pernah dimilikinya.

Dalam sistem kredit, beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit. Apabila perguruan tinggi menganut sistem semester, maka satuan kreditnya disebut satuan kredit semester (SKS). Satu SKS ialah kegiatan pendidikan selama tiga jam dalam seminggu, yang terbagi kedalam: a) 1 jam untuk kuliah, yaitu tatap muka secara terjadwal antara dosen dan mahasiswa, b) 1 jam kegiatan yang direncanakan oleh dosen, dan tidak terjadwal (mengerjakan PR, membuat paper, mereviu buku, dan sebagainya), c) 1 jam untuk kegiatan mandiri mahasiswa.

Butir a, b dan c di atas dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengembangkan/melatih kemandirian mahasiswa apabila direncanakan sejak awal oleh dosen. Untuk butir a) misalnya tatap muka tidak searah, tapi menarik mahasiswa untuk diskusi. Untuk butir b) misalnya dosen memberi tugas yang menuntut mahasiswa benar-benar harus mandiri untuk mengerjakannya. Untuk butir c) misalnya menunjukkan buku acuan diluar buku yang diwajibkan dan mengkaitkan/memasukkan materinya dalam soal-soal ujian.

**Penutup**

Sebenarnya banyak potensi yang terdapat dalam sistem kredit untuk dapat mengembangkan kemandirian mahasiswa. Tapi sayang, karena beberapa kendala, seringkali penerapan sistem kredit di Perguruan Tinggi belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekun. Misal: 1) posisi dosen Pembimbing Akademik belum berfungsi seperti yang diharapkan, 2) masih banyaknya matakuliah eklektik yang ada dalam kurikulum tapi tidak dijadwalkan, 3) belum dimungkinkannya mahasiswa pada suatu program studi tertentu mengambil matakuliah ekletik yang ada pada program studi yang lain (karena lain fakultas) 4) Belum tentu matakuliah eklektik yang diprogramkan mahasiswa pada suatu semester dapat terselenggara kuliahnya; hal ini mungkin disebabkan karena jumlah mahasiswa pengambil matakuliah tersebut dipandang terlalu sedikit, 5) dan sebagainya.

Sebenarnya banyak potensi yang terdapat dalam sistem kredit untuk dapat mengembangkan kemandirian mahasiswa. Tapi sayang, karena beberapa kendala, seringkali penerapannya belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

# MENUJU PERHIMPUNAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA

## Jalan Yang Berliku

Sarasehan Pers Mahasiswa se-Indonesia di Bandung gagal. Enoch Markum tidak mengizinkan. Beberapa pihak menyesalkan tindakan tersebut dan menganggapnya berlebihan. ''Kalau dihambat makin susah. Pers Mahasiswa tidak pernah berhenti.'' Kata Amir Effendi S.

Kegagalan Sarasehan Pers Mahasiswa Se-Indonesia (SPMI) di Bandung tanggal 8 – 10 Juli 1991 sebenarnya bukan hal yang baru. Alasan yang diajukan panitia penyelenggara juga cukup klasik: masalah perijinan. Tetapi bagaimana kegagalan SPMI ini telah mengundang perhatian dan reaksi banyak pihak. Baik dari kalangan mahasiswa sendiri, dari pihak perguruan tinggi, dari mantan aktivis IPMI, bahkan sampai ke DPR.

ISTIMEWA

Berawal dari Wanagama, Yogyakarta. Ketika itu diadakan Temu Aktivis Pers Mahasiswa (TAPM) Tingkat Nasional oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM) UGM, dari tanggal 6 – 9 Februari 1991. Tujuan TAPM ini adalah untuk mendinamisasikan kembali kehidupan pers mahasiswa, terjalinnya komunikasi dan kerjasama antar aktivis pers mahasiswa, dan merintis terbentuknya wadah pers mahasiswa tingkat nasional. Untuk itu diadakan acara ceramah dari dan dialog dengan pihak instansi terkait, yakni dari Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pembinaan Pers dan Grafika, Direktorat Jendral Sosial Politik dan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

TAPM yang dihadiri oleh lebih dari 40 utusan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia itu menghasilkan tiga keputusan penting. Yang pertama, kesepakatan tentang orientasi pers mahasiswa kearah profesionalisme dan fungsionalisme. Dengan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi (bukan dalam arti *profit oriented*) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja sehingga akan tercapai kelembagaan yang sehat dan pada sisi lain akan mendorong kemandirian. Sedangkan yang dimaksud fungsionalisme adalah terwujudnya keterpaduan antara fungsi mahasiswa sebagai intelektual muda dengan fungsi pers sebagai media informasi, edukasi, rekreasi, dan kontrol sosial.

Kedua, para peserta bersepakat tentang diperlukannya satu wadah bagi pers mahasiswa se-Indonesia. Segala permasalahan yang menyangkut pembentukan wadah tersebut akan dibicarakan pada pertemuan pers mahasiswa selanjutnya, yang dianggap sebagai prakonggres. Untuk itulah, maka forum telah menunjuk IKIP Bandung sebagai penyelenggara pertemuan berikutnya.

Disamping itu telah terpilih sebelas orang wakil delegasi yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Masing-masing adalah: **Zainul Aryadi** (IKIP Medan) mewakili wilayah Sumatra Bagian Utara, **Ariansyah** (Universitas Lampung) mewakili wilayah Sumatra Bagian Selatan, **Okky Satrio** (Universitas Moestopo Jakarta) mewakili wilayah DKI Jakarta, **Tugas Supriyanto** (IKIP Bandung) mewakili wilayah Jabar, **Adi Nugroho** (Universitas Diponegoro) mewakili wilayah Jateng, **Tri Suparyanto** (Universitas Taman Siswa Yogyakarta) mewakili wilayah DIY, **Heidar Affan Alkaff** (Universitas Brawijaya) mewakili wilayah Jatim, **I Gusti Putu Artha** (Universitas Udayana) mewakili wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Timor-Timur, **Alimun Hakim** (Universitas Lambung Mangkurat) mewakili wilayah Kalimantan, **Mulawarman** (Universitas Hasanudin) mewakili wilayah Sulawesi, dan **R.H. Siahanesia** (Universitas Patimura) mewakili wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Selanjutnya kesebelas wakil delegasi tersebut bertugas melaksanakan koordinasi antar daerah dan sekaligus bertindak sebagai *steering committee* (SC) untuk pertemuan selanjutnya.

Berdasarkan kesepakatan TAPM di Yogyakarta itulah, maka pada tanggal 8 – 10 Juli 1991 diadakan SPMI di IKIP Bandung. Undangan sudah tersebar ke berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan jadwal acara juga sudah disusun oleh panitia. Tetapi semuanya menjadi berantakan dengan datangnya surat dari Direktur Kemahasiswaan, Drs. Enoch Markum, nomor 457/D5.5/U/1991 tertanggal 1 Juli 1991, perihal permohonan rekomendasi.

Isi surat Enoch yang mengacaukan pihak panitia penyelenggara SPMI itu terdiri dari empat point. Pertama, bahwa berbagai kegiatan penerbitan kampus mahasiswa selama ini tidak menunjukkan kejelasan sasaran yang ingin dicapai; dan panitia tidak pernah memberikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat Kemahasiswaan. Kedua, berdasarkan pemantauan Direktorat Kemahasiswaan, ternyata kegiatan TAPM di Yogyakarta tidak menunjukkan citra forum akademik. Ketiga, Direktorat Kemahasiswaan telah memprogramkan Latihan Ketrampilan Penerbitan Mahasiswa pada bulan Januari 1991 di Universitas Lampung yang merupakan keputusan Rakernas Pembantu Rektor III 1991. Keempat, bahwa dengan kegiatan pada point ketiga tersebut, kegiatan sarasehan di IKIP Bandung telah tertampung.

Sehubungan dengan surat itu, maka pihak panitia segera mengirimkan telegram pembatalan kegiatan SPMI kepada semua perguruan tinggi yang telah diundang dengan alasan belum ada rekomendasi Dirmawa dan surat izin Direktur Intelpam Polri. Namun karena pemberitahuan pembatalan tersebut sangat mendadak, banyak peserta yang sudah terlanjur datang. Untuk tidak mengecewakan para peserta, pihak panitia, dalam hal ini Purek III dan Rektor IKIP Bandung mengizinkan acara sarasehan tetap dilaksanakan.

Sebenarnya bila kita teliti surat dari Dirmawa, tidak terdapat kalimat yang mengatakan tidak memberi rekomendasi, apalagi melarang. Kalaupun dari pihak Intelpam Polri belum mengeluarkan surat izin, seharusnya tidak dijadikan masalah. Karena sarasehan tersebut merupakan kegiatan akademis dan dilaksanakan di dalam kampus, sehingga pihak perguruan tinggi yang bersangkutan dapat menggunakan hak otonominya.

Apabila kata "tidak tertampung" yang termaktub dalam Surat Dirmawa di atas ditafsirkan sebagai tidak adanya rekomendasi, bahkan larangan, hal ini terasa berlebihan. Apalagi bila kita mencermati, pernyataan Enoch bahwa kegiatan sarasehan ini telah tertampung dalam kegiatan Latihan Ketrampilan Penerbitan Kampus Mahasiswa adalah tidak benar. Karena hakekat dan tujuan dari kedua kegiatan tersebut memang berbeda.

Purek III IKIP Bandung, **Drs. Karna Yudibrata**, mengatakan, "kalau Dikti menganggap kegiatan kali ini tidak usah dilaksanakan, karena akan ada pertemuan lainnya, sebenarnya kurang tepat." Ia juga berpendapat bahwa sebagai arena minat mahasiswa yang berkeinginan dalam kegiatan penerbitan, seharusnya mendapat dukungan penuh. "Ingat, dalam kacamata pendidik, apalagi kampus sebagai lembaga pendidikan, bila ditemui berbagai kesalahan mahasiswa kita mesti mengarahkannya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan minatnya, bukan memotongnya. Kalau mahasiswa melakukan kesalahan itu kan wajar, karena mereka sendiri sedang dalam proses belajar," turutnya.

Sementara itu Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM) UGM sebagai penyelenggara kegiatan TAPM menyesalkan pernyataan Enoch bahwa kegiatan tersebut tidak menunjukkan citra forum akademik. "Kriteria citra forum akademik itu yang bagaimana?," tanya **Didik Supriyanto,** Ketua Umum BPPM UGM. Pertanyaan senada juga dilontarkan oleh Rektor IKIP Bandung, **Drs. Abdul Kodir.** Lebih jauh dia berpendapat, "akademik atau tidak hendaknya dilihat dulu isi materi pertemuan atau kegiatan yang akan dilakukan. Tidak sebatas kesan saja."

Berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, dan karena para peserta yang datang sudah lebih dari seratus orang, maka Rektor IKIP Bandung tetap mengijinkan sarasehan dilaksanakan. Tentu saja dengan perubahan agenda acara. Inti acara hanya terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno. Sedang ceramah-ceramah yang rencananya akan diberikan oleh para pengamat dan praktisi pers dihapuskan.

Setelah dibuka oleh Ketua Unit Pers Mahasiswa (UPM) IKIP Bandung, dilanjutkan dengan penjelasan dan pengarahan oleh SC. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian sidang komisi. Semula terdiri dari dua komisi, yakni Komisi A yang membahas AD/ART dan Komisi B yang membahas Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK). Tetapi karena adanya usulan dari sebagian peserta, maka dibentuk komisi tambahan yang bertugas menyusun pernyataan sikap terhadap surat Dirmawa, yang kemudian disebut Komisi C atau Komisi Khusus.

Komisi B dan C dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tetapi dalam Komisi A pembahasan terhadap dua buah rancangan AD/ART yang masing-masing diajukan oleh delegasi Yogyakarta dan delegasi Malang cukup berlarut-larut. Sehingga sidang pleno yang rencananya dilaksanakan pada Senin malam, 8 Juli 1991, terpaksa harus ditunda sampai Komisi A menyelesaikan tugasnya, yakni Selasa, 9 Juli 1991 jam 11.00.

Ketika sidang pleno sedang dimulai, ada interupsi dari panitia bahwa acara ini harus

sudah berakhir pada pukul 13.00; setelah itu panitia tidak mau bertanggungjawab. Padahal pada waktu itu sudah pukul 12.00. Apa yang bisa dihasilkan oleh sidang pleno dalam waktu satu jam? Sedang para peserta masih memperdebatkan masalah tata tertib sidang dan pembacaan hasil komisi mana yang akan didahulukan. Pernyataan panitia tersebut jelas membuat kalut para peserta dan menambah ketegangan, sehingga forum sempat menjadi kacau.

Setelah melewati masa ketegangan, akhirnya dibacakan hasil Komisi C lebih dahulu. Selesai pembacaan hasil Komisi C waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Berarti waktu yang disediakan oleh panitia telah habis, dan sidang harus segera diakhiri. Padahal hasil rumusan Komisi A dan Komisi B belum sempat dibacakan, apalagi untuk pembahasannya. Forum memanas lagi, sampai akhirnya ketua sidang menyatakan sidang diskors sampai waktu yang tidak ditentukan (sampai pertemuan berikutnya?).

Kemudian forum diambilalih oleh panitia untuk acara penutupan. Banyak peserta yang tidak puas. Seorang peserta dari berdiri dan berkata," panitia ini bagaimana? Tidak bertanggungjawab, mengundang orang kemudian diusir. Saya menawarkan, kita pindah saja dari tempat ini. Di lapanganpun nggak masalah."

Demikianlah, kegiatan sarasehan ini ditutup dalam suasana kacau. Tetapi kemudian seorang peserta lain naik ke panggung dan mengajak semua peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya ikut menyanyi, dengan khidmat dan mengharukan. Sangat lain dengan suasana beberapa saat yang lalu ketika mereka bertengkar hanya soal tata tertib sidang. Saat ini terlihat adanya persatuan dan kebersamaan, bahkan banyak yang sempat meneteskan air mata.

Walaupun acara di IKIP Bandung sudah ditutup, sekitar 35 orang (dari 112 orang jumlah seluruh peserta) melanjutkan pembicaraan di Kebun Binatang Bandung sampai petang hari. Dari pertemuan yang disebut *"Bandung Informal Meeting"* ini diambil kesepakatan mengirimkan delegasi untuk berDialog dengan Enoch Markum. Untuk menjaga ketertiban dialog delegasi ini memilih 3 orang juru bicara, masing-masing adalah **Didik Supriyanto** (UGM), **Dedeng** (Universitas Tadulako), dan **Usman Hassan** (IKIP Jakarta). Anggota delegasi juga dilarang membawa poster.

Delegasi tersebut dapat bertemu Enoch Markum Rabu, 10 Juli 1991, tapi Enoch tidak bersedia mengadakan dialog dengan para mahasiswa. "Saya tidak punya jadwal bertemu dengan anda," katanya. Ketika didesak untuk memberikan waktu lain, ia juga menolak dengan segala alasannya. Sikap Enoch ini tentu disesalkan oleh para mahasiswa. Niat baik untuk berdialog, untuk mencari *problem solving* tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Salah seorang mahasiswa mengatakan, "Kami hanya ingin berdialog, tanpa poster tanpa demonstrasi. Dia kan Direktur Kemahasiswaan yang kami anggap sebagai bapaknya mahasiswa yang patut diajak bicara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa. Mengapa tidak mau? Malah bilang tidak punya urusan dengan mahasiswa."

Karena keinginan berdialog dengan Enoch tidak berhasil, delegasi mahasiswa tersebut pergi ke DPR-RI, Senayan, siang itu juga. Mereka diterima oleh Wakil Ketua FPP, **Drs. Yusuf Syakir.** Yusuf memuji kedatangan mahasiswa tanpa poster dan spanduk sebagai "jalan yang konstitusional." Setelah mendengarkan pengaduan mahasiswa, Yusuf mengatakan, "Kalau saya yang mengalaminya, saya akan lebih kecewa lagi." Selanjutnya ia juga menjanjikan akan membicarakan masalah ini dalam rapat kerja Komisi IX dengan Depdikbud pada masa sidang mendatang.

Menanggapi masalah ini, **Drs. Amir Effendi Siregar, M.A.**, staf pengajar FISIPOL-UGM yang juga mantan aktivis pers mahasiswa mengatakan, "Kegiatan untuk membikin wadah baru semacam IPMI itu harus didukung. Kalau dihambat makin susah, karena aktivitas pers mahasiswa tidak pernah akan berhenti. Seperti air, mengalir terus. Kalau tidak bisa sekarang, mungkin besok, atau lusa. Pokoknya mereka akan mencari terus".

Tidak hanya sampai di DPR. Dari Senayan – Jakarta, tiga orang anggota delegasi, masing-masing Didik Supriyanto, Dedeng dan Zainul Aryadi bertolak ke Lampung. Mereka berusaha meminta kesediaan pihak Universitas Lampung untuk menjadi tuan rumah pertemuan pers mahasiswa berikutnya, bersamaan dengan dilaksanakannya acara Latihan Ketrampilan Penerbitan Mahasiswa yang akan datang.

Dalam pembicaraan dengan Purek III Unila, para delegasi merasa lega karena Purek III Unila menyatakan bersedia mengabulkan permohonan para delegasi pers mahasiswa tersebut. Merekapun meninggalkan Lampung dengan penuh harap. Kesediaan Unila itu telah menambah semangat para aktivitas pers mahasiswa untuk memperjuangkan keinginannya.

Maka disusunlah hasil-hasil kesepakatan para aktivis pers mahasiswa se-Indonesia, baik dari pertemuan di Wanagama maupun di Bandung. Kemudian Didik Supriyanto dan Tri Suparyanto berusaha menemui Purek III IKIP Bandung untuk mendapatkan pengesahan hasil-hasil pertemuan Bandung. Tetapi tidak berhasil karena baru pergi ke Spanyol. Lalu mereka berusah menemui Purek III Unila, tetapi tidak berhasil juga. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa Purek III Unila berusaha menghindar.

Setelah gagal menemui Purek III IKIP Bandung dan Purek III Unila, Didik dan Tri berangkat ke Jakarta untuk menemui Direktur Kemahasiswaan. Sekali lagi ia menolak untuk ditemui.

Dengan kegagalan yang beruntun itu apakah usaha para aktivis pers mahasiswa untuk berhimpun menjadi mandeg? Ternyata tidak. Selain usaha untuk menembus tembok-tembok birokrasi yang terasa semakin angkuh, di daerah-daerah mereka juga berusaha mengkonsolidasikan dirinya. Hasilnya, di beberapa daerah telah terbentuk wadah-wadah penerbit mahasiswa tingkat wilayah. Di Malang ada Forum Komunikasi Penerbit Mahasiswa Malang, di Yogyakarta berdiri Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yogyakarta (PPMY), juga di Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara, Ujung Pandang, dan daerah-daerah lainnya.

Hambatan birokratis yang dihadapi para aktivis pers mahasiswa berkaitan erat dengan kecurigaan pemerintah terhadap kegiatan pers mahasiswa. Alasan kecurigaan itu karena pers mahasiswa dianggap sebagai "picu gerakan mahasiswa" dan "picu kesadaran politik mahasiswa."

Meskipun sebenarnya kecurigaan semacam itu berlebihan, karena kondisi kemahasiswaan sudah banyak mengalami perubahan. Orientasi pers mahasiswa sekarangpun juga sudah mengalami pergeseran seperti yang mereka rumuskan di Wanagama, Yogyakarta.

Namun demikian para aktivis pers mahasiswa tidak bisa mengesampingkan adanya kecurigaan semacam itu. Dan kegagalan sarasehan kali ini mestinya dapat lebih menyadarkan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi. Hambatan eksternal yang bersifat politis memang masih ada. Tetapi yang tidak kalah penting adalah masalah internal kita sendiri, mampukah kita menyamakan persepsi dan menyejajarkan langkah?

Sebab kegagalan sarasehan di Bandung ini tidak bisa kita tumpahkan seluruhnya kepada surat Direktur Kemahasiswaan. Ternyata kita sendiri juga ikut mengacaukan suasana. Karena menurut **Tugas Supriyanto,** Ketua Panitia SPMI, sebenarnya Rektor IKIP Bandung telah mengijinkan acara sarasehan dilaksanakan sampai selesai, dan panitiapun siap menjadi fasilitator. Tetapi karena ulah beberapa peserta yang mengacaukan jalannya sidang, terutama dengan dibentuknya Komisi Khusus, panitia menjadi sangat khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka panitia menginginkan sidang segera diakhiri, dan acara segera ditutup.

Kegagalan sarasehan ini seharusnya bisa membuat kita menjadi lebih arif, dan tidak hanya mengandalkan emosi. Para aktivis pers mahasiswa memang masih perlu mengkonsolidasikan diri. Bila masih ingin membentuk jaringan komunikasi, dan berhimpun dalam sebuah organisasi.

**Wahyudi Marhaen**

Banyak mahasiswa yang khawatir kalau KKN ditiadakan berkenaan dengan pelaksanaan pemilu 1992 yang akan datang. Hal itu tentu akan merugikan mereka. Tetapi bagaimana permasalahan sebenarnya?

# KKN PADA MASA PEMILU TETAP DILAKSANAKAN

"Mahasiswa tidak perlu resah. Meskipun pada tahun ajaran 1991/1992 ini kita melewati masa pemilu, KKN tetap akan dilaksanakan." Demikian pernyataan drg. Masykur Rahmat, Kepala Bidang Operasional KKN-UGM menanggapi keresahan di kalangan mahasiswa.

Keresahan tentang larangan KKN pada masa pemilu tersebut cukup beralasan. Karena dengan ditiadakannya KKN pada masa pemilu jelas akan mengganggu persoalan akademis mahasiswa. Mereka yang seharusnya dapat melaksanakan KKN pada semester yang bersangkutan, harus menunda sampai semester berikutnya.

Berita yang menyatakan bahwa KKN pada masa pemilu ditiadakan sudah tersebar luas di kalangan mahasiswa UGM. Kenyataan ini terlihat dari *polling* yang disebarkan oleh Senat Mahasiswa (SM) UGM. Dari 278 sampel yang masuk dari seluruh fakultas di lingkungan UGM, 264 mahasiswa (atau sekitar 94%) menyatakan menerima berita bahwa KKN akan ditiadakan pada masa pelaksanaan pemilu 1992. Baik dari sesama mahasiswa, dari pihak universitas, dari pihak Depdikbud maupun sumber lain. Sedangkan jumlah sampel selebihnya abstain.

Dengan pernyataan Masykur di atas, kekhawatiran tentang ditiadakannya KKN pada masa pemilu mestinya tidak ada lagi. Dari pihak Direktorat Sosial Politik DIY juga menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada ketentuan yang melarang kegiatan KKN berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 1992. Kepala Ditsospol DIY, Sugeng W, mengatakan, "pemilu mestinya tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan lainnya. Kalau sampai mengganggu, rasanya bertentangan dengan makna pemilu itu sendiri. Maka semestinya tidak ada larangan untuk kegiatan-kegiatan yang lain." Lebih jauh dia menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu yang lalu, larangan hanya berlaku pada saat minggu tenang. Larangan ini berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. "Dan itupun hanya selama lima hari menjelang hari H," tegasnya.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh Kaditsospol propinsi Jawa Tengah. Surat Bupati Magelang kepada Rektor UGM menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Kaditsospol propinsi Jawa Tengah nomor: 270/1041, tanggal 4 Pebruari 1991, diberitahukan bahwa kegiatan KKN dan kegiatan lain apapun yang secara langsung/tidak langsung berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu, tetap dapat dilaksanakan, dengan catatan bilamana dianggap perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam kaitannya dengan pengamanan jalannya pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Mendagri/Ketua Lembaga Pemilu nomor: 15 tahun 1988, tentang Program Kerja dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu 1992, selama tahun 1991 pelaksanaan KKN tetap dapat dilakukan. Tetapi disarankan dalam pembuatan jadwal KKN, seyogyanya untuk tahun 1992 dipro-

Dok. Humas UGM




**Kuliah Kerja Nyata**

***Pemilu jangan sampai mengganggu***

gramkan selesai pada akhir Maret 1992 dan dapat dilanjutkan lagi setelah selesai pemilu 1992.

Untuk mengantisipasi kebijaksanaan Kaditsospol di atas, pihak Universitas melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM telah mengambil langkah-langkah penyesuaian. Dalam hal ini, pada tahun ajaran 1991/1992 KKN tetap diadakan dua kali, masing-masing sekali untuk semester satu dan sekali untuk semester dua. Tetapi ada perubahan jadwal dengan dimajukan. Pada semester I operasional KKN dimulai tanggal 5 Oktober sampai 7 Desember 1991, sedangkan untuk semester II dimulai tanggal 4 Pebruari sampai 4 Maret 1992. ''Penarikan terakhir mahasiswa dari Lokasi KKN harus sudah selesai tanggal 4 Maret 1992,'' kata Masykur.

Sesuai dengan amanat Rektor, Masykur menegaskan, ''kebijaksanaan tentang KKN jangan sampai merugikan mahasiswa.'' Hal semacam ini memang perlu dikemukakan karena ketika menghadapi pemilu 1987, pelaksanaan KKN ditiadakan satu semester. Kebijaksanaan semacam ini tidak hanya merugikan mahasiswa, tetapi juga merepotkan pihak pelaksana. Pada waktu itu peserta KKN membengkak 2 kali lipat hingga mencapai 4000 orang lebih. Penghapusan KKN satu semester tersebut terjadi karena ketika itu terdapat larangan yang menyatakan bahwa 2 bulan sebelum dan sesudah hari H pemilu 1987, tidak boleh dilaksanakan program KKN. Tetapi dengan adanya pernyataan dari Kabid Operasional KKN-UGM serta pernyataan Kaditsospol DIY dan Jawa Tengah di atas, kebijaksanaan untuk meniadakan KKN menjelang pemilu 1992 nanti, tidak akan terjadi lagi.

Tidak adanya larangan KKN, dan juga kegiatan-kegiatan lain, dimungkinkan dengan adanya stabilitas yang cukup mantap. Disamping itu, menurut Sugeng, masyarakat desa sudah cukup dewasa untuk berpolitik. Dengan kondisi sekarang ini, adanya suasana keterbukaan, masyarakat desa sudah siap untuk melakukan segala tindakan politik. Tentunya politik yang benar, dalam pengertian bagaimana mengarahkan seseorang untuk benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sugeng juga menyatakan tidak ada kekhawatiran kalau KKN akan mempolitisir masyarakat. Pemerintah juga tidak ada kecurigaan bila mahasiswa dipolitisir, karena semuanya sudah ada aturannya. Kaditsospol DIY ini percaya kalau para mahasiswa tentu mengetahui tujuan utama KKN dan mengharapkan agar mereka betul-betul menekuni tujuan KKN itu sendiri, bukan tujuan sampingannya. ''Jangan ber-KKN kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang lain sifatnya; itu tidak benar. Kalau mau melakukan kegiatan politik ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Pemerintah tidak khawatir karena pemerintah sudah menyediakan mekanismenya. Tapi kalau KKN digunakan untuk kegiatan lain, tentu saja kita akan memberikan semacam informasi dan kemudian juga hal-hal yang sifatnya mungkin ke pembinaan. Kita tidak melarang seseorang berbicara masalah politik-pemilu, tetapi ada mekanismenya. Kalau saudara mau melakukan kegiatan politik, kampanye jangan membawa atribut KKN; bawalah atribut dan mekanisme yang lain.''

Sementara itu Dr. Ichlasul Amal, Dekan Fisipol UGM, ketika dimintai pendapatnya juga sepakat bila pemilu jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Pemilu merupakan sesuatu yang rutin, dan tidak perlu dijadikan seperti hari yang sakral; pemilu merupakan bagian dari sosialisasi politik, bagian dari proses pengambilan keputusan. Amal melihat bahwa orang-orang memandang pemilu dari segi ritualnya saja, bukan substansinya. ''Memang pemilu itu ada elemen ritusnya, tetapi jangan diperbesar melebihi substansinya,'' katanya.

Menanggapi surat Kaditsospol Jawa Tengah yang menganjurkan agar diambil langkah pengamanan pemilu berkaitan dengan pelaksanaan KKN, Amal berpendapat bahwa kekhawatiran terhadap mahasiswa itu berlebih-lebihan. Mahasiswa tidak begitu saja mudah mempengaruhi orang desa. Di jaman keterbukaan ini sumber informasi banyak sekali, dan kita tidak bisa selalu beranggapan bahwa orang desa itu bodoh sehingga akan menerima begitu saja apa yang dikemukakan mahasiswa. Dan kita berkali-kali bilang bahwa kita sudah stabil, ''mengapa masih begitu takut, apa yang mau diamankan?,'' tanyanya berbalik.

Dari pihak mahasiswa sendiri, berdasarkan *polling* SM-UGM, dari 278 sampel yang masuk, 199 responden (71,58%) berpendapat agar pemilu dapat dilakukan di lokasi KKN. Yang tidak setuju sebanyak 36 responden (12,95%) dan 43 responden (15,47%) tidak berpendapat/abstain. Keinginan mahasiswa untuk melaksanakan pemilu di lokasi KKN ini mungkin dapat bermanfaat bagi keberhasilan pemilu. Mahasiswa dapat memberi penerangan tentang pemilu di lokasi KKN, meskipun hal ini tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pemihakan terhadap salah satu OPP.

Menanggapi kemungkinan mahasiswa KKN memberi penerangan tentang pemilu, Masykur menyatakan bahwa LPM-UGM belum berpikir ke arah itu. Selama ini, program KKN memang tidak pernah melakukan kegiatan politik. Misi KKN adalah untuk menjadi motivator, dinamisator, dan mencari *problem solving* bagi permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat desa yang bersangkutan. ''Karena itu kegiatan atau program KKN harus netral, dan nonpolitis,'' kata Masykur.

Sedangkan Inchlasul Amal menilai baik apabila mahasiswa dapat memberi penerangan tentang pemilu di lokasi KKN. Lebih lanjut Amal mengatakan, ''kalau bisa dimanfaatkan untuk memberi penerangan dengan dibekali tentang betapa pentingnya pemilu, itu malah bagus. Itu bagian dari sosialisasi politik yang baik bagi orang desa maupun bagi mahasiswa sendiri. Tentu saja mereka jangan diberi bekal untuk memilih OPP tertentu. Tetapi diberi bekal untuk memberi penerangan tentang arti pentingnya pemilu. Sehingga orang desa dalam memilih itu juga atas dasar kesadaran, bukan atas dasar ketakutan.''

**Wahyudi Marhaen Rifai, Ridwan.**

# MEMBACA BUTUH KETERAMPILAN

**Dalam era peledakan informasi ini membaca menjadi begitu penting. Kemampuan membaca perlu ditingkatkan dan dilatih. Namun, usaha peningkatan dan penelitian tentang itu masih sedikit.**


RADITYA DJATI

Konon Theodore Roosevelt membaca tiga buku dalam sehari selama di Gedung Putih. John F. Kennedy mempunyai kemampuan membaca dengan kecepatan 1.000 kata per menit. Jimmy Carter dan Indira Gandhi juga mengakui kemampuan membaca cepat mereka berpengaruh bagi kesuksesan karier. Dalam era peledakan informasi seperti sekarang ini, membaca telah menjadi bagian penting dalam hidup. Bahkan di Amerika telah berkembang kursus-kursus *speed reading* (membaca cepat) seperti *Reading Clinic* di Dartmount College, di University of Florida, Purdue University, New York University.

Meski membaca merupakan kegiatan yang terlampau biasa kejadiannya, namun ia bukan suatu proses yang alamiah. Kemampuan dan kebiasaan membaca seseorang harus dipelajari dan dilatih. Periode awal pelajaran

membaca berkaitan dengan membaca efektif. Tentu saja kemampuan membaca ini sangat erat kaitannya dengan proses belajar.

Hal itulah yang mendorong **dr. Razi Soangkupon Siregar** melakukan penelitian kemampuan membaca dalam tesisnya yang berjudul *Rekaman Gerakan Mata Untuk Menilai Kemampuan Membaca pada Mahasiswa* yang telah dipertahankannya didepan Dewan Penguji dari Fak. Pasca Sarjana UGM tahun 1984. "Dengan kondisi-kondisi yang dikontrol dengan baik, maka gerakan mata mungkin merupakan hal yang paling tepat dan paling ilmiah dari semua teknik diagnosa di bidang membaca." tulis dr. Razi dalam penelitiannya.

Perekaman gerakan mata memang memerlukan peralatan yang cukup canggih. Disamping itu analisanya harus dilakukan oleh seorang yang terlatih. Alat yang sering digunakan untuk merekam mata seperti *Multi Channel Recordes,* masih terasa sangat mahal untuk Indonesia. Tapi dengan memahami prinsip kerjanya, dapat digunakan peralatan lain yang lebih murah dan diketahui spesifikasinya.

Untuk itu, **dr. Abyono Soepono,** Kepala Lab. Ilmu Faal Fak. Kedokteran UGM telah memodifikasi *EKG (elektrocardiograf),* alat yang biasa digunakan untuk merekam kerja jantung, menjadi alat yang dapat merekam gerakan mata. Caranya dengan menambah prepengganda (preamplifier) yang sesuai pada EKG. "Alat ini telah diuji coba dan dapat digunakan untuk merekam gerakan mata," kata dr. Abyono yang juga merupakan pembimbing utama dr. Razi dalam penelitian ini.

Alat inilah yang digunakan dr. Razi terhadap 30 orang mahasiswa Fak. Kedokteran UGM semester III dan V. Mekanisme penggunaan EKG prepengganda ini cukup sederhana dengan cara menempelkan elektroda lempeng dengan bahan dari campuran perak kepada kedua pelipis dan pada dahi. Alat ini kemudian merekam gerakan mata yang muncul dalam bentuk grafik, sewaktu membaca.

Ketiga elektroda lempeng ini dihubungkan dengan prepengganda yang diatur dengan penggandaan 100× pada batas frekuensi terendah 0,16 Hz dan batas frekuensi tertinggi 50 Hz. Kemudian prepengganda dihubungkan pada EKG yang mempunyai kecepatan 25 mm per detik pada kepekaan 1 mV. Sistem alat rekam harus cukup sensitif untuk mendeteksi suatu perubahan gerakan mata yang menghasilkan perubahan voltase dari 5 uV sampai 500 uV. Gerakan mata horisontal hanya akan menghasilkan perubahan voltase sebesar 20 uV. Kemudian alat perekam juga harus dapat memantau kecepatan sampai frekuensi 30 Hz, yang merupakan gerakan mata tercepat yang dapat dicatat.

Selama perekaman berlangsung, kepala difiksasi agar tidak bergerak-gerak. "Gerakan kepala dapat berpengaruh pada potensial tetap yang ada pada mata, sehingga berpengaruh terhadap hasil rekaman," jelas dr. Razi. Disamping gerakan kepala, perlu diperhatikan pula elektroda lempeng yang menempel harus sempurna melekat pada kulit.

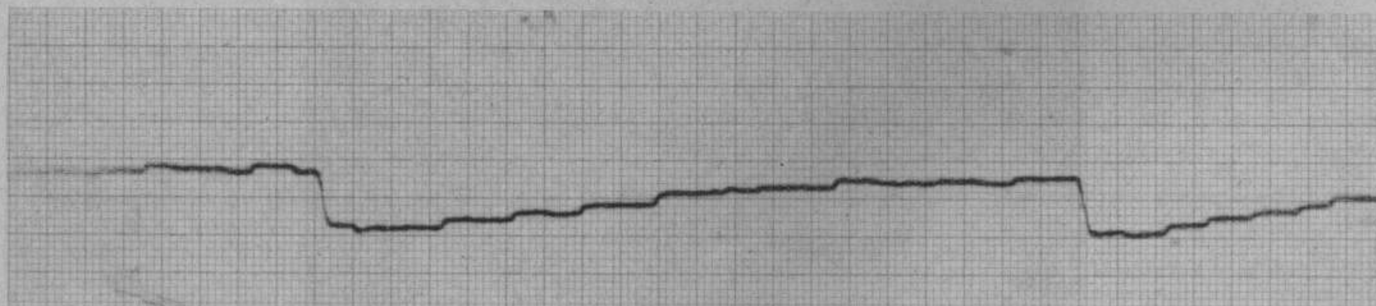
Dr. Razi menggunakan tiga macam teks bacaan untuk dibaca oleh para mahasiswa. Teks I dari buku cerita anak-anak, teks II dari buku ilmiah populer tentang kesehatan, dan teks III dari buku ilmiah populer tentang filsafat. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Teks-teks tersebut dipilih dengan alasan perbedaan dalam kesukaran kata-kata dan pemahaman. Dari perbedaan teks tersebut, diharapkan akan ada perbedaan yang bermakna dari hasil rekamannya. Setelah semua proses perekaman gerakan mata selesai, diberikan pertanyaan tentang isi teks bacaan. Menurut dr. Razi, pertanyaan-pertanyaan tersebut --yang jawabannya tertulis-- dimaksudkan agar mahasiswa tersebut benar-benar membaca dan juga sebagai pembanding pengukuran kemampuannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan M.E. Broom dalam tesisnya *Effective Reading Intruction* 1932, dr. Razi menganalisa hasil perekaman gerakan mata 30 mahasiswa tersebut. Pada waktu membaca, mata bergerak sepanjang baris dengan gerakan yang tidak konti-



**Grafik teks bacaan bhs. Inggris**

Terjadi gelombang-gelombang pendek



**Grafik teks bacaan bhs. Perancis**

Pembaca berusaha memahami bacaan

nu, tetapi berhenti sebentar kemudian bergerak lagi, yang juga disebut *stop and go movement*. Lebih tepatnya mata bergerak *sakadik* (menghentak) untuk setiap baris. Pada waktu bergerak mata tidak melihat dengan jelas karena gerakan terlalu cepat. Hanya pada waktu mata berhenti itulah didapat bayangan yang jelas. Inilah yang disebut fiksasi mata.

Lamanya fiksasi menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengenal lambang yang ada, mengerti artinya dan membuat asosiasi tertentu sebelum beralih pada tulisan berikutnya. Sehingga bisa dipahami jika kecepatan membaca seseorang sangat tergantung dari jumlah dan lamanya fiksasi. Ada beberapa keadaan lain yang terjadi dalam membaca selain fiksasi mata yakni interfiksasi, gerak mata kembali (*regressive movement*), dan ayunan kembali (*return sweep*).

Gerakan mata diantara fiksasi disebut interfiksasi atau gerakan sakadik. Sedangkan gerakan mata kembali digunakan untuk memperbaiki kesalahan membaca. Sementara ayunan kembali adalah gerak mata pada waktu fiksasi terakhir di ujung kanan baris menuju baris berikutnya. Rekaman gerakan mata seorang mahasiswa akan tercatat pada grafik. Gerak bola mata ke kanan dicatat ke atas sedangkan yang ke kiri ke bawah. Makin ke kanan pencatatannya makin ke atas. Apabila bola mata berhenti (fiksasi) maka akan tercatat sebagai garis yang horizontal.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang menguasai bahasa Inggris tetapi tidak menguasai *bhs. Perancis* direkam gerakan matanya oleh dr. Abyono ketika membaca teks bacaan dengan kedua bahasa tersebut. Terlihat pada grafik bahasa Inggris terjadi gelombang-gelombang pendek yang sebenarnya menggambarkan gerakan mata yang cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Satu gelombang menggambarkan satu baris. Hal ini menyatakan pemahaman yang cepat terhadap bacaan. Bandingkan dengan grafik *bhs. Perancis* dengan gelombang-gelombang panjang menandakan pembaca berusaha memahami teks bacaan.

Dari hasil rekaman gerakan mata 30 mahasiswa, dr. Razi mencatat bahwa ternyata perbedaan bermakna antara ketiga teks itu hanya pada waktu fiksasi total dan kecepatan membaca. Waktu fiksasi total yang dibutuhkan untuk membaca teks III lebih lama daripada untuk membaca teks II, dan waktu yang dibutuhkan untuk membaca teks II lebih lama daripada membaca teks I. Dalam hal kecepatan membaca tercatat untuk membaca teks III lebih lambat daripada untuk membaca teks II, dan waktu untuk membaca teks II ini lebih lama daripada membaca teks I. Dr. Razi memaparkan bahwa kemampuan membaca seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang merupakan unsur pokok membaca. Yaitu faktor penalaran, faktor kata, faktor intepretasi bahasa dan faktor penalaran.

Namun dalam hasil uji dengan menjawab pertanyaan tentang isi teks bacaan secara tertulis, dr. Razi mendapatkan korelasi yang rendah, kecuali pada korelasi antara rata-rata jumlah refiksasi tiap baris dengan skor jawaban teks III yang tinggi. "Hasil ini sangat berbeda dengan yang diharapkan. Kemungkinan hasil ini disebabkan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja, atau cara membaca, efisiensi penglihatan dan kemampuan melihat lambang cetak. Mungkin juga karena mahasiswa yang diteliti kurang memperhatikan dengan baik pertanyaan yang diberi," jelas dr. Razi.

Dr. Razi mengakui penelitian ini memang tidak banyak memberi hasil. Perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam. "Tetapi setidak-tidaknya sudah memberikan sedikit gambaran mengenai gerakan mata waktu membaca dan teknik perekamannya," tuturnya. Penelitian mengenai gerakan mata waktu membaca memang hampir belum pernah dilakukan di Indonesia, atau kalaupun ada mungkin tidak pernah dipublikasikan. Apakah itu mencerminkan belum membudayanya membaca dalam masyarakat? Apabila benar, dalam era globalisasi ini --apalagi menjelang era tinggal landas-- kondisi tersebut amat memprihatinkan.

**Islami Rusdianawati**


Segenap Pengurus

Majalah BALAIRUNG UGM

Mengucapkan Selamat

atas Pernikahan

**Drs. Ana Nadhya Abrar**

*Mantan Pemimpin Redaksi BALAIRUNG*

*dengan*

**Vira Vidya**

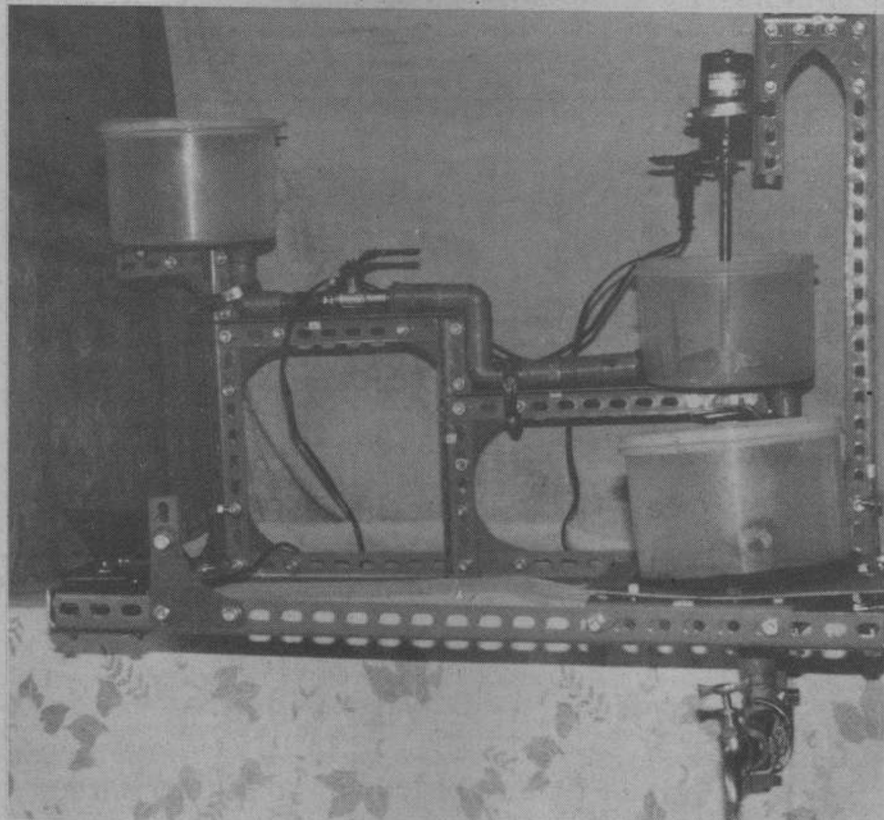
Selamat Menempuh Hidup Baru

Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah SWT.

Amin.

Karya inovatif enam mahasiswa UGM: usaha peningkatan kualitas limbah cair udang dengan memanfaatkan *chitosan*. Alat penjernih limbah kreasi mereka sederhana, murah dan efektif. Dapat digunakan industri kecil dipedesaan.

# CHITOSAN: PRIMADONA PENANGKAL LIMBAH



ISTIMEWA

**Penjernih Limbah**

*Sederhana, murah dan efektif*

Penduduk sekitar PT Cejamp di Semarang mungkin pernah bersungut-sungut di belakang. Lingkungan tempat tinggal mereka berbau. Bau yang tidak bersahabat dengan hidung ini berasal dari limbah pabrik pengolahan udang tersebut. Sepertinya keluhan mereka didengar oleh beberapa orang mahasiswa Teknologi Pertanian: **Andreas Sri Widodo, Listyati Purnama Rusdiana, Setyo Hastuti, Satrio Gentur Pinandito, Indah Eprilliati, Asep Iman Sujudi** yang akhirnya mengangkat masalah *usaha peningkatan kualitas limbah cair udang dengan memanfaatkan chitosan dari kulit udang*. Buah karya mereka telah memenangkan Lomba Karya Inovatif Produktif Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 1990/1991 di Lampung sebagai Juara II.

Udang merupakan primadona kedua ekspor non-migas sektor pertanian. Dirjen Perikanan mencatat angka ekspor udang beku pada tahun 1990 mencapai 75.000 ton. Pasti jumlah ini akan terus meningkat. Pasti pula, limbah padat dan limbah cair dari proses pengolahan udangpun akan ikut melonjak. Kunjungan kerja mereka ke pabrik yang sama mengungkap bahwa angka limbah cair mencapai kurang lebih $100m^3$ dan limbah padat mencapai 1,4 sampai 2 ton per hari. Diketahui, bagian kepala dan ekor udang tidak ikut diolah menyebabkan bagian yang tersisa setelah proses pengolahan mencapai prosentase 77 – 85% dari total bahan semula. Angka ini terdefinisi 45% merupakan bagian kepala dan sisa terdiri atas kulit dan padatan yang terlarut dalam limbah cairnya. (lihat box) Limbah cair tersebut masih mengandung 29.000mg/l padatan total dan 185 mg/l nitrogen total,

Sementara itu, limbah padat udang yang terdiri dari kepala dan ekor tersebut dimanfaatkan dalam industri pembuatan petis. Sayangnya kulit udang belum ada yang memanfaatkan. Hanya dibuang pada bak penampungan tertutup dan menimbulkan bau yang mengganggu. Kulit udang terdiri dari bermacam-macam senyawa dengan prosentase terbesar adalah protein, kalsium dan khitin yang masing-masing mencapai 34,9%; 27,6% dan 18,1%. "Protein yang berdegenarasi inilah yang menyebabkan bau tersebut," tutur Hastuti. Chitin yang dikandung kulit udang tersebut dapat diolah menjadi chitosan untuk menghilangkan bau yang tak nyaman itu alias menetralkan dampak indrawi protein terdegenarasi yang terdapat dalam limbah cair.

"Kulit udang dapat diolah menjadi chitosan yang merupakan salah satu polimer kationik (berion positif). Hampir semua binatang berkulit keras (Crustaceae) mengandung chitosan," papar **Ir. Umar Santoso, M.Sc.** dosen pembimbing mereka. Chitosan merupakan turunan chitin. Yang pertama adalah chitin yang telah dihilangkan gugus asetilnya secara artifisial dengan penggunaan basa pekat NaOH dan disebut sebagai poliglukosamin. Yang terakhir adalah biopolimer kedua terbanyak di alam setelah selulosa, secara kimiawi ia lebih dikenal sebagai poliasetil-glukosamin. Perlakuan secara artifiasial dengan menghilangkan gugus asetil yang bermuatan negatif akan menghasilkan chitosan bermuatan positif. Sifat ini akan memberikan fungsi sebagai agensia penggumpal protein dalam limbah berprotein yang antara lain adalah limbah cair udang.

Chitosan dibuat dari kulit udang dengan pemberian perlakuan pengecilan ukuran sehingga berbentuk tepung kulit udang. Tepung kulit udang tersebut seterusnya dilakukan deproteinasi dengan NaOH 4% (1:10) selama 2,5 jam pada suhu 100°C. Deproteinasi ini dimaksudkan untuk mengubah konformasi rantai polipeptida karena protein merupakan peptida yang tersusun banyak (poli). Perubahan konformasi rantai ini umumnya menyebabkan protein yang terdeproteinasi kurang larut dalam air dan mengendap. Tentunya memudahkan pemisahan. Setelah itu, sampai pada tahap demineralisasi dengan HCl 8% (1:15) selama 2 jam pada suhu kamar. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kelebihan Na mineral yang berasal dari NaOH dan mengikat kalsium yang merupakan salah satu senyawa pada kulit udang. Kedua proses ini menghasilkan isolat chitin. Tepung chitin yang didapat diasetilasi dengan NaOH 40% (1:10) selama 0,5 jam pada suhu 40 C. Terakhir adalah tahap pencucian, penyaringan dan pengeringan sehingga diperoleh tepung chitosan." Bagaimana kami mengetahui itu tepung chitosan?" umpan mereka. "Uji positif terbentuknya chitosan adalah dengan terdapatnya koloid setelah dilakukan penambahan asam asetat 2%", ujar Hastuti.

Pengolahan limbah udang pada prinsipnya merupakan pemisahan protein yang berupa zat-zat tersuspensi dalam air limbah yang tak larut. Pengolahan mengenal dua proses yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. "Alat pengolah limbah merupakan penerapan dari proses mekanik yang terdiri atas dua tahap yaitu tahap pencampuran dan pengadukan serta tahap pengendapan," cerita Andreas yang mengkreasi alat penjernih limbah yang sempat memukau dewan juri lomba karena kesederhanaannya. Proses pencampuran dan pengadukan bertujuan mempercepat dan meratakan pencampuran limbah cair udang dengan larutan chitosan. Maksud pengadukan untuk mempercepat reaksi kimia sehingga protein lebih cepat terendapkan.

Telah diketahui bahwa chitosan tidak larut dalam air dan ia merupakan polimer kationik yang bermuatan positif. Protein yang terdiri dari rangkaian asam-asam amino yang mempunyai gugus karboksil bebas yang merupakan anion dan bermuatan negatif. Muatan-muatan ini saling menarik, sehingga chitosan dapat menyerap zat pengotor limbah industri seperti protein. Menjejaki tahap pengadukan diperlukan suatu kecepatan pengadukan yang ajeg dan optimal sehingga diperoleh pengendapan protein yang maksimal. "Rotasi per menit (rpm) pengadukan dengan kipas berputar yang digerakkan dengan motor listrik berdaya watt kami variasikan antara 1750, 2500 dan 3500," lanjut Andre.

Namun, berdasarkan pada perbedaan rpm dan konsentrasi chitosan optimal yang diperlukan tidak ada beda nyata sehingga diputuskan memakai daya terkecil untuk menghemat biaya penelitian. Putaran kipas yang ditempatkan didalam cairan menyebabkan homogenisasi campuran limbah cair udang dengan chitosan. Pengadukan membutuhkan waktu karenanya diperlukan kran pembuka dan




ISTIMEWA

**Juara II LKIP Tk. Nasional 1990/1991**

Enam mahasiswa TP beserta karya mereka

penutup aliran cairan dimaksudkan agar limbah cair yang telah teraduk homogen tidak tercampur dengan limbah asli. Proses ini mengalir lancar antara penampungan-pengadukan-pengendapan dengan adanya beda elevasi dan adanya gaya gravitasi sesuai dengan penempatan bak-bak tersebut seperti pada gambar.

Pengendapan protein terkoagulasi agar terpisah dari air pelarutnya dipisahkan dengan jalan membuka kran bak pengendapan bagian bawah. Akibat tekanan air yang berada diatasnya, endapan protein yang lebih berat akan keluar lebih dulu disusul air pelarutnya. Endapan protein ini dapat diproses lebih lanjut lagi. "Protein sisa ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak," ujar **Satrio G. Pinandito** yang lebih akrab dipanggil Pipin. Ini rupanya mendapatkan anggukan kepala dari Ir. Umar Santoso, M.Sc. yang pernah meneliti permasalahan chitin dan turunannya di Jepang. Limbah cair udang tersebut yang telah terbebas dari kotoran yang membahayakan seperti protein, zat-zat warna, unsur-unsur alkali dan logam berat dapat dialirkan kembali dan tidak membahayakan lingkungan.

"Chitin dan chitosan memang banyak kegunaannya. Selain sebagai flokulan seperti di dalam penelitian ini, ia juga dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil dan telah dihasilkan serat sintesis dari chitin. Selain itu juga berguna sebagai fungisida karena mempunyai daya antimikroba, berguna dalam pengobatan radang usus dan dalam industri kosmetika sebagai komponen shampoo dan lotion," papar Ir. Umar dengan panjang. Menurut Andre penelitian mereka sangat inovatif ditinjau dari segi kesederhanaan pembuatan alat penjernih limbah yang diolahnya. Alat penjernih tersebut hanya memerlukan 3 buah bak dari plastik, sekian banyak logam besi panjang, sekian pipa plastik, dua buah kran dan sebuah dinamo untuk daya penggerak motor. "Industri kecil di pedesaan seperti pembuatan tahu dan tempe pun dapat menggunakannya. Murah, mudah dan manjur", sela Andre yang juga salah seorang assisten di laboratorium Mekanisasi Pertanian.

"Selama ini pabrik-pabrik mengimpor chitosan baku dari Jepang. Padahal kita hanya memerlukan chitosan sedikit saja untuk pengolahan limbah. Selebihnya chitosan dapat didayagunakan untuk kegunaan lain," ujar Hastuti. Padahal chitosan yang mengendap bersama protein pengotor dalam limbah cair tersebut dapat dipisahkan kembali dengan penambahan basa kuat dan dapat digunakan lagi. "Sebaiknya Indonesia mempunyai pabrik chitosan sendiri", ujar mereka serempak. Kapankah impian ini terwujud?.

**Retno Suprihatin**

---

Istilah umum untuk semua sisa-sisa kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi disebut limbah. Ia disebut entropi dalam ilmu lingkungan.

Yang berbicara adalah **Dr. Shalihuddin Djalal Tandjung, M.Sc.** seorang pakar ilmu lingkungan di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. "Sesuai dengan keadaan fisiknya ada limbah gas, padat dan cair," lanjut beliau. Dapat dimengerti bahwa yang dinamakan limbah padat adalah semua materi kering yang tak dapat digunakan oleh lingkungan. Sedangkan yang dikenal sebagai limbah cair adalah hasil samping proses suatu bahan baku. Tentunya kadangkala ia masih mengandung materi padat.

Tak ayal limbah cair udangpun masih mengandung materi padat tersebut, yang menurut **Dr. Ir. Iwan Yusuf Bambang Lelana, M.Sc.**, "Sebagian besar adalah zat tersuspensi yang tidak larut dalam air yang merupakan kulit-kulit dan kotoran yang ikut tercuci dalam larutan pencuci." Dosen Perikanan tersebut menegaskan pelonjakan ekspor udang beku sehingga perlu adanya pemonitoran lingkungan tambak udang dan pabrik udang beku.

Bagaimana dengan metode penimbunan limbah padat udang selama ini? Dr. S. Djalal menerangkan bahwa karena merupakan senyawa organik, sebelum ia menjadi polusif akan terdekomposisi dahulu. Sehingga ia lebih tepat dimanfaatkan sebagai pupuk. "Ini dengan catatan tidak semua limbah digeneralisir sedemikian rupa," ujar beliau. Prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pendem Urug Berlapis (PUB) penimbunan ini harus jauh dari sumber air agar tidak mencemari air bersih penduduk.

Karena itulah semua pabrik harus mentaati PP No. 29 tentang AMDAL dan harus dijalankan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan. "Batas limbah bermanfaat atau polusif tergantung pada badan air penerima. Jika daya dukung terbatas maka jadilah ia limbah," sambung Dr. Djalal. Ada dua metode pengukuran kesehatan air yaitu pengukuran Biological Oxygen Demand dan Chemical Oxygen Demand. Keduanya berbeda. BOD adalah ukuran keperluan oksigen yang berada di air untuk keperluan perkembangan kehidupan makhluk hidup (biologis). COD adalah ukuran keperluan oksigen dalam air yang dibutuhkan zat kimiawi untuk berikatan membentuk oksida.

Baku mutu lingkungan hidup mengatur batas maksimum BOD dan COD yang diperbolehkan terbuang ke lingkungan sebagai limbah. Ini tergantung untuk apakah air tersebut digunakan kelak sebagai air baku atau air minum langsung tanpa proses filterisasi.

Penelitian mahasiswa Teknologi Pertanian menghasilkan penurunan angka COD menjadi 37,023% dibawah batas maksimum dengan penggunaan chitosan dalam pengolahan limbah cair. Mungkin chitosan kelak dapat menjadi primadona penangkal limbah.

**Retno Suprihatin**

# MENGAIS KERJA DI KAMPUS TUA

Kau bekerja, supaya langkahmu seiring irama bumi, serta perjalanan roh jagad ini.
Berpangku tangan menjadikanmu orang asing bagi musim, serta keluar dari barisan kehidupan sendiri, yang menderap perkasa, megah dalam ketaatannya, menuju keabadian masa.

(Kahlil Gibran)



KELIK SUPRIYANTO



KELIK SUPRIYANTO

Saat pagi mulai dihiasi sinar sang surya, mereka mengawali langkahnya. Menapaki jalanan yang berkilo-kilo meter panjangnya, atau mengayuh sepeda, meninggalkan pinggiran-pinggiran kota Yogya. Dan seperti mahasiswa, mereka menuju ke kampus tua.

Apa yang mereka kerjakan di sana? Yang pasti bukan kuliah atau belajar, apalagi sekedar menemui sang pacar. Melainkan untuk menjajakan apa saja, yang dijinjing atau yang digendongnya. Mulai dari souvenir, makanan ringan, sampai buku-buku dan koran. Bahkan berbagai peralatan dan *gaman*.

Menjadi asongan, memang bukan satu-satunya pilihan. Tetapi bukankah mereka harus makan, dan mengais uang untuk berbagai keperluan?. Bagi Budi, si pengasong koran, memang hanya, ''Un-


KELIK SUPRIYANTO


RADITYA DJATI


KELIK SUPRIYANTO

tuk bayar sekolah, Mas!'' dan selebihnya buat jajan, katanya polos. Tapi bagi Pardi, penjual es ini sudah beristri dan beranak. Rumahnyapun rumah kontrak. Belum lagi soal belanja sehari-hari, yang akhir-akhir ini kian membengkak.

Memang, untuk itu semua mereka harus bertahan. Meski harus menerjang sengatan matahari, dan debu jalanan yang terkadang tak mau mengerti. Namun ada juga yang hanya berkutat di antara pilar-pilar dan lorong Gedung Pusat. Siapa tahu ada mahasiswa baik hati, yang mau menawar, lalu membeli. Atau karyawan yang baru gajian, dan memerlukan berbagai peralatan.

Namun kalau hari sedang suram, tak banyak rejeki yang bisa digenggam. Bahkan, salah-salah malah dihalau satpam. Kalau sudah

KELIK SUPRIYANTO



EDUARDO ADMIRAL



KELIK SUPRIYANTO

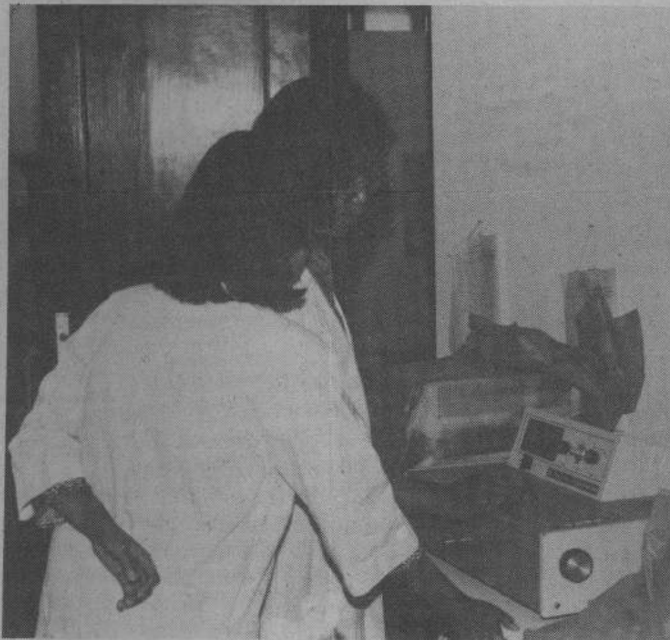
demikian mereka hanya bisa diam. Lalu *ngeloyor* pergi ke tempat yang lebih aman.

Meski selalu begitu, mereka tak lantas jera akan kerja. Barangkali karena mereka paham, bahwa mencintai hidup dengan bekerja adalah menyelami rahasia hidup yang paling dalam.

Naskah : **Abdul Rahman**
Foto : **Kelik Supriyanto, Admiral Eduardo, Raditya Djati**
**Lab.** : **Artha Photo**

# LINGKUNGAN KAMPUS: PERLUKAH LEMBAGA KONTROL?

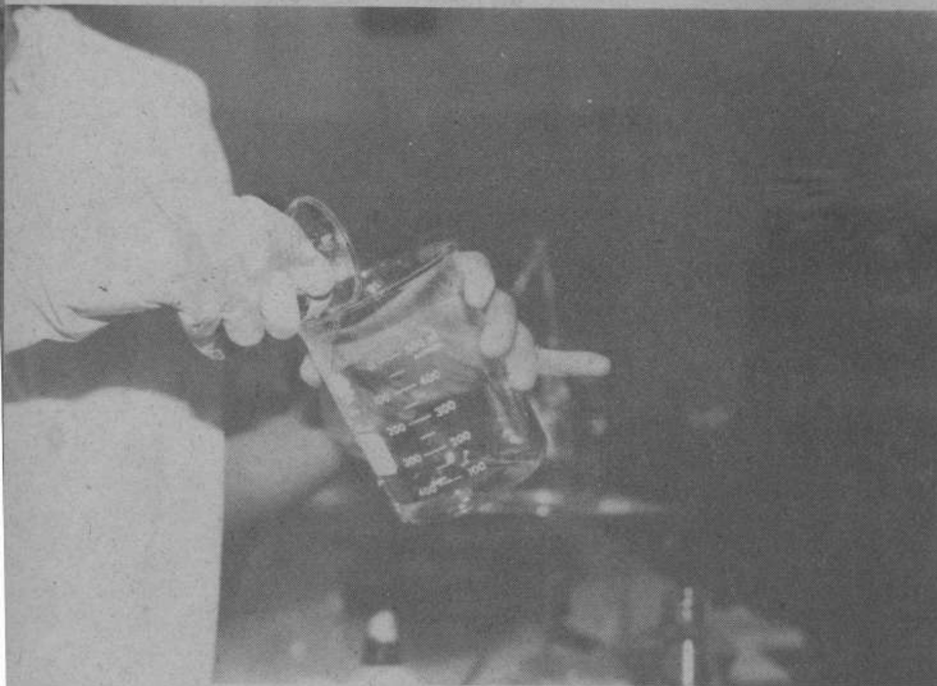
**UGM dan Departemen Kesehatan mulai menjajagi kerjasama pendirian suatu lembaga kesehatan kerja dan keselamatan lingkungan laboratorium. Sudah demikian parahkah kondisi lingkungan UGM, sehingga diperlukan lembaga semacam ini?**



RADITYA DJATI

***Praktikum Laboratorium***
*Tak lepas dari intipan bahaya*

Apakah kampus kita sudah didesain memenuhi kesehatan dan aman bagi seluruh sivitas akademika? Pertanyaan itu terngiang-ngiang di benak berapa orang pengamat lingkungan, khususnya di lingkungan Pusat Antar Universitas Bioteknologi, setelah bulan November tahun silam berlalu. **Richard Lassin, MS.,MPH.,** seorang pakar dalam bidang Keamanan dan keselamatan Kerja Laboratorium dari Michigan State University USA, diundang PAU Bioteknologi untuk berkunjung ke lingkungan kampus biru. *Survey* yang dibungkus kunjungan tersebut telah menelorkan beberapa gagasan spektakuler yang mencanangkan perlunya didirikan suatu lembaga permanen yang bertugas mengawasi, memantau dan memelihara kesehatan lingkungan laboratorium kampus.



RADITYA DJATI

Glove
*Salah satu upaya menghindari kontak langsung*

Apa sebenarnya yang sedang terjadi di laboratorium kampus kita?.

Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari 21 buah fakultas, separuh diantaranya berurusan dengan zat-zat kimiawi dan biologis di laboratorium. Fakultas Farmasi yang memiliki 12 ruang laboratorium, yang dipakai bergantian untuk acara praktikum yang beragam, punya cara sendiri dalam menangani keselamatan kerja praktikan dan menanggulangi bahaya pencemaran limbah laboratorium. "Dulu di sini pernah digali sumur resapan limbah. Entah apakah itu berfungsi untuk menampung limbah ataukah tidak, saya kurang pasti", ujar **Dr. Sudarsono, Apt.,** Kepala Laboratorium Fitokimia dari Jurusan Biologi Farmasi. Sumur resapan limbah memang umum dimiliki berbagai fakultas. Sayangnya, kesehatan dan keselamatan lingkungan sekitar tidak pernah dievaluasi. Contohnya, di Fakultas Biologi sampai saat ini sumur tua yang digali pada saat bersamaan berdirinya gedung fakultas tersebut masih berfungsi sebagai penampung limbah dari laboratorium fakultas tersebut. "Evaluasi kesehatan lingkungan, terutama kesehatan air yang ada di sekitar fakultas belum pernah dilakukan," papar **Dr. Hari Hartiko, M.Sc.,** Kepala Laboratorium Rekayasa Genetik, PAU Bioteknologi UGM. Kekhawatiran beliau mendapat siraman air sejuk dari **Dr. Shalihuddin Djalal Tandjung, M.Sc.,** seorang pakar ilmu lingkungan di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM. "Sumur resapan yang ada di Fakultas Biologi tersebut tidak dapat dikatakan berbahaya terhadap kesehatan air lingkungan, karena kampus kita terpisah jauh dari kawasan tempat tinggal penduduk. Kebutuhan air bersih fakultas juga tidak disediakan oleh sumur galian, tetapi kita mendapatkan air dari PAM yang terjamin".

Secara garis besarnya limbah terbagi atas dua kelompok. Limbah padat dan limbah cair. Limbah padat biasanya terdiri dari bermacam-macam preparat. Ikan, katak, kadal, burung dara dan marmut merupakan preparat yang umum digunakan laboratorium biologi. Biasanya preparat tersebut diawetkan. Awetan yang tidak digunakan akan dihancurkan semua, sebab dikhawatirkan termakan oleh hewan lain. Selanjutnya limbah ini dibakar dan dikubur. Tentunya lokasi penguburan harus diperhatikan. Tidaklah aman kalau diketahui terdapat banyak sumur air minum di sekitar lokasi.

Limbah cair lebih menuntut perhatian. Selama ini belum ada penanganan khusus, sehingga sisa-sisa campuran bahan kimia ini hanya dialirkan melalui saluran air. Lagi-lagi kekhawatiran timbul, bagaimana bila resapan limbah ini merembes ke dalam sumur rumah tangga?. Memang saat ini lingkungan UGM memperoleh kebutuhan air bersihnya dari PAM, tetapi siapa tahu suatu ketika nanti dibutuhkan sumur galian sebagai alternatif lain.

Menurut Shalihuddin, "Pengetahuan pegawai laboratorium dalam mengatasi limbah didapatkan secara turun-temurun sejak jaman Belanda. Jadi merupakan transfer ilmu dari pegawai senior secara berkesinambungan". Karenanya perkembangan ilmu ini sangat tergantung pada kepribadian pegawai bersangkutan. "Diperlukan pengawasan, apakah ilmu ini masih digunakan, atau dikurangi karena kemalasan laboran itu. Atau malah ditingkatkan lagi keamanannya karena ia menyadari secara pribadi bahwa kebersihan itu penting," tambah Staf Ahli Senior PPLH UGM Bidang Pendidikan dan Latihan ini.

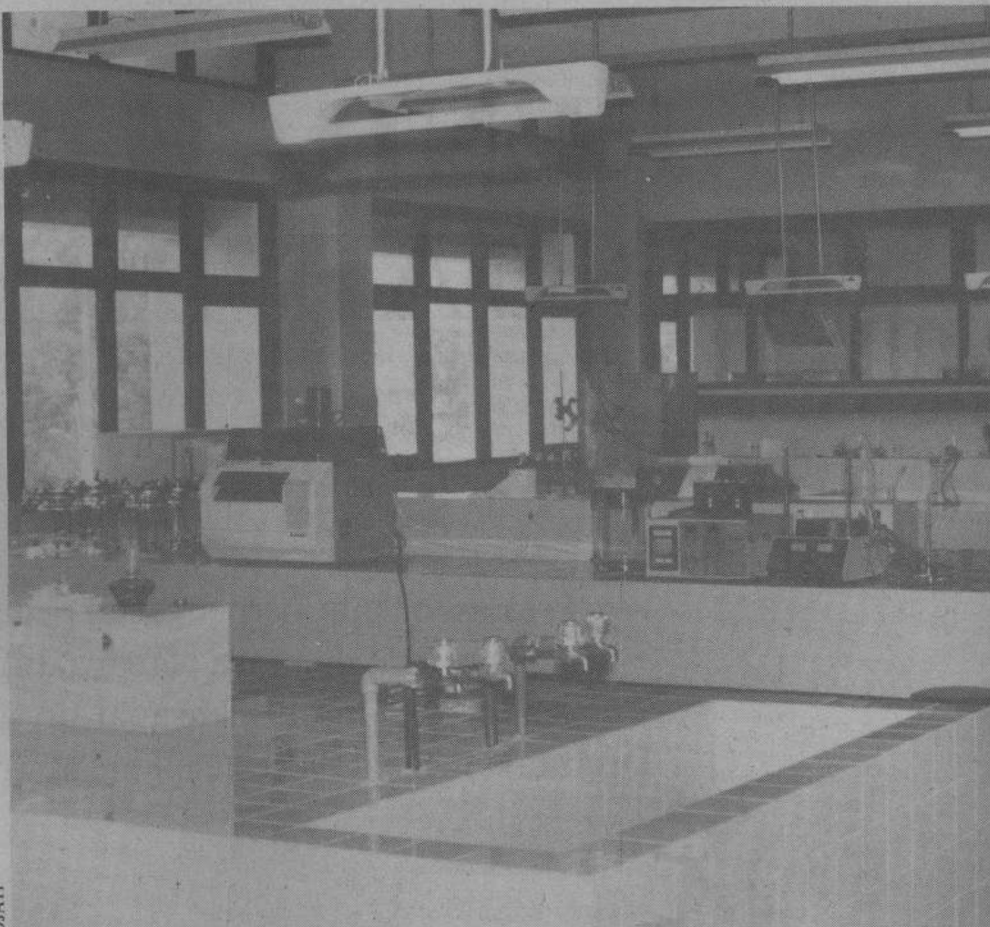
Bagaimana penanganan limbah di Fakultas MIPA Fisika dan Fakultas Teknik UGM? "Laboratorium ini boleh dikatakan tidak menghasilkan limbah, sebab untuk percobaan-percobaan kami gunakan bahan yang sudah *ready*," jelas **Dr. Muslim,** Kepala Laboratorium Fisika Atom dan Inti FMIPA UGM. Pertanyaan ini ternyata berlaku pula untuk Laboratorium Deteksi dan Pengukuran Radiasi, Jurusan Teknik Nuklir UGM." Di sini sama sekali tidak ada limbah yang berbahaya. Setelah praktikum bahan yang tersisa disimpan lagi, karena umur paruhnya besar dan radiasinya relatif kecil," ujar **Ir. Agus Budi Wiyatno,** kepala laboratorium tersebut. Di sekitar laboratorium ini banyak terdapat daerah bertanda bahaya. "Maksudnya di sini ada radiasi yang bersifat non alamiah. Kalau radiaisinya tinggi, laboratorium menggunakan beberapa lapisan. Tetapi di sini cuma berlapis papan biasa. Orang yang masuk kemari berarti sudah menyadari adanya radiasi yang seharusnya tidak ia terima. Tubuh manusia rata-rata menerima radiasi alamiah, yaitu dari kosmis, batu-batu dan *phosphor* dari dalam tubuh sendiri. Jadi tidak ada masalah dengan limbah radioaktif," ucap Agus lagi.

Memang sejauh ini belum pernah ada keluhan dari masyarakat sekitar kampus. Namun ini bukan berarti lingkungan UGM bebas dari bahaya. Bahaya selalu saja mengintip. Apalagi kontaminasi tersebut tidak berefek segera. Butuh waktu lama untuk timbul secara nyata ke permukaan. Ini dari sisi kesehatan lingkungan. Bagaimana dengan masalah keselamatan kerja?.

Upaya preventif masalah *urgent* ini dikemas dalam bentuk peraturan yang diwenangi kepala laboratorium masing-masing. "Selama ini aturan tersebut baru menyentuh tata kerja laboratorium," tutur Hari Hartiko, Doktor Biokimia lulusan University of Philippines. Misalnya, jas laboratorium harus dipakai untuk menghindari kontak langsung dengan zat-zat kimia berbahaya, seperti asam atau alkali keras yang sifatnya korosif. *Glove* (sarung tangan) pun tak boleh lepas selama praktikum berlangsung, terutama ketika be-kerja dengan bahan radioaktif.

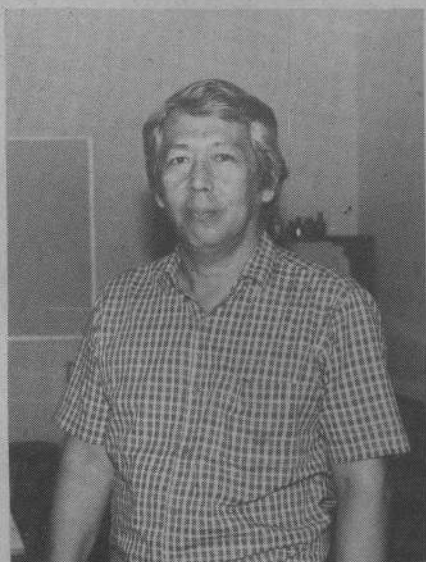
Desain perencanaan ruang laboratorium secara rutin telah memenuhi prosedur dasar pengamanan praktikan, laboran, dan staf pengajar. "Untuk pendirian laboratorium, kita selalu melibatkan tenaga konsultan. Misalnya bangunan ini. Konsultannya dari MUSIA (Amerika)." ujar **Drs. Utoro M. Yahya,** Kepala Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Kimia UGM. Apabila konsultan menilai tidak cocok, maka laboratorium tidak jadi dibangun.

Bisa dipahami, memang. Tindakan tersebut diupayakan demi terciptanya laboratorium ideal. Bagaimana gambaran laboratorium ideal itu? "Tergantung jenis lab-nya. Laboratorium ini selalu berhubungan dengan kuman. Prinsip keselamatan kerja yang berlaku disini jangan sampai pelaku dan lingkungan sekitar terkena kuman. Semua yang



RADITYA DJATI

**Laboratorium ideal**
*Bersih, ventilasi baik, penerangan bagus, sarana penerangan bagus, sarana pengaman cahaya lengkap*



RADITYA DJATI

**Dr. Hari Hartiko, M.Sc.**
*"Evaluasi kesehatan lingkungan belum pernah dilakukan"*

bekerja di tempat ini harus membersihkan diri dengan disinfektan. Bahan-bahan sisa dan kuman-kuman dimusnahkan dengan jalan direbus, dibakar dan dididihkan," kata **dr. Ilyas,** Kepala Lab Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UGM. "Paling tidak lab ideal harus memenuhi empat syarat. Pertama, harus bersih dari bau dan sisa aktifitas lab. Kedua, ventilasi yang baik. Lalu penerangan harus bagus. Jangan sampai orang mendapatkan kacamatannya dari sini. Dan terakhir, lab itu harus dipimpin oleh orang yang pantas," papar Shalihuddin. Selain itu, secara general laboratorium ideal adalah "lab yang dilengkapi petunjuk-petunjuk serta sarana pengaman bahaya yang mungkin timbul," ucap Utoro. "Dan tidak menimbulkan radiasi kepada para mahasiswa dan pekerja yang melebihi batas dosis ambangnya," tambah Agus pada kesempatan terpisah.

Seideal apapun laboratorium itu, ternyata tetap memerlukan lembaga pengawas yang mampu memonitor dan memelihara kesehatan lingkungan laboratorium. Shalihuddin menganalisa rencana pendirian lembaga tersebut sebagai suatu ide dalam mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi lebih lanjut. "Jadi bukan merupakan pertanda bahwa kita dalam kecemasan," katanya. Lalu apa fungsi lengkap lembaga semacam *Office of The Radiation, Chemical and Biological Safety* ini? Yaitu mengatur perijinan penggunaan bahan, memonitor dan mengontrol, mengawasi kesehatan lingkungan kerja, serta berhak memberi dan mencabut ijin operasional. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan *social-control* di lingkungan UGM, dan bisa menjadi laboratorium rujukan mulai dari lingkungan UGM hingga mungkin se-Asia Tenggara (mengingat inilah lembaga pertama yang bergerak di dalam bidang kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja laboratorium di Asia Tenggara).

Dana pendirian lembaga ini merupakan patungan UGM dan Departemen Kesehatan, instansi yang paling berkompeten di bidang *Occupation Health.* Biaya yang harus dikeluarkan memang tak sedikit, sehingga hasil yang didapat paling tidak mesti seimbang. Di satu sisi, masalah kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja laboratorium UGM selama ini belum menimbulkan hal-hal serius. Masalah yang timbul memang ada, tapi toh masih dalam ambang kewajaran. Di pihak lain, tidak mustahil hal-hal yang wajar itu berkembang di luar batas. Dilematis sekali, memang. Sebenarnya, perlukah lembaga kontrol seperti itu didirikan di UGM.?

**Riestianti** dan **Retno Suprihatin**
**Retno Suprihatin, Maryoto, Misrin**

# RENDAH DIRI, RENDAH PRESTASI

Prestasi belajar berpengaruh pada tingkat percaya diri, dan rasa percaya diri ini bisa mendorong untuk mencapai prestasi baru. Disarankan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.




RADITYA DJATI

**Biro konsultasi Fak. Psikologi**

Tempat Mahasiswa berkeluh kesah

Seorang mahasiswa baru tiba-tiba merasa rendah-diri setelah memasuki lingkungan barunya di UGM. Ia yang tadinya menyandang predikat teladan, atau nomor satu di daerahnya, kini hanya menjadi orang kebanyakan. Banyak teladan-teladan lain yang dijumpainya di UGM. Percaya dirinya jadi menurun, tak lagi sebesar ketika ia meninggalkan daerahnya sebagai orang yang berprestasi. Celakanya, menurunnya percaya diri ini menyebabkan prestasi belajarnya di perguruan tinggi tak lagi sebagus ketika ia di SMA.

Kasus semacam itu bukanlah satu-satunya yang bisa kita jumpai, terutama pada mahasiswa baru. Di Biro konsultasi Fakultas Psikologi UGM, banyak mahasiswa yang mengeluhkan prestasi belajarnya menurun, jauh dari yang diharapkannya. Pada umumnya mereka adalah mahasiswa tingkat awal dan datang dari daerah. Setelah diteliti terungkap, bahwa menurunnya prestasi belajar mereka disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri pada mereka.

Berangkat dari peristiwa itu, **Dra. Amitya Kumara, M.S.** dan **Dr. Yapsir Gandi Wirawan, M.A.**, keduanya staf pengajar Fakultas Psikologi UGM, mencoba meneliti sejauh mana hubungan antara percaya diri dengan prestasi belajar para mahasiswa. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UGM semester I tahun akademi 1989/1990.

Secara teoritis, percaya diri dirumuskan sebagai kemampuan mengatur diri sendiri, mampu menentukan nasib sendiri, mampu bertanggungjawab atas tindakan dan perasaannya sendiri. Rasa percaya diri seseorang ditandai dengan adanya kemampuan berpikir secara original, berprestasi, aktif, agresif dalam mendekati pemecahan masalah, dan tidak lepas dari situasi lingkungan yang mendukungnya. Orang yang percaya diri selalu bertanggungjawab atas keputusan yang telah diambil, maupun menatap fakta dan realitas secara objektif yang didasari kemampuan dan ketrampilan.

Garry dan Thomas dalam Psychofeedback Practical Psychocybernetics terbitan Prentice Hall, New York 1979, melukiskan kaitan antara percaya diri dengan kemampuan seseorang seperti satu spiral. Bagi pertumbuhan pribadi seseorang, keduanya harus ada. Penguasaan dan pengetahuan satu materi idealnya akan mengarahkan pada terbentuknya percaya diri dalam satu kemampuan dan ketrampilan. Selanjutnya percaya diri akan mendorong satu usaha untuk menguasai satu kemampuan baru, dan prestasi yang diraihnya ini akan menimbulkan percaya diri.

"Namun ini tidak berarti, bahwa prestasi belajar mahasiswa selalu dipengaruhi oleh percaya diri, atau sebaliknya," tutur Dra. Amitya Kumara, menunjukkan bahwa hasil analisa product moment untuk mengetahui hubungan antara percaya diri dengan prestasi di kalangan mahasiswa, diperoleh hasil korelasi sebesar r = 0,0239 dengan p = 0,414. Hasil tersebut menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara percaya diri dengan prestasi mahasiswa.

Teknik analisis product moment digunakan untuk mengetahui hubungan antara nilai EBTA dengan percaya diri di kalangan mahasiswa, dan diperoleh korelasi sebesar r = 199 dengan p = 0,033. Artinya ada hubungan yang signifikan antara percaya diri dengan nilai EBTA. Penemuan ini menyokong pendapat Garry dan Thomas yang menyatakan bahwa hubungan antara kemampuan dan percaya diri seperti satu spiral.

"Di samping percaya diri, masih ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang meraih prestasi, antara lain faktor intelegensia, faktor kepribadian, faktor motivasi, faktor lingkungan, teman, dan lain-lain." Kata Dra. Amitya lebih lanjut. Itulah sebabnya, hasil penelitian Dra. Amitya Kumara, M.S. dan Dr. Yapsir Gandi Wirawan, M.A. menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara percaya diri dengan prestasi mahasiswa.

Percaya diri yang besar bukan jaminan seseorang untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. Seorang mahasiswa yang memiliki percaya diri yang tinggi karena kemampuannya menguasai satu bidang tertentu di luar bidang akademik, sementara kemampuannya dibidang akademik sangat kurang, jelas prestasi belajarnya tidak akan setinggi percaya dirinya.

Untuk mencapai prestasi belajar yang baik, percaya diri yang tinggi harus didukung oleh potensi mahasiswa yang bersangkutan, di samping ketekunan pada bidang akademik tersebut. Dan mahasiswa yang memiliki prestasi belajar yang baik, belum tentu pula ia memiliki percaya diri yang tinggi. Bisa jadi percaya dirinya kurang, karena minimnya pengalaman dia di luar bidang akademik.

**Drs. Suardiman**, Pembantu Dekan III Fakultas Psikologi, yang juga menjadi pembina unit kegiatan tari UGM mengemukakan salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri, adalah dengan mencari pengalaman sebanyak mungkin, misalnya mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Di UGM sendiri ada sekitar 44 unit kegiatan mahasiswa. "Ini bisa dijadikan ajang untuk menggembelng diri dan menumbuhkan motivasi tertentu, sehingga akan berkembang rasa percaya diri." Ungkapnya.

Lebih lanjut Drs. Suardiman mengingatkan, bahwa mengaktivi suatu jenis kegiatan jangan lantas dijadikan alasan untuk me-

ninggalkan bangku kuliah. "Kewajiban utama mahasiswa tetaplah belajar. Mengikuti kegiatan ekstra hanyalah untuk mencari pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, agar kelak setelah menjadi sarjana bisa langsung terjun ke masyarakat." Saran Drs. Suardiman.

Menurutnya, Idealnya pada semester satu dan dua, mahasiswa melakukan orientasi sesuai dengan disiplin ilmunya terlebih dulu. Baru pada semester tiga sampai semester enam atau tujuh ia mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Kalau sudah memasuki semester tujuh atau delapan, sudah saatnya ia kembali ke bangku kuliah, untuk menyelesaikan studinya.

Jadi mengikuti kegiatan ekstra kurikuler cukup dua atau dua setengah tahun, sekedar untuk mencari pengalaman. Setelah itu kembali menekuni bidang akademik. Dengan demikian mahasiswa akan memiliki kemampuan yang seimbang antara bidang akademik dan non akademik, sehingga setiap mahasiswa akan memiliki rasa percaya diri yang utuh, sebab ia mampu menguasai dua bidang sekaligus.

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara percaya diri dengan prestasi belajar mahasiswa, bukan merupakan alasan untuk mengabaikan rasa percaya diri. Pada setiap mahasiswa, perlu ditumbuhkembangkan rasa percaya diri, sebab ini akan tercermin pada optimisme mahasiswa tersebut. Dan optimisme akan memacu mahasiswa untuk senantiasa menaklukkan tantangan baru.

Namun percaya diri yang terlalu berlebihan, justru bisa menjadi bumerang bagi mahasiswa yang bersangkutan. Karakter yang dekat sekali dengan kesombongan ini, menyebabkan ia lengah akan perkembangan yang terjadi di luar dirinya, bahwa orang lain telah lebih mampu menguasai bidang baru.

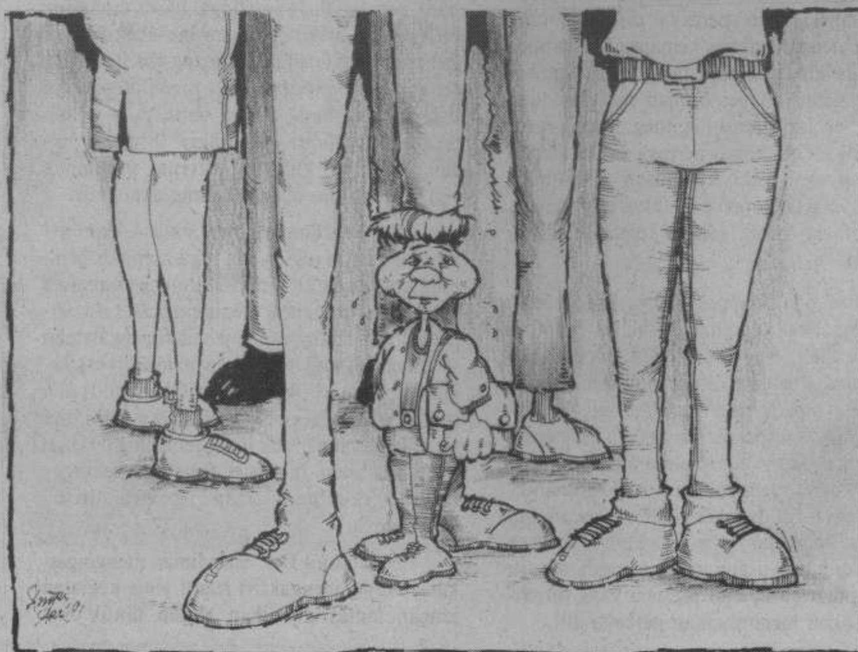
Memang bukan hal yang mudah mencari ukuran yang tepat mengenai besar kecilnya percaya diri. Pada kenyataannya setiap manusia akan mengalami pasang surut percaya diri. Ini tidak lepas dari faktor latar belakang sekeluarga, serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Anak yang dibesarkan dengan pola asuh sekeluarga yang otoriter, dimana anak tidak punya kesempatan mengemukakan idenya sendiri, bisa menyebabkan si anak kurang percaya diri nantinya. Sementara anak yang terlalu dimanjakan, sehingga ia punya ketergantungan yang berlebih pada orang tuanya, juga nantinya akan kurang memiliki rasa percaya diri. Dan orang tua yang memberi kebebasan pada anak yang terlalu berlebihan atau lepas tangan begitu saja, sehingga anak tidak pernah tahu, apakah ia telah mampu atau belum, juga akan menyebabkan anak kurang percaya diri.

Komunikasi keluarga yang baik akan mendukung tumbuhnya percaya diri yang positif. Selain itu memberi pengalaman awal yang baik pada anak mutlak perlu. Misalnya, memberi kesempatan pada anak untuk menjadi pemimpin di kelas, atau pun di luar kelas pada saat anak bermain.

Sedangkan bagi mahasiswa, langkah awal untuk menumbuhkan percaya diri adalah dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu, dan mencari potensi yang dimilikinya. Potensi ini kemudian dikembangkan, sehingga ia akan mencapai suatu prestasi. Yang tak boleh dilupakan adalah kemampuan akademik, ia harus menguasai suatu disiplin ilmu sesuai dengan minatnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, baik di dalam maupun di luar kampus.

**Hesty D. Lestari**


ANDRIE RISMAN F.

# SUMBANGSIH ALUMNI BAGI PENDIDIKAN TINGGI

Selama ini peran alumni kepada almamaternya yang tampak adalah sumbangan materi. Bagaimana dengan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan tinggi?

RADITYA DJATI




**Wujud sumbangan materi**

Sumbangan pemikiran sangat dinantikan

Sebagai universitas tertua di negeri ini, UGM telah banyak menyumbang ribuan tenaga untuk pembangunan. Alumni UGM tersebar di seluruh penjuru dan mempunyai peranan dalam lingkungan kerjanya. Selain karena faktor kualitas manusianya, kebesaran nama Universitas Gadjah Mada ikut andil dalam membantu alumni memasuki lapangan pekerjaan. Seorang sarjana yang membawa ijasah UGM dapat dipastikan mampu menembus "birokrasi awal" dari serangkaian tahap-tahap tes.

Sebagaimana sebuah bangunan, UGM juga membutuhkan perawatan, rehabilitasi di sana sini, bahkan kalau perlu "cat" baru supaya tetap megah dan mampu menjawab kebutuhan yang terus berkembang. Disinilah peran alumni dibutuhkan.

Berbicara masalah peran alumni, perhatian sering tertuju pada masalah dana. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah lembaga pendidikan, apalagi sebesar UGM, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disamping sumbangan dana alumni, UGM sendiri sudah dapat mendatangkan dana dari berbagai pihak. Banyak instansi, badan usaha, bank, yang tidak ragu-ragu bekerjasama dengan UGM, baik berupa penelitian, kerjasama karyawan untuk dididik, bahkan yang tanpa imbalan nyata. Pendek kata, dengan nama besarnya UGM telah mampu berdiri sendiri.

Menurut Bapak **Trimarjono, SH.**, Ketua KAGAMA Jawa Timur, tugas alumni antara lain menjaga nama besar UGM. Cara yang paling nyata adalah dengan bekerja sebaik-baiknya di lingkungan pekerjaan. "Orang akan melihat bahwa kita dari UGM. Itu berarti kita telah menjunjung nama almamater. Kebesaran nama universitas memang harus selalu dipupuk agar tetap atau bahkan bertambah besar," tuturnya.

Ada peran lain yang tidak kalah pentingnya di samping menyumbang dana, yakni peran dalam bidang akademik. Selama ini terdapat anggapan bahwa mutu pendidikan sepenuhnya menjadi urusan pengelola universitas. Orang sibuk mengomentari sistem pendidikan, mutu dosen dan buku-bukunya, rasio dosen dan mahasiswa dan sebagainya. Tetapi ada hal yang sering terlupakan bahwa ilmu pengetahuan harus berkembang untuk dapat menjawab tuntutan zaman. Itu berarti harus terjadi komunikasi antara pemakai (lapangan kerja) dan pendidikan (universitas), karena pemakai tenaga kerja yang tahu kebutuhan di lapangan.

Untuk menghasilkan tenaga yang siap dikembangkan, universitas tidak hanya membutuhkan dosen-dosen bergelar ataupun sistem pendidikan yang canggih, tetapi lebih-lebih harus mendapatkan informasi baru yang berkembang di lingkungan pekerjaan. Informasi dan "ilmu baru" ini didapatkan dari siapa lagi kalau bukan dari alumni, yang telah menggeluti bidangnya di dunia luar. Seorang dosen untuk mengajar di S1 biasanya diambil dari mahasiswa yang mempunyai IP tinggi. Tanpa pernah praktek, mereka langsung mengajar. Bila mereka pandai akan disekolahkan lagi ke jenjang S2 dan seterusnya. Praktis ilmu yang mereka dapat dan dikembangkan berasal dari teori ke teori. Kalaupun membaca buku, lebih-lebih di Indonesia, buku-buku tersebut disusun oleh akademisi bukan praktisi.

Mungkin sudah saatnya alumni berperan lebih besar di bidang akademik. Universitas beberapa waktu lalu mencanangkan Panca Prasetya kepada alumninya. "Salah satunya adalah alumni mengabdi bagi perkembangan ilmu, kemanusiaan serta alamamaternya," tutur Purek III dan Hubungan Alumni, **Ir. Haryana, M.Arch.** Ir. Haryana menjelaskan, dalam pelaksanaannya bisa bermacam-macam bentuknya. Menjadi dosen tamu, menjadi pembicara dalam seminar atau memberi masukan bagi pengembangan kurikulum.

Untuk menjadi pembicara dalam sesminar mungkin telah banyak dilakukan tetapi bagaimana dengan menjadi dosen tamu atau penyempurnaan kurikulum? Menjadi dosen tamu tentu saja lebih sulit dibandingkan menjadi pembicara dalam seminar, baik dari segi waktu yang terbatas maupun dari segi biaya yang banyak. Tapi bila ada alumni yang mau menyempatkan diri menjadi dosen tamu, sangat membantu proses pengembangan ilmu, karena bahan yang diberikan menjadi lebih runtut dan berkesinambungan dibandingkan bila diberikan dalam suatu seminar.

Pada tahun 1971, seorang dosen Fakultas Ekonomi, DR. Arief Suadi, dkk. melakukan penelitian tentang kebutuhan dunia usaha dalam hubungannya dengan pendidikan sarjana ekonomi perusahaan. Pada 1990 lalu juga dilakukan penelitian serupa yaitu tentang bursa tenaga kerja. Observasi dilakukan pada tahun 1989 terhadap 145 responden lulusan sarjana tahun 1988/1989, yang masih sering mengadakan kontak dengan Sub-Bagian Alumni dan Kemahasiswaan. Dari mereka didapat masukan yang sangat penting bagi penyempurnaan kurikulum. Antara lain masukan bahwa ada beberapa matakuliah yang banyak dipakai dalam praktek dan bekerja, sistem belajar yang disenangi dan lain-lain.

Yang menarik dari penelitian ini adalah responden yang terjaring sebagian besar adalah dari jurusan manajemen. Hal itu menunjukkan bahwa lulusan manajemen sering mengadakan kontak dengan fakultas (almamater). Melihat persaingan untuk mendapat pekerjaan bagi jurusan manajemen makin ketat, membuat mereka harus sering mengadakan kontak dengan almamater untuk mendapatkan informasi. Dapat dikatakan bahwa masukan penting bagi penyempurnaan kurikulum pada umumnya berasal justru dari alumni yang "belum mapan".

Keterlibatan alumni dalam bidang akademis tidak terlepas dari kesiapan pihak pengelola universitas. Koordinasi yang sulit biasanya menjadi alasan yang masuk akal. Walaupun demikian hal tersebut bukannya tidak mungkin dilakukan. Di luar negeri sudah banyak universitas yang mewajibkan dosennya bekerja di luar bila telah mengajar selama sepuluh tahun lebih. Mereka bekerja dan menempati jabatan strategis selama beberapa tahun, dan kembali ke kampus untuk mengajar lagi.

Di Indonesia mungkin masih sulit untuk rotasi semacam itu. Tetapi ide tersebut bisa diterapkan dengan cara memanggil kembali yang sudah berpengalaman dalam praktek, untuk menularkan ilmunya pada mahasiswa. Bahkan kalau perlu pada dosen pengajar atau memberi kesempatan lebih banyak pada mahasiswa untuk melakukan penelitian di tempat alumni bekerja.

Dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi, akan makin ketat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Orientasi pendidikan harus lebih diarahkan kepada pembentukan tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan teoritis dan daya penalaran yang tinggi. Sehingga kalau bekerja nanti, mampu memecahkan masalah dengan baik dan memiliki inisiatif yang tinggi. Untuk itu harus diciptakan suatu kondisi dimana mahasiswa banyak menghadapi kasus-kasus yang nyata dan mencoba mencari jalan keluarnya. Kesempatan yang lebih besar untuk mengetahui dunia nyata akan membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dikemudian hari.

**Maria Selatiningsih Rifa'i Arfan Abdul Rahman**

# TIDAK HANYA DI ALMAMATER

Dalam era globalisasi sekarang ini, perguruan tinggi perlu cepat menyesuaikan diri untuk menjawab atau mengantisipasi perkembangan-perkembangan dunia nyata yang serba cepat. Salah satu usaha ke arah itu adalah dengan makin meningkatkan peran alumni terhadap almamaternya, terutama sekali dalam pengembangan pendidikan tinggi. Untuk melihat kemungkinan peran alumni dalam mengembangkan pendidikan tinggi melalui KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjah Mada), berikut wawancara Abdul Rahman dari BALAIRUNG dengan **Ketua KAGAMA Jatim yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Trimarjono, SH.**

**Selama ini peran alumni bagi almamater yang sering tampak dipermukaan adalah perannya dalam hal sumbangan materi, sedangkan dalam bentuk konsep maupun pemikiran untuk pengembangan pendidikan tinggi, masih belum banyak. Peningkatan peran yang seperti ini menurut Bapak bagaimana kemungkinannya?**

Bagi saya peranan itu bisa dilihat dari kerangka yang lebih luas. Peranannya dalam peningkatan kualitas pendidikan bisa tidak hanya di almamater. Misalnya saya yang dengan kegiatan saya di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Ya, ini peran dalam dunia pendidikan. Dan itu kalau diurut-urut juga termasuk bakti atau sumbangsih pada almamater. Sebab apa? Semua orang tahu saya dari Gadjah Mada. Mereka akan melihat dan membuktikan saya ini berhasil atau tidak? Dan saya kira juga teman-teman lain yang ada di instansi atau bidang mereka masing-masing, juga akan membawa nama Gadjah Mada. Ini peran alumni dalam peningkatan kualitas pendidikan itu.

**Kalau Bapak sebagai Ketua KAGAMA Jatim, bagaimana peran tersebut dapat ditingkatkan?**

Sulit, Mas. Bagaimana saya bisa mendapatkan bapak-bapak yang kita undang untuk memberi ceramah atau materi kuliah, sedangkan kita mengumpulkan anggota KAGAMA saja susahnya setengah mati. Terus terang saja kalau dengan wadah KAGAMA itu memang kurang memungkinkan. Misalnya di sini (di UWK -red) kalau saya taruh KAGAMA, nanti akan menimbulkan hal yang tidak baik. Di sini kan terdiri dari bermacam-macam unsur. Tetapi percayalah bahwa selalu anggta KAGAMA dalam memperjuangkan perguruan tinggi swasta ini banyak yang bisa kita capai. Itu yang saya katakan tadi, peran aktif dari kami sebagai anggota KAGAMA di bidangnya masing-masing, menyelesaikan tugasnya de-ngan sebaik-baiknya.

**Jadi bisa disimpulkan tidak bisa berharap banyak dari KAGAMA sebagai organisasi alumni?**

Ya, organisasi KAGAMA ini kan organisasi kekeluargaan. Jadi kalau nanti kita bawa kepada hal-hal yang tidak bersifat kekeluargaan, akan menimbulkan hal yang tidak baik. Saya juga tahu bagaimana menghormati masing-masing institusi pendidikan yang ada.

**Mengenai hubungan perguruan tinggi dengan alumninya seperti alumni menjadi dosen tamu, atau sebaliknya mahasiswa magang di tempat alumni dan lain sebagainya, bagaimana pendapat Bapak?**

Bisa. Saya *nggak* keberatan *kok* mereka masuk. Dan itu positif. Pengalaman mereka di luar itu bisa untuk menambah wawasan mahasiswa yang praktis diberi teori saja.

**Nur Hidayat**


## UCAPAN TERIMA KASIH

Pengurus Majalah BALAIRUNG

mengucapkan terima kasih kepada

KAGAMA RIAU

atas bantuan dana penerbitan

yang telah diberikan.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

## PERUSAHAAN DAERAH ANEKA PANGAN

**(d/h. P.D. Nabati Yasa, P.D. Bujana Karya, P.D. Es. Parwita)**
**Jln. Ngagel 165 Surabaya**
**Telepon: 578563 – 578112 – Kotakpos: 249**

***Nikmatilah:***




**HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI**
COKLAT ROTI SYROOP
**TJENDRAWASIH**

Bermacam-macam:
**COKLAT:** COKLAT WAFER, MILK, MENTE, STICKS, PARADISO, BUTIR-BUTIR DLL.

### COCOA BUTTER & COCOA POWDER

**Hubungi : Unit Pabrik Coklat, Siroop & Roti**
**CENDRAWASIH**
**JL. KALISARI I/8 SURABAYA TELP. 42892 – 40018**

**Pabrik Limun & Sirup "TELASIH"**
Jl. Melwis No. 5 Surabaya Telp. 21166

Pabrik Roti & Biskuit "KENANGA"
Jl. Kalisari Pesarean 16-A Surabaya
Telp. 41551

### MINYAK GORENG OBOR

- DIBUAT DARI **MINYAK KELAPA** NYIUR MURNI
- TAHAN DISIMPAN LAMA DAN TIDAK TENGIK
- PUTIH JERNIH TIDAK BERBUIH
- HEMAT PEMAKAIANNYA TIDAK TRAPAS
- MENAMBAH GIZI & KESEHATAN
- DIPROSES SECARA MODERN & HYGINIS
- DITANGGUNG HALAL

**Jl. Ngagel 165 Surabaya**

Dalam kemasan:
17 Kg – 5 Kg – 2 Kg
dan Botol (620 cc)

PRODUKSI KERJA SAMA
**P.T. KUNCI MAS WIJAYA**
dengan
**P.D. ANEKA PANGAN**
SURABAYA – INDONESIA

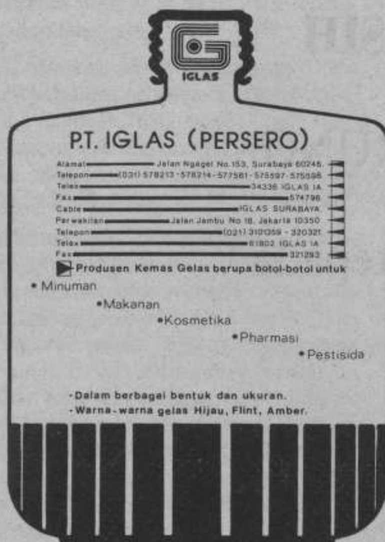


**Memprodusir es batu berkwalitas tinggi**
***Khusus***

**COLD STORAGE / PLATE FREEZER DAN COOL ROOM**

1. **Pabrik Es REJOMULYO.**
   Jl. Majen. Sungkono 1 Madiun * Telpon. 4122.
2. **Pabrik Es SARIPETOJO.**
   Jl. Kidal 10 * Surabaya * Telpon. 44338.
3. **Pabrik Es NGAGEL.**
   Jl. Ngagel 137 * Surabaya * Telpon. 578915.
4. **Pabrik Es KASRI.**
   Jl. Pabrik Es Kasri Pandaan * Telpon. (0343) 81610.
5. **Pabrik Es BETEK.**
   Jl. Bogor – Terusan 9 Malang * Telpon. 51789.
6. **Pabrik Es LABAN.**
   Jl. Labruk Lor 27 Lumajang * Telpon. 81068.
7. **Pabrik Es SUMBER KOLAK.**
   Jl. Cempaka 764 * Situbondo * Telpon. 61137.
8. **Pabrik Es TELENGSARI.**
   Jl. KH. Siddiq 21 JEMBER * Telpon. 41821.
9. **Pabrik Es MANDAR.**
   Jl. Nusantara 3 Banyuwangi * Telpon. 21036.

**SERALI MERASAKAN – AKAN MEMAKAINYA SELALU !!!**




# P.T. IGLAS (PERSERO)

| | |
|---|---|
| Alamat | Jalan Ngagel No. 153, Surabaya 60246. |
| Telepon | (031) 578213-578214-577561-575597-575598. |
| Telex | 34336 IGLAS IA. |
| Fax | 574796. |
| Cable | IGLAS SURABAYA. |
| Perwakilan | Jalan Jambu No. 18, Jakarta 10350 |
| Telepon | (021) 3101359 - 320321. |
| Telex | 61802 IGLAS IA |
| Fax | 321293. |

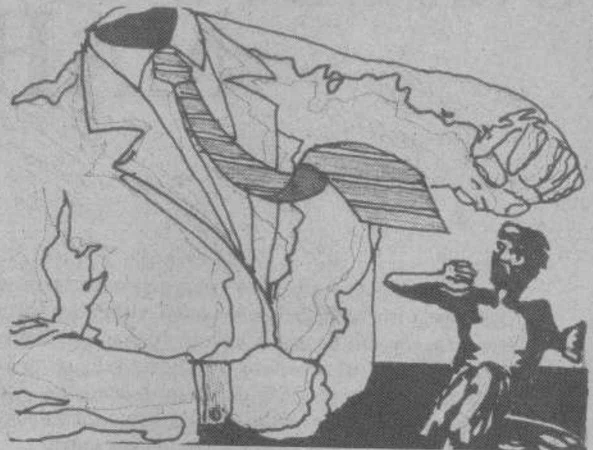
**Produsen Kemas Gelas berupa botol-botol untuk**

* Minuman
* Makanan
* Kosmetika
* Pharmasi
* Pestisida

**-Dalam berbagai bentuk dan ukuran.**
**-Warna-warna gelas Hijau, Flint, Amber.**


ISTIMEWA

# TRAGEDI KLIWON


M. ARIFIN

Mungkin Kliwon orang yang tak beruntung. Berkubang dengan masa kecil yang pahit. Hidup di desa. Jauh dari keramaian kota. Jauh dari supermarket atau sineplek. Pendeknya jauh dari kenikmatan kehidupan modern. Saat menyenangkan hanya ketika musim terang bulan tiba. Bermain *gobag sodhor, jethungan* atau *jamuran*. Atau ketika bersama-sama temannya menggembalakan kambing, kerbau sambil berolok-olok tentang nasib mereka sebagai anak desa. Tentang kemiskinan yang selalu akrab dengan kehidupannya.

Tragisnya suasana itu tak berapa lama. Bukan karena dirampas usianya yang kian beranjak dewasa. Tetapi dirampas oleh keadaan. Keadaan dimana Republik ini sedang bergolak. Di kota-kota terjadi demonstrasi aksi unjuk rasa. Rapat umum di alun-alun, lapangan bola atau jalanan. Situasi panas. Ketika itu praktis Kliwon tidak berani keluar rumah, karena larangan orangtuanya yang sambil menakut-nakuti. Hari-harinya dihabiskan di balik kolong. Sambil sesekali mencari tahu tentang situasi desa yang sepi. Karena dicekam ketakutan.

Kliwon tidak lagi melihat Lik Kromo, Pakdhe darso, Yu Kempul, Kang Pardal dan tetangga lain mendengarkan pidato Bung Karno di rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang memiliki radio. Juga tak melihat Lik Rebo, Kang Kliwon, dan Yu Sarmi latihan kethoprak atau wayang orang. Menurut beberapa tetangga, mereka ditangkap. Dipenjara karena anggota partai terlarang. Bahkan beberapa tetangga yang sering menonton mereka latihan juga "diciduk" dimintai keterangan aparat.

Kliwon kini baru benar-benar ketakutan. Takut diciduk. Hanya karena seringnya ia menonton latihan-latihan kethoprak atau wayang orang. Akibat kegandrungannya pada wayang orang dan kethoprak. Untunglah keadaan tersebut tak berlarut-larut. Kliwon bisa bermain kembali bersama gerombolannya. Menggembala, merumput, memancing atau bermain bola di tanah lapang. Kembali sejenak menikmati dunia kanak-kanaknya.

Tapi takdir memang tak bisa ditolak. Nasib sial selalu akrab dengannya. Seperti sore itu, ketika sedang bermain bola dengan gerombolannya, tiba-tiba ada kabar "culik", yang membuatnya cemas dan takut. Beberapa anak tetangga desa sebelah "diculik". Ya, mereka diculik untuk "tumbal". Untuk korban. Menurut bapak ibunya, hantu penunggu (*baurekso*) jembatan di ujung desa yang sedang dibangun minta korban. Minta tumbal mata anak-anak. Untuk dibikin cendol dawet minuman kesukaannya. Bahkan beberapa pembangunan jalan, gedung, waduk, yang sedang dikerjakan di wilayah lain juga minta tumbal anak-anak.

Sejak saat itulah Kliwon sering bolos sekolah. Bukan karena belum bayar SPP, tetapi karena semata-mata takut diculik sebagai tumbal. Karena para penculik beroperasi pada jam-jam anak pulang sekolah. Kliwon tak habis mengerti dengan masa kanak-kanaknya. Mengapa selalu dicekam ketakutan. Ketakutan-ketakutan yang dibawanya hingga kini sebagai mahasiswa. Sehingga teman-temannya sering mengejek penakut, *jirih*.

Fenomena tumbal dari waktu ke waktu ternyata selalu menghantui Kliwon. Sejalan dengan makin gencarnya pembangunan waduk, jalan, lapangan golf, taman kota, supermarket dan sebagainya. Cuma yang ini tumbal model baru, dimana yang diculik sebagai tumbal bukan hanya anak-anak tetapi semua. Ya kakek, nenek yang sedang menunggu sang maut, Pak lik, mbok dhe, mbok cilik, cucu, buyut, cicit, teman, pacar. Karena yang *baurekso* proyek-proyek pembangunan tersebut memang serakah-rakus. Pendeknya *alu amah* tidak memiliki rasa malu. Tebal muka. Sehingga mereka melakukan praktek: *exploitation de L'homme par l'homme* dimana selalu *survival of the fittetst* yang mengakibatkan *the dead of the weaks.*

Untuk itu, mereka selalu lebih dekat dengan raja-raja kecil yang memiliki otonomi mengelola rumah tangga. Dan malangnya letak geografis kelautan mengakibatkan raja besar sulit mengontrol raja kecil dalam menjalankan otonomi. Sehingga raja kecil terhindar dari pengawasan melekat. Jauh dari kontrol dan evaluasi. Kondisi ini membuat yang baurekso proyek-proyek pembangunan merasa aman tenggelam dibalik ketiak raja kecil setelah menjarah, menculik tumbal-tumbal. Memanfaatkan legitimasi kekuasaan raja kecil sebagai perisai pengaman dari gugatan atau pengaduan sanak famili, teman, simpatisan para tumbal.

Menghadapi fenomena tumbal model baru yang begitu kompleksnya tentu Kliwon akan ketakutan. Tapi entah setan mana yang merasuk dalam tubuh Kliwon yang kurus, pucat, kurang gizi tersebut, karena ternyata Kliwon tidak gentar. Tidak takut. Alam pikirannya menangkap bahwa yang baurekso pakai dasi, pakai mercy dan makan nasi. Ini hantu culik globalisasi. Hantu culik gombalisasi. Yang harus enyah dari bumi pertiwi dengan aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Maka dihimpunnya teman-temannya untuk melakukan aksi di seluruh negeri. Tapi hantu culik yang berdasi makin menjadi-jadi. Dan itu rupanya sah-sah saja. Karena pembangunan memang perlu korban, kata seorang pejabat dari kerajaan besar. "Bangsat!" teriak Kliwon kesal.

Kliwon terus menggalang aksi sambil menggugah semangat kepedulian sosial, semangat kemanusiaan dan semangat kerakyatan kepada kawan-kawan lainnya. Tapi celakanya mereka seolah-olah tak bergeming malah satu-persatu kawan seperjuangannya pergi meninggalkan karena terserang virus subversif, mencari nasi, mencari ASI, mencari do'i malah ada yang mati stres karena tak kuat mengidap aborsi idealisme. Kliwon benar-benar kesal, takut dan cemas akan kejangkitan virus subversif. Lalu dengan sisa-sisa tenaga ia mencoba bangkit, menuju makam tua seorang pejuang. Ditumpahkannya kekesalan-kekesalan, kesaksiannya tentang *abang ijo* negerinya. Lalu tangannya mengepal sambil berteriak geram: "Ahh . . .!"

Saya terheran-heran, ternyata sosok mayat yang ditemukan di kuburan tua itu adalah seorang Kliwon. Lalu saya hanya bisa membayangkan seandainya negeri ini cukup banyak dengan Kliwon-kliwon yang lain, tentu akan *gayeng*. Hush! Stop di sini saja!

**TRI SUPARYANTO**
Pemred Majalah PENDAPA Sarjana Wiyata Taman Siswa

# MAHASISWA BARU



Beruntunglah Anda, bila Anda termasuk salah seorang dari mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi di tahun ini. Terlebih lagi kalau yang Anda masuki adalah perguruan tinggi negeri. Betapa tidak, rasio persaingan untuk bisa diterima saja terkadang tidak masuk akal. Untuk tahun ini (1991) data yang resmi menunjukkan bahwa rata-rata yang diterima tidak sampai 15% dari jumlah pendaftar. Bahkan untuk jurusan tertentu yang faforit hanya 1%. Itu berarti seorang harus mengalahkan seratus pendaftar lainnya untuk bisa duduk di bangku kuliah yang diinginkannya.

Demikian ketat persaingan itu, sehingga bekal kepintaran saja yang dibawa selama tiga tahun di SMA mungkin terasa tidak cukup. Mungkin masih harus ditambah delapan bulan mengikuti bimbingan tes, atau menghadiri ceramah-ceramah "Strategi Masuk Perguruan Tinggi Negeri" di sana-sini. Dan kalau masih kurang juga, bisa memanfaatkan jasa para 'joki'. Yang satu ini, tentunya dengan menyediakan sedikit uang lelah untuk mereka. Tak banyak, paling-paling sekian juta. Dan yang perlu diingat, harus ekstra hati-hati. Sebab kalau ketahuan salah-salah bisa berurusan dengan polisi.

Semua ini tak lain hanyalah demi memenangkan persaingan untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Sehingga kalau sampai diterima, seluruh anggota keluarga dan para tetangga tentu akan menyanjung dan memuji dengan bangga. Dan tidak sedikit diantara mereka yang kemudian membikin pesta, atau beramai-ramai ke tempat-tempat hiburan untuk merayakan kemenangan. Yang berasal dari kampung, tentu akan kenduri, *mayoran*, atau mengadakan selamatan. Bahkan kalau perlu *nanggap* wayang semalam suntuk. Apalagi kalau di kampung itu hanya Anda yang diterima. Pasti Anda mendadak akan menjadi primadona.

Keberuntungan itu ternyata tak hanya sampai di situ. Hari-hari menjelang Pemilu 1992 ini sejumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) menyatakan keinginannya untuk mengajak warga kampus bergabung bersama mereka. Meskipun warga kampus itu tidak hanya mahasiswa baru, melainkan juga para dosen, karyawan dan mahasiswa yang lain, dari yang paling muda angkatannya sampai mereka yang hampir kena D.O. karena terlalu lama menikmati masa kemahasiswaannya. Namun yang menarik dari pernyataan OPP itu karena ternyata mereka mengutamakan bagi para pemilih pemula. Nah, bukankah mahasiswa baru adalah sebagian besar diantaranya? Benar-benar keberuntungan. Sekali-kalinya jadi mahasiswa, jadi rebutan dimana-mana.

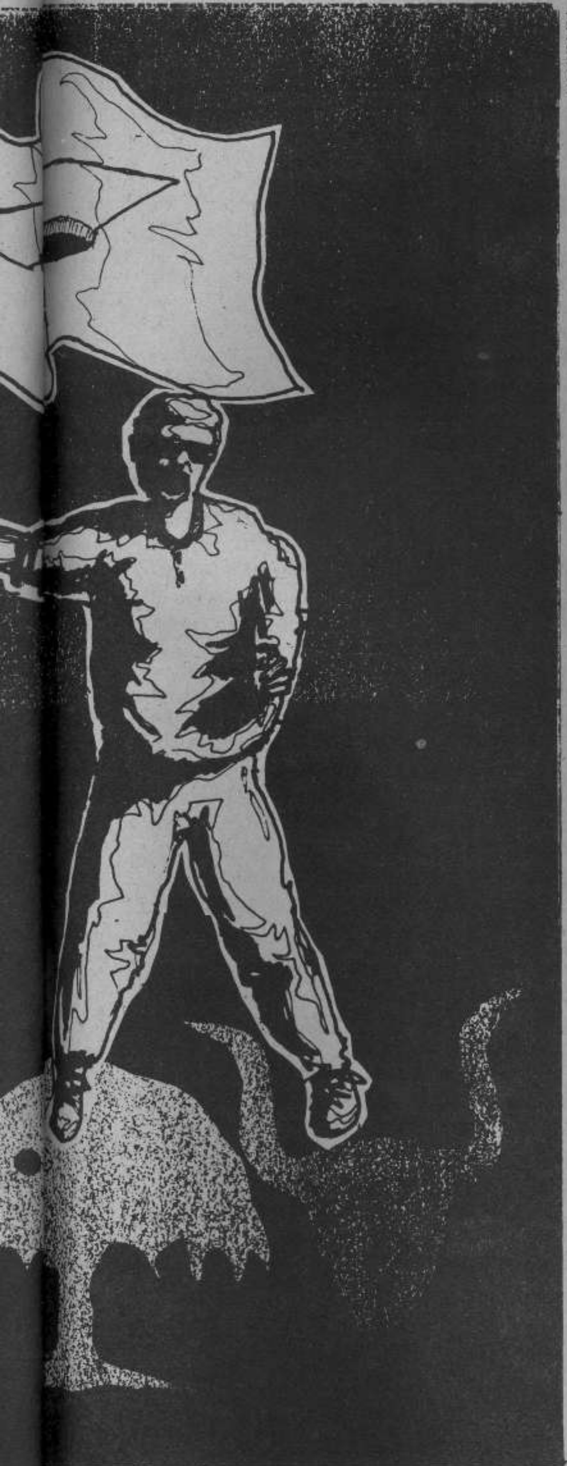
Salah satu OPP yang secara terus terang menyatakan niatnya itu ialah Golongan Karya. **Wahono**, Ketua DPP Golkar dalam sebuah Rakernas di Jakarta bulan Juni lalu mengatakan, bahwa Golkar ingin mengantongi 17 juta suara dari kalangan pemilih pemula yang tersebar di dunia pendidikan. Dua OPP yang lain tentu saja tak mau kalah. **Soerjadi**, Ketua DPP PDI, misalya ingin merangkul kalangan senat mahasiswa untuk maksud yang sama.

Berbagai tanggapan dari banyak pihak kemudian bermunculan. Koran-koran dan majalah tak pernah lepas dari pemberitaan dan artikel-artikel sekitar masalah tersebut. Fuad Hassan, orang yang mungkin paling berhak menanggapi pertamakali, karena dialah orang yang *mbaurekso* pendidikan di negeri ini, justru hanya bertutur kalem, "Asal mau, orang boleh saja masuk hotel *kek*, kampus *kek*, atau sembarang tempat. Persoalannya, apakah yang dimasuki mau?"

Pertanyaan Pak Menteri ini kemudian segera saja terjawab setelah rapat kerja rektor universitas/institut/sekolah tinggi negeri se-Indonesia usai. Para rektor itu ternyata mengeluarkan kesepakatan untuk tidak sepakat kalau OPP dibiarkan berkampanye di kampus-kampus mereka. Alasannya, kampus harus dibebaskan dari ajang untuk berpolitik praktis. Hanya kegiatan akademik yang layak dilakukan di kampus.

Kesepakatan itu memang tak begitu mengejutkan. Sebab alasan yang diajukanpun bukan hal yang baru. Memang anggapan dominan yang berkembang selama ini (selama orde baru) terhadap hubungan mahasiswa-kampus-politik adalah persis seperti apa yang

# MENYONGSONG PEMILU


M. ARIFIN

pernah dikemukakan oleh almarhum **Prof.Dr. Nugroho Notosoesanto,** yaitu institusionalisasi, profesionalisasi dan transpolitisasi. Ketiga konsep itu pada prinsipnya bermakna bahwa kampus harus didudukkan pada posisinya sebagai institusi ilmiah dengan mengembangkan kemampuan profesional di bidang akademis dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik. Uraian ini bisa diperpanjang lagi dengan pandangan bahwa pelibatan kampus dalam kegiatan politik hanya akan menyeretnya ke dalam konflik antar anggota masyarakat kampus, atau yang di masa lalu terjadi pada organisasi-organisasi mahasiswa ekstra.

Barangkali pandangan yang penuh kekhawatiran ini cukup beralasan kalau saja kondisi saat ini hampir sama dengan masa-masa sebelum orde baru, di mana organisasi-organisasi mahasiswa ekstra sebagian besar berafiliasi pada orpol tertentu. Akan tetapi, bukankah kondisi saat ini tidak demikian? Dan kalau mau jujur diakui, organisasi mahasiswa ekstra sekarang toh tidak segegap-gempita dulu lagi. Apalagi kalau kita tengok OPP itu sendiri. Sejak dicanangkannya asas tunggal, bukankah ketiga OPP berjajar rapi mengikuti asas yang sama?

Demikian pula seandainya ada rektor yang mengijinkan kampanye di kampusnya, tentunya bentuknyapun tak perlu sama dengan kampanye model kampung atau tipe lapangan bola. Di mana biasanya seorang orator milik salah satu OPP berteriak-teriak di tanah lapang agar 'aspirasi masyarakat' yang ditawarkannya disetujui dengan tepukan tangan yang riuh rendah. Namun mestinya dengan forum-forum yang lebih akademis, mungkin seminar, forum dialog, atau bentuk apa saja yang penting sesuai untuk masyarakat kampus yang ilmiah.

Sebenarnya terlepas dari disetujui atau tidaknya persoalan tersebut, ada baiknya kalau kita pulangkan masalah ini kepada mahasiswa itu sendiri. Awal Agustus lalu sebuah polling pendapat yang dimuat di harian Jawa Pos menunjukkan hasil yang cukup menarik. Mahasiswa yang menolak diadakannya kampanye di kampus ternyata cukup besar, yaitu 60 persen. Alasannyapun sederhana, agar tidak mengusik ketenangan kampus yang sudah tercipta selama ini. Meski beberapa kalangan memprihatinkan kondisi ini, namun apapun pendapat para mahasiswa itu sah-sah saja. Apalagi kalau mengingat mahasiswa sekarang ini adalah produk kondisi dan suasana kampus yang *adem ayem,* sebagai buah dari keberhasilan pelaksanaan konsep NKK-BKK sejak 1978. Sehingga, barangkali, menurut mereka akan sayang kalau kampus *"tata, titi, tentrem, kerta raharja"* ini 'tercemari' oleh kehadiran OPP di kampus-kampus.

Tetapi, bukankah NKK-BKK sudah tak dipakai lagi? Benar, sejak turunnya SK Mendikbud nomor 0457/1990 tentang kelembagaan mahasiswa di tingkat universitas, NKK-BKK sudah berganti menjadi SMPT (Senat Mahasaiswa Perguruan Tinggi). Meski ada yang *nyeletuk,* "SMPT adalah NKK-BKK ganti baju. Keluar dari kandang ayam masuk ke kandang merak!", namun apapun sebutan itu yang jelas ada perubahan suasana. *Eh,* siapa tahu di kandang yang baru bisa lebih dari sekedar makan, tidur, berak dan bertelur, tetapi juga bisa berhias diri. Dan lihatlah, orang-orang di luar kandang mulai terpesona bila memandang.

Lalu, ada kaitan apa sebenarnya antara 'suasana baru', mahasiswa baru, dan Pemilu. Bagaimanapun kehadiran mahasiswa baru kali ini memberikan warna tersendiri dalam sistem kelembagaan baru ini. Mereka adalah orang-orang yang *pure* dari pengaruh konsep-konsep lama. Apalagi ada tawaran untuk *mengkampanyei* mereka dari para peserta Pemilu. Bukankah itu suatu 'batu uji' yang menarik untuk dicobakan. Apakah dinamika kehidupan kemahasiswaan dikampus dalam konteks sosial-politik dapat diharapkan dengan munculnya sistem baru ini? Bagaimana pula hanya kemungkinan diwujudkannya pendidikan politik bagi mahasiswa, agar mereka tak 'buta' bila kelak masa baginya tiba? Kita akan dengan sabar menunggu bersama-sama.

Nah, lagi mahasiswa baru, "Selamat memasuki kampus baru, dan selamat ber Pemilu!".

**Abdul Rahman**

# MENUJU PEMILU BERKUALITAS: PERAN POLITIK KAUM MUDA

"Beri aku sepuluh pemuda revolusioner, maka akan kugoncangkan dunia!" teriak Bung Karno. Teriakan itu, yang memang membakar semangat pemuda, sekaligus menggambarkan betapa potensialnya kaum muda dalam percaturan politik. Pemuda sering menjadi ujung tombak, barisan terdepan --terlepas dari tunggang-menunggangi-- dalam gerakan pembaruan. Catatan-catatan sejarah telah membuktikan hal tersebut.

Tetapi bagaimanakah peran politik kaum muda masa Orde Baru ini -- terutama menjelang Pemilu 1992?. Dalam melihat peran tersebut menyangkut beberapa aspek yang berpengaruh antara lain strategi dan pengembangan generasi muda yang dilaksanakan pemerintah, pendidikan politik dan lingkungan sosial politik yang ada.

Beberapa pihak pernah mengkhawatirkan, seperti Arbi Sanit, kaum muda sekarang cenderung kepada sikap ketergantungan dalam berpolitik. Tak kurang dari Menpora sendiri mengatakan beberapa waktu lalu, kondisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memprihatinkan karena 50% lebih tinggal "organisasi papan nama". "Keterkaitan sejarah" mereka pada lembaga pemerintah dan organisasi politik tertentu, memojokkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menjadi "anak organisasi (Onderbow)" dengan semakin meniru pola kerja dan budaya organisasi "induk"-nya.

Namun di sisi lain, timbul gerakan-gerakan arus bawah yang ekstra-parlementer seperti Forum Demokrasi, Golongan Putih (Golput), dan kegiatan-kegiatan sejenis yang banyak didukung oleh kaum muda. Dengan demikian bagaimanakah kemandirian pemuda dalam berpolitik? Bagaimana pula proses sosialisasi dan pendidikan politik saat ini?. Untuk membahas hal tersebut **BALAIRUNG** menemui Ketua Umum DPP PPP **Ismail Hasan Metareum**, Ketua Umum DPP Golkar **Wahono**, Ketua Umum DPP PDI **Soerjadi**, Ketua Umum HMI **Ferry Musyidan Baldan**, Jenderal (Purn.) **Soemitro** serta Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **Abdul Hakim G. Nusantara.**

# NORMALISASI KEHIDUPAN DEMOKRASI

Salah satu fenomena yang muncul pada masa menjelang Pemilu adalah menguatnya kegiatan-kegiatan ekstra-parlementer atau ekstra konstitusional; dan diantara pelakunya adalah kaum muda juga. Fenomena ini merupakan suara dari sebagian besar atau *the silence majority* yang menginginkan perubahan. Perubahan kearah perbaikan atau adanya pembaharuan.

Alasan mereka sebenarnya cukup kuat, karena sejak tahun 1965 terdapat kendala politik dan *security*. Kendala politik saat itu adalh *digoroknya* Angkatan Darat; ini sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Kendala kedua, Angkatan Darat dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang sudah Nasakom; dimana yang dominan adalah komunisnya, bukan nasionalnya, bukan agamanya. Sehingga kita harus mengadakan kampanye *dekomunisasi* atau *denasakomisasi* karena Nasakom jadi konsep politik negara. Kita juga ingin menghilangkan iklim politik yang "saling bunuh", menghilangkan kecenderungan *sparatisme* dan *federalisme*, serta menciptakan kehidupan beragama yang penuh toleransi demi tercapainya stabilitas politik.

Dengan adanya kendala-kendala di atas segala sesuatu direkayasa dari atas. Rekayasa dari atas membawa konsekuensi "harga yang harus kita bayar," yaitu tidak normalnya kehidupan demokrasi seperti pemerintah yang dominan dan lembaga-lembaga politik tidak jalan. Tetapi sekarang keadaan sudah terkontrol, kita harus kembali ke kehidupan demokrasi yang normal agar lembaga demokrasi jalan.

Kalau dulu direkayasa dari atas prosesnya *top-down*, demokrasi yang normal prosesnya *bottom-up*. Pimpinan dipilih dari bawah oleh anggotanya. Presiden dipilih melalui *voting*, tidak ada musyawarah untuk mufakat dalam memilih orang. Berarti dalam MPR nanti, fraksi-fraksi tidak berlaku lagi; setiap anggota bebas memilih tanpa terikat suara fraksinya. Dulu pemerintah tidak terkontrol, tapi sekarang sudah ada *progress*, surat kabar sudah berani menulis. Kampanye keterbukaan yang dimulai DPR juga sudah mulai jalan.

Tahun 1993 proses *restructuring* sudah bisa dimulai. Partai politik harus mandiri, tidak ada memilih calon pemimpin tanya pemerintah. Budaya minta petunjuk hilang, Dewan Pembina hilang. Partai akan menjadi partai masak sehingga organisasinya sudah sampai ke desa, tanpa ada saling curiga dan saling memusuhi. Kita semua harus sadar bahwa perubahan itu perlu waktu, tidak bisa sekejap. Terjadinya krisis perlu dihindari, dan stabilitas politik selalu dijaga agar pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai gerakan yang sudah bagus menjadi *dhlewer*. Jangan ada yang memaksakan kehendak, karena esensi demokrasi adalah memberi kesempatan, bukan apriori. Sekarang waktunya untuk berpikir rasional.

Konsep massa mengambang perlu kita tinjau kembali. Adanya kebulatan tekad seperti dari Korpri, Dharma Wanita, dan lain-lain yang ramai-ramai ingin memenangkan Golkar, setelah 1993 tidak boleh ada lagi. Memang dalam setiap pemerintah perlu didukung oleh suatu *platform* politik tertentu agar tidak terjadi kefakuman dalam masa peralihan kepemimpinan. Tetapi Korpri tidak boleh menjadi alat organisasi politik tertentu, karena Korpri pada hakekatnya adalah birokrasi nasional. Birokrasi yang tidak politis, tapi bercirikan teknis adalah jaminan adanya efisiensi birokrasi.

Para pemuda dapat mengambil peranan dengan mulai membina diri sendiri, bukannya minta dibina terus. Kita harus buang citra-citra feodal. Pemuda jangan sampai latah, jangan hanya reaktif, tapi mereka dituntut untuk dapat memecahkan masalah secara rasional dan konsepsional. Katakan "ini aku, ini mauku," itulah pemuda; *know exactly what you want*. Pemuda harus dapat mengidentifikasi masalah: masalah apa yang ada sekarang yang punya arti strategis, bagaimana merumuskannya, bagaimana konsepnya.

Yang perlu kita persaingkan saat ini adalah konsep, visi, persepsi dan demonstrasi watak atau kepribadian. Dalam pendidikan politik, kita boleh beda pendapat, beda persepsi, beda organisasi, tapi tidak saling memusuhi, tidak mendiskreditkan secara pribadi, apalagi saling membunuh. Intii dari demokrasi adalah persaingan, itu yang paling penting. Tapi persaingan yang sehat dan tidak menghancurkan persaingan itu sendiri.

Selain itu kita harus terbuka dan jujur. Kalau pemuda sudah punya konsep, komunikasikan dan umumkan kepada yang berkepentingan. Undang bapak-bapak dari aparat pemerintah atau dari keamanan, ajak mereka bicara. Pemuda juga dapat masuk ke organisasi politik dan memperbaiki dari dalam, bikin bapak-bapak sungkan untuk berbuat salah, bikin mereka sungkan untuk tidak responsif.

Apa yang ada saat ini adalah pengaruh dari masa lalu. Pemuda adalah korban dari keadaan, dan keadaan itu harus dirubah.


Ustarmen JP

**Jenderal (Purn.) SOEMITRO**

**Wahyudi Marhaen  Riestianti  Ustarmen JP**

# MUNCULLAH NEW-WORLD FEODALISM

Pembinaan generasi muda sekarang diasumsikan menjurus kepada ketergantungan dari segi kepemimpinan dan program kerja adalah akibat dari kesalahan pengertian tentang Ormas. Semestinya Ormas dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk dari masyarakat dan tumbuh serta berkembang didalamnya. Sedangkan sekarang, pengertian Ormas lebih formal dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya, ketentuan untuk menjadi Ormas tingkat nasional dengan memenuhi persyaratan mencakup setengah jumlah propinsi plus satu, sudah sah menjadi Ormas tingkat nasional, walaupun tidak pernah dipersoalkan keanggotaannya.

Akibatnya, muncul ''*new-world feodalisme*'' dengan pimpinan yang tidak menguasai jaringan bawah sehingga Ormas hanya tinggal papan nama saja. Begitu juga kalangan elite Ormas pemuda adalah golongan yang *dekat* dengan lingkaran kekuasaan. Padahal kedekatan tidak menjamin persyaratan kepemimpinan yang sangat menentukan struktur kelembagaan bukan tuntutan-tuntutan yang tidak bisa dirasionalisir seperti kedekatan relasi dan ada koneksi. Sehingga tampak seperti sesuatu yang datang dari atas dan bersifat sangat tergantung. Kondisi kepemimpinan dan pola kerja sangat memprihatinkan. Begitu juga suara-suara mereka. Karena model pembentukan melihat kepentingan suatu kelompok, katakanlah partai politik, sehingga wajar ada yang diharpkan dari Ormas.

Seharusnya kehadiran Ormas memudahkan dalam sistem kenegaraan dengan mengangkat aspirasi masyarakat. Sekarang? Sekarang tidak, sehingga suara Ormas belum tentu merupakan suara masyarakat. Telah terjadi degradasi Ormas. Tetapi tidak pada kami yang berasal dari kampus. HMI tidak mempunyai kaitan dengan siapa pun dan kami tidak mengalami itu.

Ormas pemuda dewasa ini dapat saya kotak-kotakkan dalam kelompok yang sudah mandiri, bersemangat untuk mandiri dan tidak ingin mandiri. Karena saya melihat ada Ormas pemuda yang bersemangat untuk mandiri, namun di tengah jalan mengalami persoalan dan berobah. Ormas tersebut betul-betul tak ingin mandiri. Bisa dipahami, yang penting adalah bisa berdiri dan melaksanakan program kerja. Niscaya, *greget* Ormas akan hilang dan tak pernah ada. Padahal kemandirian adalah ukuran kepantasan kita menyebut sebuah organisasi sebagai Ormas.

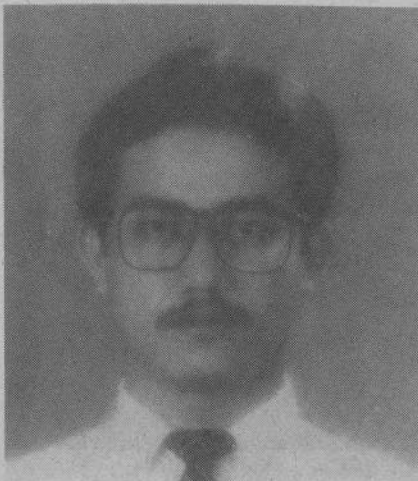
Karena itu kepemimpinan Ormas pemuda tidak bisa ditentukan dengan adanya kedekatan dengan struktur pemerintahan. Jangan menganggap kesempatan memimpin Ormas sebagai sebuah jalan. Itu adalah peluang, namun kepemimpinan kita harus diuji.

Pendidikan politik? Pemahaman pendidikan politik adalah keterjelasan semua keputusan politik pemerintah kepada masyarakat. Itu paling penting. Tanpa itu, pendidikan politik hanya perangkat formal adanya. Esensi pendidikan politik adalah penggodokan antara kehendak masyarakat dan kehendak pemerintah yang terumuskan. Sisi inilah yang belum ada sehingga kadang-kadang terkaburkan. Hanya kalangan masyarakat berpendidikan yang mulai merasakannya sehingga timbul sikap apriori. Di kalangan mereka yang pernah terlibat dengan birokrasi muncul kejenuhan. Semua ini mendamparkan kita kepada sikap apriori dan partisipasi operasional yang sangat praktis. Sehingga pemilu tidak dianggap sebagai peluang untuk menuju perbaikan. Hanya sikap memilih dan menusuk tanpa tahu artinya.

Sikap alamiah anak muda yang enerjetik, spontan dan menyuarakan pemikiran tanpa terhalang menyebabkan anak muda melihat figur yang representatif bukan partai politiknya. Repotnya sistem perwakilan kita yang sekarang memudahkan semua wakil terkatrol kekurangannya oleh kekuatan kelembagaan, sehingga ada jarak antara masyarakat dan perwakilan. Muncullah organisasi ekstra palimenter sebagai pertanda adanya rasa tidak percaya dan apriori terhadap sebuah lembaga. Kelak kehadiran organisasi ini dapat menyebabkan disfungsi DPR.

Setelah NKK/BKK pendidikan politik di kalangan anak muda sangat formal. Misalnya, kejadian kita mengundang seorang tokoh ke kampus dan tiba-tiba datang larangan tanpa kejelasan mengapa. Ini membuat kabur apa yang sebenarnya sedang terjadi di pemerintah. Pendidikan politik itu ada di lapangan bukan merupakan teori-teori yang diajarkan di ruang kuliah.

Menyinggung konsep massa mengambang, menurut saya itu hanya dipraktekkan di pedesaan. Di perkotaan itu tak terjadi karena sudah tidak ada keterbatasan komunikasi dan informasi. Lain di pedesaan jika tidak ada konsep massa mengambang akan hinggap perasaan khawatir dan ketakutan. Namun ini tidak terjadi hanya pada momentum pemilu, hampir semuanya.



ISTIMEWA

**FERRY MURSYIDAN BALDAN**
Ketua Umum HMI

**Retno Suprihatin**

**Nur Hidayat Islami Rusdianawati**

# GOLPUT TERLALU DIBESAR-BESARKAN

Berbagai kegiatan masyarakat yang berkembang dewasa ini seperti forum demokrasi, golongan putih (Golput) dan sejenisnya yang banyak didukung oleh kaum muda merupakan kegiatan yang wajar saja. Sebab, harus dipahami bahwa pembangunan politik bangsa itu bukan hanya merupakan tugas pemerintah atau kekuatan Organisasi Kekuatan Sosial Politik saja. Tetapi masyarakat juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam politik bangsa.

Karena itu, sebetulnya semangat UU no. 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan, sesungguhnya menghendaki agar bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan politik itu dapat berkembang. Gerakan, ormas, maupun forum akan bernilai positif dan konstruktif bila menyumbang pada kokohnya sistem politik yang kita anut dengan memberikan alternatif-alternatif yang "segar".

Hanya saja masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis karena menurut undang-undang kegiatan politik praktis itu dilakukan oleh Parpol dan Golkar. Tapi kalau kegiatan politik seperti melaksanakan pendidikan politik misalnya P4, memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana pembangunan politik dilaksanakan, penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, ya, tentunya hal-hal itu sangat diperlukan.

Jadi menurut saya, fenomena kegiatan masyarakat tersebut bukan karena menjelang Pemilu, tetapi merupakan keberhasilan pembangunan politik Orde Baru selama ini. Itu juga menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang peran sertanya dalam bidang politik semakin meningkat.

Sedangkan mengenai Golput, itu suatu istilah yang dibesar-besarkan saja. Sebab istilah ini muncul dan santer pada saat Pemilu 1978 maupun Pemilu 1982 oleh segelintir orang muda di kampus. Sekarang mereka sudah selesai studi, dan umur mereka sudah bertambah. Bahkan diantara mereka sudah sadar dan ikut Pemilu. Tapi terlanjur istilah ini pernah populer, terkadang setiap Pemilu isu Golput selalu diasosiasikan dengan gerakan anak muda dan di kampus. Padahal yang benar adalah memang sebagian dari mahasiswa itu adalah Pemilih Perdana, yang belum menggunakan hak pilihnya sama sekali, tetapi itu bukan berarti Golput. Mana mungkin ada Golput sebab prosentase yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 1987 lalu, itu sebesar 94 persen lebih. Dan sisanya itu bisa saja karena sakit, meninggal, pindah tempat tinggal tapi belum sempat mengurus surat pindahnya dan lain sebagainya.

Sebaiknya kita perlu menyamakan pandangan kita tentang Pemilu. Yaitu suatu peristiwa nasional yang konstitusional dan berlangsung dalam setiap kurun lima tahun, dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan bangsa. Nah, kalau ditanya konsep peran politik pemuda, maka Golkar memandang bahwa Pemilu selain sebagai arena perebutan perolehan suara, juga sebagai media pendidikan politik bangsa. Sebagai arena perebutan perolehan suara, maka peran politik yang harus dilakukan, yaitu pemuda harus menggunakan hak pilihnya secara LUBER. Sedangkan sebagai media pendidikan politik bangsa, maka peran pemuda diharapkan ikut meningkatkan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dengan partisipasinya yang bertanggung jawab.

Pembinaan generasi muda sekarang dikatakan menjurus kepada ketergantungan? Apa ukurannya? Sebab berkat pembangunan orde baru ini, peran pemuda telah menerobos berbagai lapangan kehidupan. Misalnya ada yang bergerak dibidang bisnis, penelitian, dosen, LSM, Politik, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menilai pemuda, maka coba kita lihat gerakan kepemudaan dalam berbagai profesi itu.

Menurut saya, pemuda-pemuda itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemandirian serta keterampilan dalam bidangnya. Dalam melaksanakan kegiatan di bidangnya masing-masing itu terkadang ada keterkaitan dengan program-program pemerintah, sehingga diperlukan konsultasi, program bersama, dan sebagainya. Itu tidak dapat kita artikan sebagai ketergantungan. Sebab salah satu ciri ketergantungan itu tidak ada inisiatif, tidak ada prakarsa. Padahal pemuda kita sekarang ini banyak sekali inisiatif dan prakarsanya. Mengenai apa yang dikatakan oleh Menpora maupun Arbi Sanir, nah silahkan anda tanyakan saja ke mereka.

Karena pikiran dan pandangan saya tentang pemuda seperti di atas, maka konsep Golkar adalah mendorong pemuda-pemuda itu untuk menjaga kepercayaan dirinya, kemandirian serta kualitas kerja menurut profesinya masing-masing. Sebab dorongan yang seperti itu akan memberikan arti yang sangat positif bagi pendidikan politik bangsa, yaitu kita ingin menciptakan bangsa yang memiliki rasa percaya diri dan kemandirian. Kemandirian generasi muda sekarang cukup baik. Saya harap agar kita menilai generasi muda sekarang dengan ukuran-ukuran yang sekarang. Jangan dengan ukuran-ukuran masa lalu, apalagi masa depan. Ya . . . keliru!.


ISTIMEWA

**WAHONO**
Ketua Umum DPP GOLKAR

**Nur Hidayat**

# REKAYASA ITU PASTI ADA



ISTIMEWA

**Drs. SOERJADI**
Ketua Umum DPP PDI

Ada asumsi yang menyatakan bahwa menjelang pemilu ini, gerakan-gerakan ekstra parlementer, seperti Forum Demokrasi, golput, dan gerakan lainnya yang sejenis makin menguat dan mendapat dukungan dari generasi muda. Saya tidak sependapat dengan asumsi ini. Karena, kalau kita bicara generasi muda, jumlahnya 60 juta jiwa. Terus yang terlibat dengan Forum Demokrasi dan golput itu berapa orang?

Kalau Golput, itu jelas bagian dari proses pemilu. Tapi kalau seperti Forum Demokrasi, saya tidak melihatnya harus terkait dengan pemilu. Karena di situ memang hanya berbicara mengenai masalah pengangguran dalam paham kebangsaan, misalnya primordialisme yang berkembang, dan sebagainya. Kalau kita baca penjelasan dari pemrakaras Forum Demokrasi, saya tidak melihat ada konteksnya dengan pemilu.

Kemudian masalah generasi muda, secara kuantitatif saya pikir generalisasinya terlalu jauh. Kalau ingin lebih mempersulit masalah barang kali bisa, yakni generasi muda yang di kampus, atau di mana. Tapi apakah itu mewakili generasi muda Indonesia secara umum? Ini bukan hanya satu masalah yang perlu dikaji, tapi barangkali terlalu jauh. Namun, mereka memang tidak bisa sematamata ditangkap secara kuantitatif saja.

Sekarang kita melihat masalah itu secara kualitatif. Ada kecenderungan orang-orang muda yang masuk dalam kelompok intelektual atau yang mempersiapkan diri menjadi intelektual, memang sejak dulu, ada inisiatif-inisiatif yang tidak sejalan dengan establisment, ataupun dengan status quo hal-hal yang sudah mapan. Dan ini wajar, bukan hanya di Indonesia. Hanya seberapa jauh gaung dari langkah-langkah seperti ini?

Adanya kelompok masyarakat dan generasi muda yang seperti ini memang perlu, untuk bisa menyadarkan kepada semua pihak, bahwa ada peringatan-peringatan. Nah, saya ingin menangkap masalah ini sebagai persoalan yang kualitatif sifatnya, yakni semacam peringatan dari sekelompok anak muda yang menggunakan akal sehatnya, kemampuan berfikirnya dan tentu saja menggunakan hati nuraninya, untuk melihat keadaan yang sesungguhnya.

Yang harus kita tangkap sebenarnya bukan ketidakikutan mereka dalam proses pemilu, tapi reasoning apa, motivasi apa yang membawa mereka ini kepada kesimpulan seperti itu. Kalau reasoningnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kita tidak berani dengan jujur mengakui kebenaran itu.

Mengenai pendidikan politik, kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda, dalam kaitannya dengan hasil pendidikan politik itu. Kalau kita lihat dari segi konsepsional normatif, kita melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat, memberikan pengertian akan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga negara. Setelah mereka meningkat kesadaran politiknya, kita harap mereka mampu meningkatkan bobot secara subyektif, bobot dari kehidupan demokrasi, bobot terhadap kehidupan lembaga-lembaga kehidupan demokrasi, sehingga tentu saja mereka akan melewati jalur yang normatif.

Sementara kalau kita lihat dari segi material substansial, kesadaran politik dan tanggung jawab politik tidak selalu terkait dengan norma-norma yang ada. Orang bisa mempunyai kesadaran politik yang tinggi tanpa harus melewati lembaga-lembaga formal. Yang ini kemudian eksistensinya, aktualisasinya juga tidak mengikuti alur yang normatif. Tapi tidak berarti dimensi yang substansial ini lalu kita anggap mbalelo, menentang, melanggar. Kecuali kalau dia terus memberontak, atau tidak mau membayar pajak, itu sudah lain urusannya. Selama masih berkaitan dengan komitmen terhadap nilai tersebut dan tidak melanggar aturan, ya boleh-boleh saja.

Masalah pokok dalam pendidikan politik pada dasarnya adalah keadaan dari dalam diri sendiri, kemudian inisiatif dari dalam diri sendiri, dan kreativitas. Jadi tergantung, dia merasa itu sebagai tugas, kewajiban atau panggilan. Saya tidak mengharapkan akan lahir seorang yang punya kesadaran politik dari proses seperti penataran, tanpa ada inisiatif dari yang bersangkutan. Penataran P-4 sebagai suatu kewajiban misalnya, jangan harap ini akan mampu meningkatkan kesadaran politik, karena dia mengikuti bukan untuk pendidikan politik, tapi syarat untuk mengikuti kerja.

Pemerintah sebenarnya adalah pencerminan political will dari pemegang kekuasaan politik, untuk merekayasa suatu program. Barangkali takut pemuda itu terlalu dinamis dan ekstrim, lalu direkayasa. Jangan artikan rekayasa sebagai suatu yang negatif. Rekayasa itu netral. Sama saja dengan kebulatan tekad. Ini wajar, tapi konotasinya menjadi negatif. Karena apa? Ada manipulasi. Jadi, rekayasa itu pasti ada. Di dunia mana ada gerak masyarakat atau gerak politik yang tidak direkayasa. Hanya seberapa jauh rekayasa itu mengandung nilai-nilai dan dasar-dasar yang obyektif. Sebab ada rekayasa yang dipaksakan dan ada yang berdasarkan gerak masyarakat.

Rekayasa dari atas yang tidak didorong untuk masuk pada kesadaran rakyat, akan selalu membawa dampak kesenjangan. Dari rekayasa itu memang akan menghasilkan ketergantungan. Potensi dinamik yang ada pada generasi muda, memang tidak mendapatkan wahana, iklim dan kondisi yang menyebabkan kreativitas dapat berkembang dengan penuh.

**Hesty D. Lestari  Nur Hidayat**

# PEMBANGUNAN YES, POLITIK NO!

Bahwa pada setiap zaman kaum mudanya selalu berperanan dalam perjuangan di berbagai bidang tidak pernah saya nafikan. Kemurnian pemikiran pemuda dimanifestasikan dalam semangat perjuangan kepemudaan yang mana dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula nilai semangat kepemudaannya.

Golput, saya melihat dari satu segi, merupakan manifestasi kesucian dalam pengertian kurang sependapat dengan situasi dan berusaha mencerminkannya. Sayangnya, saya tidak yakin yang digelari Golput itu hanya pada kaum muda saja. Sebab yang mendorong pemuda bukanlah pemuda. Melihat kembali pada zaman proklamasi, umumnya tokoh generasi muda tampil ke depan terkecuali tokoh generasi tua yang di"tua"kan demi kepentingan masyarakat banyak. Pemuda yang berjiwa muda dan bersemangat tersebut tampil dan bergerak. Padahal belum tentu langkah-langkah tersebut mereka sendiri yang mempelopori. Ada golongan tua yang frustasi kemudian mendorong pemuda untuk bergerak. Ini menjadi kebiasaan. Sehingga seolah-olah pemudalah pelopor Golput.

Langkah-langkah ekstra-konstitusional merupakan salah satu gejala masyarakat yang tidak puas. Disayangkan karena tempo-tempo gejala serupa ini dimanfaatkan sebagian orang pintar sehingga ditimpakkan kepada pemuda. Sungguh, pelaksananya adalah seorang yang bersemangat dan tidak takut. Itu ciri orang muda. Orang tua perlu berpikir-pikir dahulu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa generasi mudalah yang melaksanakan kegiatan ekstrakonstitusional karena ini bukan suatu gejala umum. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan Forum Demokrasi. Saya melihat Forum Demokrasi bukan sebagai langkah ekstrakonstitusional tetapi masih bergerak dalam kemungkinan yang ada. Hanya sasarannya barangkali bisa lebih dan bisa kurang, dalam arti pemikiran umum bisa disadurkan oleh mereka.

Ada pemikiran umum yang menginginkan demokratisasi dan dipadu dengan kehendak pejabat-pejabat pemerintah yang menginginkan situasi lebih demokratis. Gejala ini dimanfaatkan oleh segolongan yang tidak bisa disebut pemuda dan Forum Demokrasi menggunakan peluang yang ada dari hasrat masyarakat.

Masyarakat sudah diusahakan pendidikan politiknya. Na'asnya, ada kekeliruan pada kita, pendidikan politik diarahkan ke soal "tabu". Seolah-olah politik itu tabu dan kotor dan berslogan "Pembangunan Yes, Politik No!". Kelihatannya politik bukan pembangunan. Bagaimana pendidikan politik dilaksanakan jika ia dianggap bukan pembangunan? Akibatnya pendidikan politik tidak bisa sempurna. Sampai saat ini ada beberapa daerah yang mengecap wilayah mereka sebagai daerah bebas partai. Apa artinya?

Ini rekayasa pemimpin masyarakat baik yang formal maupun non-formal. Langkah yang Parpol ambil adalah memberikan pendidikan politik kepada pemimpin masyarakat lebih dulu sebelum kepada rakyatnya. Pendidikan politik memang harus diluruskan kembali. Tidak cukup hanya penataran P-4 selama ini, karena tidak sepenuhnya berisi pendidikan politik. Pokoknya, pejabat atau kader dan Orsospol harus punya basis yang sama agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengakibatkan depolitisasi.

Sebaliknya, saya tidak keberatan dengan konsepsi massa mengambang walaupun ini adalah kelemahan dari sistem yang sudah kita pilih. Akibatnya tidak semua parpol masukke desa dan memudahkan adanya tindakan mempengaruhi untuk *apolitis*. Sebenarnya massa mengambang berlaku untuk Parpol.

Tradisi mengkonvensikan anak muda menonton orang tua. Sehingga ada organisasi pemuda yang dibentuk oleh golongan tua dan berorientasi serta tergantung pada mereka. Ini tentu berdasarkan pemikiran akan mendapatkan sesuatu. Kalau patriotisme ada dalam dirinya, ia tentu tidak akan berhitung 10 – 11. Pengertiannya membeli 10 kemudian menjual 11 dan mendapat keuntungan 1 perak. Materialistis. Sikap ini tidak ada pada organisasi yang bermula dari idealisme pemuda dan tumbuh dari bawah. Perlu orientasi sikap pemuda.

Pernah seorang pemuda datang pada saya bertanya," Bagaimana masa depan kami?". Saya menjawab," Saudara mau apa?". Hanya pemuda yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan kemurnian semangat seorang pemuda.



ISTIMEWA

**ISMAIL HASSAN METAREUM**
Ketua Umum DPP PPP

**Retno Suprihatin Nur Hidayat Rusdianawati**

# PEMBINAAN POLITIK YANG PATER NALISTIK

Melihat fenomena akhir-akhir ini, yaitu munculnya gerakan-gerakan ekstra parlementer seperti Forum Demokrasi, Golput, dan diskusi-diskusi, yang banyak didukung kaum muda, memang ada semacam tuntutan atau keinginan perubahan di bidang politik. Format politik sekarang ini dinilai membatasi hak-hak politik masyarakat khususnya hak berorganisasi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan berperan dalam pembangunan.

Kenapa? Karena kaum muda seperti yang dikemukakan tokoh atau intelektual muda, melihat lemahnya kontrol politik yang dilakukan DPR. Juga kuatnya peranan birokrasi dalam mengontrol proses penyusunan dan pengisian lembaga politik yang ada. Kaum muda melihat ada kelemahan UU Pemilu dan UU Kepartaian yang berpengaruh pada kualitas DPR dan kualitas Pemilu.

Ada alasan yang sah bagi kaum muda untuk menuntut perubahan itu. Mereka menyaksikan bahwa sistem sekarang ini, yang oleh para pendukungnya sebagai sistem yang menjamin stabilitas, jelas mempunyai keterbatas-keterbatasan. Seperti kita lihat, sistem sekarang bersifat korporatif yang membatasi hak-hak asasi rakyat sehingga begitu banyak peristiwa-peristiwa penyalahgunaan kekuasaan yang tidak cukup bisa diredam oleh sistem ini.

Karena apa? Karena sistem ini mengesampingkan peran rakyat dalam proses politik. Keikutsertaan rakyat dalam politik hanya dalam Pemilu saja. Itu disebut mereka sebagai pesta demokrasi. Misalnya kalau anda ingin berpolitik, ya, masuk partai. Itu kan pembatasan politik. Politik diartikan sebagai penusuk gambar, diartikan menjadi anggota partai. Politik dengan demikian menjadi saremonial, menjadi elitis. Padahal politik itu berkaitan dengan kehidupan rakyat, berkaitan dengan kontrol kekuasaan sehari-hari. Politik harus dalam pengertian perlunya rakyat turut serta mengontrol *policy making process, policy implementation process.*

Alasan yang lain adalah begitu banyak policy di bidang pembangunan yang tidak merespon kebutuhan masyarakat. Sistem politik sekarang ini melemahkan *bargaining* rakyat terhadap kekuasaan, terhadap pemilik modal, sehingga yang bisa turut menikmati sistem ini hanya birokrasi kalangan atas, pemilik modal dan elit partai politik yang jumlahnya sangat sedikit. Dan kalau kita mau jujur, yang namanya partai politik sekarang belum merupakan partai politik sesungguhnya karena partai itu sama sekali tidak mandiri. Ketigatiganya dibawah kontrol birokrasi semua. Akibatnya apa? Akibatnya anda lihat tidak ada kontrol rakyat terhadap proses pembangunan, proses industrialisasi. Jadi tuntutan-tuntutan kaum muda ini mendapat landasan yang sah.

Bagaimana kaum muda menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut berkaitan erat dengan kematangannya berpolitik. Namun harus diingat bahwa kematangan berpolitik kaum muda bukan diukur di jabatan apa, sekolah apa, tapi diukur dari sejauh mana dia memahami persoalan-persoalan masyarakat sendiri dan mengekspresikan, mengartikulasikan dalam konsep-konsep yang kritis, *workable*, yang dipakai sebagai dasar untuk lobi, untuk mempengaruhi proses politik.

Masalahnya adalah sampai seberapa jauh, menurut saya, kaum muda sekarang itu harus berani membaca secara jujur realita masyarakat, merenungkan, mengkonseptualisir dan mengartikulasikan ke depan pusat-pusat kekuasaan atau setidak-tidaknya forum politik resmi.

Tentang pembinaan politik bagi kaum muda oleh pemerintah, perlu dipertanyakan dulu: pembinaan politik itu apa? Bagaimana dipraktekkan? Dalam kenyataannya, pembinaan tersebut dipraktekkan dalam bentuk hubungan-hubungan yang bersifat paternalistik. Pemuda menjadi klien dari yang lebih tua dimana yang tua mengontrol yang muda; dimana pemerintah dalam membina politik menganggap dirinya selalu benar dan kaum muda selalu dikontrol dan diarahkan menurut kemauan yang mengarahkan. Jadi makna pembinaan politik itu diartikan sebagai hubungan yang paternalistik. Terang saja paternalistik itu memang menghasilkan ketergantungan. Dan itu tidak membuat kehidupan politik yang sehat.

Pendidikan politik kaum muda adalah memberikan peluang bagi kaum muda untuk mengembangkan pikiran, kreativitas, mengekspresikan kepeduliannya, lewat aksi-aksi konkret. Itu baru *political education.* Yang terjadi sekarang tidak demikian. Memakai paternalistik *approach* seperti yang sekarang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan politik yang akan datang, juga persepsi dan wawasan kaum muda.

Kita kan ingin pemuda yang mandiri. kreatif, merdeka yang berani mengambil resiko. Saya optimis dengan kemandirian pemuda saat ini. Dengan demikian, maka yang diperlukan adalah peluang, memfasilitasi, agar kaum muda berkembaang potensinya. Untuk itu tidak mungkin digunakan sifat paternalistik. Pendekatan yang digunakan harus didasarkan kesetaraan dialogis, mutual kritis. Harus begitu!


ISTIMEWA

**ABDUL HAKIM G. NUSANTARA**
Ketua Yayasan LBH

**Nur Hidayat**

# ADA DISKRIMINASI POLITIK

Generasi muda aktif dalam politik tidak terlepas dari pendidikan politik ini *berpengaruh pada Pemilu:* mau *nggak* untuk memilih. Dan kalau memilih, apakah mereka benar-benar diberikan kebebasan untuk memilih? Benar-benar LUBER? Karena, Menteri Dalam Negeri menginginkan pemilu yang akan datang, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti pemilu tahun-tahun sebelumnya kurang baik. Untuk itu perlu diadakan peningkatan.

Pemilu yang akan datang, bukan 1992 saja, tapi juga 1997 mudah-mudahan akan lebih baik. Karena, saya melihat belum mulai Pemilu, jauh-jauh hari sudah ada kampanye. Formulir pendaftaran *kok* namanya kartu kuning? Ini sungguh saya pertanyakan, walaupun itu sudah disahkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Kita juga tahu bahwa masing-masing OPP punya identitas. Kuning identik dengan Golkar, Hijau identik dengan PPP dan merah identik dengan PDI. Jadi, kalau bisa pemilu yang akan datang, 97 nanti kartu itu netral, kotak pemilihannya juga netral, jangan ada satu warna identik dengan OPP.

Kalau tingkat LUBERnya makin baik saya kira partisipasi generasi muda dalam pemilu lebih antusias lagi, dan mereka juga akan menilai bagaimana hasil-hasil kerja OPP selama lima tahun yang lalu. Kalau terlihat prestasinya kurang baik, mungkin saja pemilih-pemilih muda akan apatis. Mereka mungkin bukannya golput, tapi bisa saja mereka coblos semuanya agar abstain. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apakah selama ini *pendidikan politik* telah dilaksanakan dengan baik? Saya kira pendidikan politik sudah berjalan tapi belum bisa dikatakan baik, karena saya melihat mengalami sendiri sebagai seorang generasi muda. Kalau suatu daerah PPP yang menang pasti jalannya jelek, listrik tidak masuk apalagi fasilitas yang lain. Tapi kalau suatu daerah Golkar yang menang, pasti sebaliknya. Nah ini gejala-gejala yang tidak baik yang merupakan contoh pendidikan politik. Pendidikan politik bukannya memanggil orang di suatu tempat, lalu penataran begini, begitu. Yang efektif adalah bagaimana memberikan contoh yang baik. Warga yang konsisten memilih PPP, listrik hampir tidak masuk di desanya, jalannya tidak rata. Kita jangan lupa mereka pun pembayar pajak, mereka juga punya andil dalam republik ini, mereka juga ikut menjaminkan dirinya sebagai komponen rakyat Indonesia yang menerima hutang luar negeri.

Berkaitan dengan pendidikan politik seperti itu, saya ingin keadaan ini bisa berubah. Mari kita membangun bersama-sama. Masing-masing rakyat punya hak untuk hidup layak, masing-masing punya hak untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan UUD '45. Mudah-mudahan untuk masa-masa mendatang kita bisa menuju ke arah sana.

Sedangkan bila kita melihat keadaan organisasi-organisasi pemuda saat ini, ada yang berasumsi bahwa organisasi-organisasi tersebut sedang menuju ke arah ketergantungan. Bahkan ada yang tinggal papan nama saja, serta mengidap penyakit feodalisme, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya pikir generasi-generasi tua yang sampai sekarang belum menyerahkan tongkat estafet, masih transisi, mereka dulu dididik berdasarkan alam feodalisme, karena kebiasaan itu mereka membawanya sampai sekarang. Mereka berbeda dengan angkatan kita. Kita generasi muda, yang namanya generasi muda kan anak, anak biasanya mengikuti perilaku orangtua, mereka belajar dari orangtua, lahir dari orangtua, jadi kita tidak bisa salahkan generasi muda sendiri.

Tentang organisasi pemuda yang dibiasakan berjalan selalu dengan restu, jangan harap mereka akan mandiri. Dari ketidakmandirian ini kita bisa melihat lebih jauh lagi tentang aktivitas mereka. Misalnya saja dalam usaha pembinaan organisasi pemuda, seharusnya mereka memiliki dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi tidak ditangani langsung oleh lembaga tertentu. Bagaimana kalau terjadi ketidak beresan dalam pengelolaannya? Serahkan saja pada mereka untuk mempertanggungjawabkannya. Itu merupakan suatu resiko kalau memang benar-benar organisasi pemuda kita mau mandiri. Jangankan organisasi pemuda, Partai Politik dan Golkar dalam membangun kehidupan politik sampai saat ini dana operasionalnya belum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mereka hanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Lagi pula generasi muda sekarang banyak yang tidak antusias untuk berorganisasi. Generasi sekarang generasi cuek. Generasi cuek itu terbentuk karena apa? Langsung atau tidak langsung keterlibatan lingkungan juga turut membentuk. Lingkungan itu bukan saja lingkungan keluarga, tetangga, tapi juga pemerintah harus terlibat. Mau dibawa ke mana pembinaan generasi mua itu? Apa mau dibiarkan terus seperti ini.


ISTIMEWA

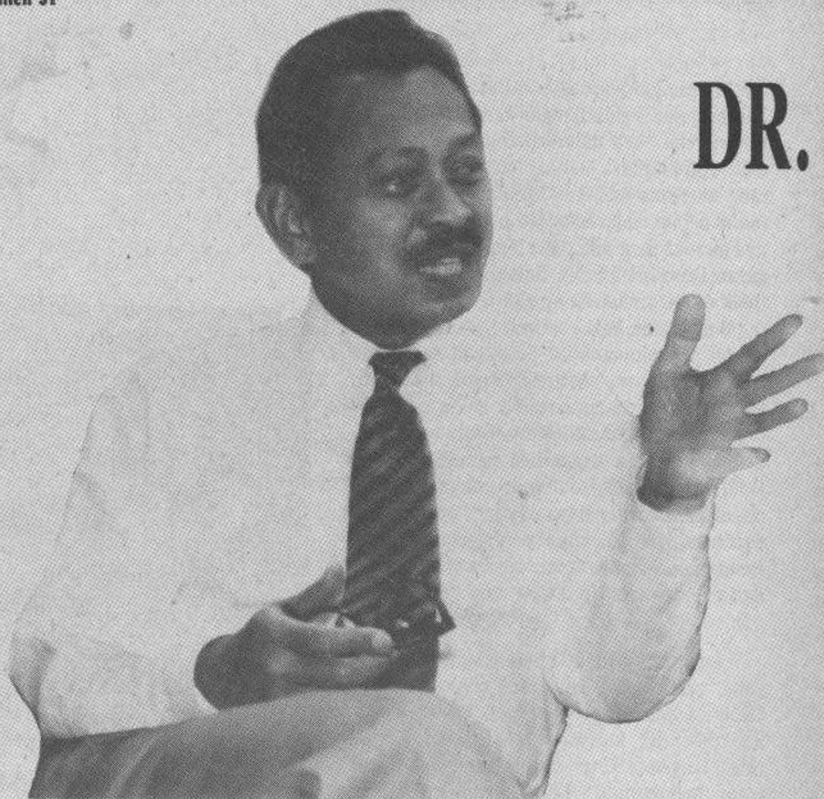
**M. HUSSEN NARO**
Anggota DPR PPP

**Rifa'i Arfan Nur Hidayat Islami Rusdianawati**



Ustarmen JP

# IR. WARDIJASA



Nur Hidayat

# DR. SISWANTO SUDOMO

# "KITA MEMASUKI ERA GLOBALISASI"


Ustarmen JP

Kerjasama perguruan tinggi, industri dan lembaga penelitian harus dirancang agar ada keseimbangan.

Kita berusaha menguasai bidang industri. Kalau kita kuasai, teknologi nggak tergantung lagi. Kita harus kerja keras.

Semangatnya untuk jadi guru tak pernah pupus, meski ia pernah dua kali tidak diterima di sekolah guru. Kalau saja waktu itu ia diterima, mungkin ceritanya akan lain. Mungkin tidak akan pernah kita temui seorang **Ir. Wardijasa, Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar.** Benar apa kata pepatah, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalannya masuk sekolah guru justru membuka peluang baginya, untuk meniti karir ke posisi yang cukup tinggi di jajaran Departemen Perindustrian RI saat ini.

Lahir di Temanggung tanggal 11 September 1936, Wardijasa menamatkan Sekolah Dasar di Muntung – Ngadirejo, Jawa Tengah pada tahun 1951. Atas anjuran orang tuanya, ia kemudian mendaftar ke Sekolah Guru B (Sekolah Guru SD). "Tapi *ora ketompo*". Karenanya ia terpaksa masuk SMP di Temanggung, dan berhasil menamatkannya pada tahun 1953. Masih dicobanya lagi masuk sekolah guru, kali ini Sekolah Guru A (Sekolah Guru SMP). Tapi lagi-lagi tidak diterima. Akhirnya ia memutuskan masuk SMA di Magelang.

Mengapa begitu menggebu ingin menjadi guru? "Karena banyak keluarga yang jadi guru. Ayah saya sendiri petani. Selain itu, karena waktu itu sekolah guru diberi ikatan dinas, jadi sangat menarik bagi kami yang dari kalangan terbatas," demikian ia menjelaskan.

Selepas SMA tahun 1956, ia hijrah ke Yogya, meneruskan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada. Sempat beberapa bulan kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian pindah ke Fakultas Teknik. "Sekolah kedokteran itu *angel*. Nah, dulu pindah fakultas gampang banget. Saya lihat di Fakultas Teknik diberikan ikatan dinas. Ya sudah pindah ke sana," begitu alasannya mengapa pindah ke Fakultas Teknik.

Di Fakultas Teknik, ia memilih jurusan teknik kimia. Selama mahasiswa menjadi asisten dosen, sehingga pada saat itu ia sudah mandiri. Lulus tahun 1960, ia terbilang cepat menamatkan kuliahnya, yakni dalam jangka waktu 4 tahun saja. Setelah menyandang gelar insinyur, ia coba mengikuti tes untuk bisa dikirim ke Kanada, dan lulus. Selama 2 tahun ia mengenyam pendidikan di Nova Scotia Technical College Halifax, Canada.

Pulang ke tanah air tahun 1962, langsung menjadi dosen di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia UGM. Terealisasi sudah citacitanya menjadi guru. Ia bahkan menjadi Tenaga Pengajar Luar Biasa di AKABRI, Akademi Gula Negara, PTPN, dan IKIP Teknik, hingga tahun 1966, ketika diminta untuk bekerja di PT PUSRI.

Selama 20 tahun mengemban tugas di PT PUSRI, dan terakhir memangku jabatan sebagai Direktur Produksi PT PUSRI. Maka wajar saja kalau ia mendapatkan penghargaan Sewindu/Dwiwindu Bhakti Kerja dari PT PUSRI. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari Ketua KADIN pada tahun 1986, dan pada tahun 1988, mendapat penghargaan Satya Lancana Pembangunan dari Presiden RI.

Dari PT PUSRI ia ditarik ke PT Pupuk Kujang dan menjabat sebagai Direktur Utama, hingga Maret 1990. Dan sejak 25 Pebruari 1989 hingga sekarang, dipercaya menjadi Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar.

Perjalanan karirnya bisa dibilang amat mulus. Toh ia tetap terkesan sederhana, dan masih memiliki sifat UGM yang *low profile*. Keluarganya bisa dibilang keluarga UGM tulen. Istrinya, Ir. Endang Sri Redjeki, yang disunting tahun 1963, juga lulusan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia UGM. Mereka kini dikaruniai tiga orang putra, yakni Ir. Widyatmono, Ir. Retno Rahmayani, dan Dra. Med. Widyastuti. "Anak saya semua lulusan UGM. Yang sulung dari Teknik Elektro, yang kedua dari Teknik Kimia, dan yang bungsu dari Kedokteran," begitu penuturan Ir. Wardijasa pada suatu pagi, ketika BALAIRUNG menemuinya di kantornya yang nyaman.


Ustarmen JP

Berikut adalah petikan wawancara dengannya, yang dirangkum oleh Hesty D. Lestari menjadi tulisan yang tengah anda simak.

**Sebagai alumni, bagaimana Bapak melihat UGM saat ini?**

UGM baik. Saya kira tentang lingkungan dan kehidupan di Yogya, juga tenaga-tenaga dari UGM, pada umumnya mereka cukup baik.

**Pendidikan sekarang ini diasumsikan sering ketinggalan dengan perkembangan iptek di luar. Seringkali inovasi iptek justru terjadi di luar dinding-dinding perguruan tinggi.**

Memang benar saya kira. Terutama dengan adanya pabrik-pabrik yang canggih dan industri-industri yang canggih, tentu ini juga membawa teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih ini, dalam aplikasinya, hanya kita temui dalam industri-industri yang menggunakan teknologi canggih itu tadi. Tentu saja dengan pengalaman ini, tenaga-tenaga yang melaksanakan kegiatan di industri tersebut akan terbawa juga. Sedangkan di perguruan tinggi, pada umumnya kita hanya studi dari literatur-literatur dan sebagainya. Oleh karena itu maka kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri dan lembaga-lembaga penelitian itu harus dirancang, agar ada keseimbangan. Kerjasama ini bisa dalam bentuk, misalnya perguruan tinggi melaksanakan kuliah kerja ke industri, atau tenaga-tenaga dosen mengadakan kunjungan ke industri-industri yang menggunakan teknologi canggih. Di samping itu, industri-industri yang mempunyai tenaga ahli juga bisa diminta untuk diundang sebagai dosen tamu.

**Selama ini sudah ada usaha ke arah sana?**

Sudah, sudah berjalan, tapi memang masih harus diintensifkan dan ditingkatkan, juga dengan lembaga-lembaga penelitian. Kalau saya melihat lembaga penelitian dari sisi industri, ini harus diarahkan kepada penelitian-penelitian yang sejalan dengan pola pengembangan industri nasional kita. Jadi dalam industri nasional kita, tentu kita harus melihat keunggulan-keunggulan komparatif yang kita miliki untuk kita kembangkan, terutama dalam menghadapi globalisasi. Nah, di sini, di Departemen Perindustrian juga sudah kita rumuskan industri-industri apa saja yang akan kita kembangkan di masa mendatang, yang mempunyai keunggulan-keunggulan komparatif yang tinggi. Soal merumuskan industri apa saja, itu gampang. Pertama, industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Kedua, industri yang memanfaatkan tenaga kerja cukup banyak. Ketiga, gabungan antara keduanya.

Kalau ketiga-tiganya ini didukung oleh teknologi tepat guna, akan menjadi industri yang mempunyai dasar yang cukup kuat. Nah, kita melihat di sini, industri yang memanfaatkan bahan baku yang kita miliki, berupa sumber alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang bisa diperbarui, misalnya industri yang memanfaatkan hasil hutan, industri kertas, hasil pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang *non renewable* dari minyak bumi dan hasil-hasil tambang, ini bisa kita kembangkan.

**Banyak mahasiswa yang buta teknologi. Pembaruan-pembaruan teknologi kadang tidak bisa ditangkap oleh mahasiswa secara langsung.**

Ya itu tadi. Bisa diisi dengan dosen tamu. Dan kita bisa mengatur tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk memberi ceramah atau kuliah.

Ini untuk mengurangi gap yang terjadi antara kemajuan-kemajuan di bidang industri yang pada umumnya sekarang ini canggih, dengan perguruan tinggi. Karena kita khan sudah masuk *global market*. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang canggih tadi. Nah, bagaimana caranya, ya timbal balik itu tadi. Dari perguruan tinggi bisa melakukan peninjauan kerja ke industri, dan dari industri bisa memberikan informasi. Oleh karena itu, kita juga aktif mengadakan pameran teknologi dan sebagainya. Seperti di Yogya beberapa waktu yang lalu, Teknik Kimia mengadakan pameran, untuk menarik minat mahasiswa.

**Untuk mentransfer teknologi yang canggih menjadi tepat guna, perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan?**

Sekarang ini, kita kembangkan di industri pengolahan, seperti industri pupuk. Tentu mula-mula kita cuma menjalankan pabrik dan memelihara pabrik. Tetapi lama-lama kita didik insinyur-insinyur itu untuk bisa melakukan modifikasi. Untuk melakukan modifikasi ini, tentu dia harus bisa membuat rancang bangun dan rekayasa. Lama-lama dia mempunyai keahlian. Nah, orang-orang yang mempunyai keahlian itulah yang kita kembangkan untuk melakukan *design* dan *enginering* untuk pabrik-pabrik yang akan datang. Dan sekarang kita sudah mampu membangun pabrik secara utuh. Pabrik yang *sofisticated*, yang canggih. Kita harus bangga, itu. Tapi untuk membuat ini kita harus kerja keras, tidak bisa kita santai.

**Berkaitan dengan itu, apa yang harus dilakukan perguruan tinggi?**

Ya harus dijalin hubungan itu tadi. Kerjasama tadi harus ditingkatkan. Bagi industri ini banyak sekali manfaatnya. Karena perkembangan industri di Indonesia akan tumbuh cepat sekali. Sekarang struktur dari industri sudah cukup kuat, dan sesuai dengan GBHN, pada akhir Pelita V diharapkan nantinya akan terbentuk suatu industri yang kuat, yang didukung pertanian yang kuat. Ini diukur dari peran sumbangan produk domestik brutonya secara nasional. Ternyata dari industri sekarang sumbangan PDBnya mencapai 18,46%. Sedangkan pertanian sekarang menurun menjadi 20,4%. Jadi sudah hampir seimbang.

**Tentang transfer teknologi, Pak. Ada asumsi yang mengatakan transfer teknologi menyebabkan ketergantungan kita pada negara-negara yang mempunyai teknologi canggih. Bapak setuju?**

Ya, makanya kita berusaha menguasai bidang industri tadi. kalau kita kuasai, khan nggak tergantung lagi. Oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga profesional yang menguasai bidang itu. Jadi kita harus kerja keras.

**Di luar negeri, dalam *research and development*, peranan perusahaan industri lebih besar dari perguruan tinggi.**

Ya, memang besar! Karena mereka yang tahu betul mengenai kebutuhan market. Biasanya dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Oleh karena itu, aplied research lebih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan. Nah, *basic research* pada umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Tapi ini bisa dikembangkan menjadi *applied research*, dengan kerjasama dengan industri.

Jadi research ini bukan untuk mendapatkan *credit point*, tapi research yang bisa menghasilkan suatu manfaat. Ini yang kita harapkan. Nah, harusnya para peneliti juga jeli mengamati, apa yang akan dikembangkan di bidang industri, bidang pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Jadi sektor-sektor ini pun harus mengkaji, apa yang akan dikembangkan. Seperti di industri tadi sudah saya sebutkan. Oleh karena itu penelitian pun harus menuju ke sana.

**Tapi, Pak. Penelitian di universitas itu sering terhambat karena masalah dana.**


Ustarmen JP

Justru masalah dana, kalau itu memang mendatangkan manfaat, tentu ada orang yang akan memberi. Di Amerika, penelitian dibiayai oleh industri atau institusi. Bukan biaya pemerintah.

**Selama ini, dari industri sendiri bagaimana kerjasamanya?**

Sudah ada, tapi masih perlu ditingkatkan untuk pembangunan jangka panjang yang kedua.

**Berkaitan dengan pengalaman Bapak sebagai dosen, bagaimana sebaiknya pendidikan teknik di perguruan tinggi saat ini?**

Saya sudah kurang mengamati bagaimana pendidikan sekarang. Tapi saya kira sudah bagus dengan menggunakan sistem kredit. Mahasiswa dipacu untuk bisa cepat. Lebih-lebih ada program percepatan. Ini efektifnya mahasiswa harus kerja keras, dosen juga kerja keras. Karena tiap semester ada ujiannya. Terutama jurusan mesin, listrik, kimia. Ini bagus sekali. Karena kita butuh engineer banyak sekali. Saya pikir kedokteran juga sudah banyak menggunakan alat-alat elektronik. Karena itu ilmunya juga harus sudah menuju ke sana.

**Tapi evaluasi kurikulum di UGM itu biasanya lebih dari lima tahun.**

Ya, kalau setiap kali dievaluir, nanti kacau mahasiswanya.

**Bapak punya prinsip hidup?**

Ya, orang hidup jelas harus kerja. Kerja termasuk belajar. Dalam melakukan pekerjaan itu, kita harus menekuni dan menyenanginya. Yang penting bekerja itu harus dengan sebaik-baiknya dan ikhlas.

**Kalo dalam pendidikan putra-putri Bapak, apa yang Bapak tekankan?**

Dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai pelajar atau mahasiswa, ya harus belajar dengan sebaik-baiknya. Karena itu untuk kepentingan dia sendiri. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, adalah ilmu pengetahuan. Dan saya memberikan kebebasan pada anak-anak untuk memilih sekolah. Dulu saya di Palembang, anak-anak saya kalau sudah SMA pindah ke Yogya. Selain itu, saya juga selalu memberikan waktu pada mereka, terutama di meja makan. Di sini kami berbincang-bincang. Saya khan kerja di pabrik. Jadi ketemunya hanya tiap sore.

**Saya lihat Bapak kerja full time. Jam 07.00 sudah ada di kantor.**
**Bagaimana Bapak mengatur waktu?**

Semua harus diatur seimbang. Olah raga juga ada. Saya biasanya bangun jam setengah lima pagi, terus olah raga. Yaah, olah raga yang ringan-ringan. Kenapa saya berangkat pagi? Karena itu lebih efisien. Sebab kalau sudah siang sedikit, jalanan macet. Kita membuang bensin, juga waktu.

**Dengan kegiatan yang begitu padat, bagaimana Bapak menumbuhkan etos kerja yang tinggi?.**

Ya, sebenarnya kerja itu bagian dari ibadah. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas, kita tidak akan merasa capai. Kalau kita tidak mendapat imbalan hari ini, ya besok. Kalau tidak besok, ya lusa. Kalau tidak lusa, tahun depan. Kalau nggak, ya nanti . . . . Kalau sudah begitu itu enak. Kita harus serius penuh dan menyenanginya. Apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang ikhlas, jangan dipaksa.

**Bapak punya pengalaman yang berkesan?**

Apa-apa saya terima secara wajar. Karena saya yakin, apa-apa yang kita lakukan kesemuanya itu ada yang mengatur. Tapi kita harus selalu berusaha, apa pun yang terjadi.

**Hesti D. Lestari Ustarmen JP Nur Hidayat**

# "SAYA TIDAK SETUJU DENGAN SISTIM PENDIDIKAN YANG SERAGAM"


Nur Hidayat

* Dalam perjalanannya, UGM makin regional sifatnya. Sekarang orang melihat UGM sebagaimana universitas-universitas di propinsi lain.
* Perguruan tinggi tidak pernah mendengar atau minta pendapat dari dunia usaha. Yang diterima ide-ide pengusaha luar negeri. Pengusaha Indonesia dianggap remeh.

Kalau sekarang di Indonesia menjamur sekolah MBA, maka sebenarnya ada satu nama yang pantas kita catat. Tidak lain dia adalah **DR. Siswanto Sudomo,** pelopor berdirinya IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia), yang merupakan sekolah program MBA yang pertama di negri ini. Kalau ada yang bisa membuat kita bangga, tentu karena dia adalah alumni Gadjah Mada.

DR. Siswanto Sudomo memang tak sampai meraih gelar sarjana ekonomi di UGM. Dia hanya sampai pada Sarjana Muda, karena pada tahun 1962 ia beroleh bea siswa ke University Wisconsin-Madison, U.S.A dan meraih M.Sc. in Commerce di sana pada tahun 1965. Masih di universitas yang sama, pada tahun 1976 ia meraih Ph.D. in Finance.

Lahir di Yogya pada tanggal 23 April 1940, cita-citanya waktu kecil sebenarnya ingin jadi arsitek. Namun ketika harus masuk SMA bagian C (sosial), ia sadar itu tak mungkin. Kemudian sempat bercita-cita menjadi diplomat, karena sejak kecil sudah tertarik masalah-masalah luar negeri dan kemampuannya yang berlebih dalam bercakap Inggris. Selain diplomat, cita-citanya ketika SMA adalah ekonom.

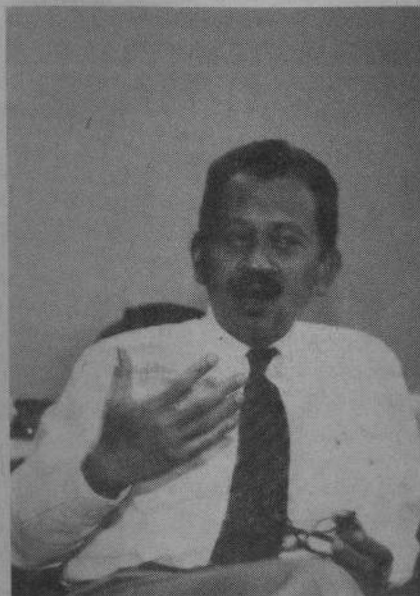
Kalau akhirnya ia memilih masuk Fakultas Ekonomi UGM, karena yang lebih memungkinkannya dapat bertemu dengan orang-orang luar negeri adalah di Fakultas Ekonomi, bukan di Fisipol. Dan benar saja, pada tahun 1962 ia berhasil dikirim ke Amerika. Tahun 1965 pulang ke UGM, langsung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Hanya sempat empat tahun mengajar, tahun 1969 ia terbang lagi ke Amerika, dan setelah meraih gelar Doktor pada tahun 1976 kembali ke UGM, langsung menjadi Ketua Program Doktoral bidang Ekonomi di UGM. Ia juga menjadi Ketua Badan Pengembangan Manajemen UGM dari tahun 1977 hingga tahun 1979, sekaligus menjadi anggota Unit Pengembangan Universitas.

Jabatan lainnya di luar UGM cukup banyak. Pada tahun 1978 menjadi dosen tamu di Program Pengembangan Supervisor PT Caltex Pacific Indonesia, hingga tahun 1983. Ia juga menjadi konsultan di Departemen Penerangan pada tahun 1979, dan konsultan di kantor Mentri Muda Koperasi pada tahun 1981. Selain itu, ia menjadi *Managing Director* pada PT Infodata Indonesia dari tahun 1979 hingga tahun 1984.

Kesibukannya di PT Infodata menyebabkannya harus meninggalkan UGM pada tahun 1983. Alasan lainnya, karena ia punya begitu banyak ide yang tak mungkin dapat diterapkan di UGM. Kemudian ia hijrah ke Jakarta, dan pada tahun 1984 mendirikan IPMI. Hingga tahun 1990 ia menjadi Direktur Eksekutif IPMI Jakarta. Dan sejak tahun 1991 memulai karirnya sebagai pengusaha di PT Kwalita Eksporindo International, Jakarta menjadi Presiden Direktur hingga kini.

Meski sejak tahun 1983 ia mengundurkan diri secara resmi dari UGM, toh sampai sekarang masih bersedia menjadi dosen tamu di Fakultas Ekonomi UGM, mengajar mata kuliah Bisnis Policy. Ketika ditanya mengapa tak mengajar di MM UGM, sambil berseloroh ia menjawab, "Karena MM saingan IPMI", (Katanya tertawa lebar). Tapi yang pasti karena ia merasa lebih dibutuhkan di jenjang S-1.

Pada usianya yang telah lewat setengah abad, Siswanto Sudomo masih nampak awet muda dan enerjik. Berbincang-bincang dengan putra Prof. Soedomo, tokoh pendiri Fakultas Kedokteran Gigi UGM ini, memang tak akan terasa bosan. Dua jam lebih BALAIRUNG menyita waktunya di kantornya, Gedung Arthaloka, lantai 4, Jalan Jend. Sudirman Jakarta.



Nur Hidayat

Dengan sangat familier, sulung dari dua bersaudara ini banyak bercerita tentang pengalamannya, juga ide dan wawasannya. Hesty D. Lestari merangkumnya menjadi sebuah tulisan untuk anda.

**UGM sering dikatakan universitas *ndeso*, karena orientasinya yang memang ke desa, selain mahasiswanya juga sederhana pola hidupnya. Menurut Bapak, apakah karakteristik ini menguntungkan?**

Kesederhanaan itu mempunyai nilai lebih juga. Dari situ kita bisa mencari karir hidup apa yang cocok bagi kita. Jadi kalau yang dari Yogya mencari karir wiraswasta itu bagus. Karena wiraswasta kan pada awalnya susah dulu, harus hidup sederhana supaya biaya hidup rendah. Nah, ini prinsipnya orang Yogya. Jadi kalau terjun ke dunia wiraswasta tidak merasa canggung karena sudah biasa.

**Apakah karakter demikian perlu dipertahankan agar bisa memenuhi kebutuhan dunia bisnis, lebih-lebih sekarang kita sudah memasuki global market?**

Kalau bicara kebutuhan dunia bisnis, ini kita harus hati-hati. Karena kebutuhan dunia bisnis sangat bervariasi. Tidak hanya tergantung dari jenis atau sektor usahanya. Di dalam satu perusahaan sendiri, kebutuhannya juga berbeda-beda. Ini kalau kita bicara mengenai sistem. Nah, dalam sistem kan ada elemen-elemen yang harus langsung berhubungan dengan pihak luar. Itu harus adaptif, harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan luar. Mereka ini misalnya, *marketing, custumor service, public relations,* dan sebagainya. Orang-orang itu, kalau perusahaannya global, yang harus berhubungan secara global. Kalau nasional, yang harus berhubungan dengan perusahaan nasional. Nah, kebanyakan lulusan UGM kurang kuat di situ, karena banyak kesempatan bersinggungan dengan berbagai macam orang dari dunia usaha.

Tapi tidak semua lulusan dihadapkan pada satu-satunya pilihan karir. Bisa juga dia jadi akuntan, auditor, atau di pabrik yang harus berhubungan dengan karyawan. Biasanya karyawan pabrik lebih senang dipimpin oleh orang yang familier, orang yang *back ground* kehidupannya tidak jauh berbeda dengan dia. Nah, di sini kita mempunyai kekuatan. Sebab kita tahu budaya memimpin orang-orang, yang kebanyakan mereka ini berasal dari Jawa.

Kalau kita bicara lebih lanjut tentang pendidikan, saya tidak pernah setuju dengan sistem pendidikan yang seragam. Kalau di Indonesia kan membuat sistem senangnya seragam. Padahal kebutuhan dunia usaha tidak seragam. Itu sebabnya kenapa dulu waktu saya membuat IPMI syaratnya harus bahasa Inggris segala macam. Itu karena ada tuntutan dari dunia usaha kita, akan adanya lulusan yang fasih berbahasa Inggris, bahkan berpikirnya pun dengan bahasa Inggris. Lalu untuk lebih berorientasi pada praktisi, tidak membuat skripsi atau tesis, tapi membuat *project,* bagaimana memenej suatu *project*. Itu harus dimungkinkan. Toh kita tidak akan menerapkan sistem ini di seluruh negeri.

**Tapi Pak, pendidikan kita sampai sekarang masih sentralistis.**

Ya, sentralistis dalam *planingnya*. Jadi dalam *designnya,* dalam rancang bangunnya sentralistis. Sebenarnya bukan hanya dalam bidang pendidikan. Saya nggak pernah melihat di satu propinsi ada yang menonjol atau unik. Mesti seragam. Kalau keseragaman itu tumbuh secara natural, itu nggak masalah. Tapi kalau ditentukan dari atas, itu yang nggak baik. Ya, kalau standar jumlah SKS, itu tidak apa-apa. Tapi misalnya saja, kalau di sini bobotnya lebih banyak yang praktis, semen-

tara di tempat lain banyak yang teori, itu harus bisa diterima.

Yang harus dicari adalah apa yang diminta oleh *custumer*. Biasanya universitas atau institut lebih tahu ini. Kalau dari Fakultas Ekonomi UGM, yang saya tahu, yang banyak sekali diminati adalah akuntansinya. Karena *background* keyogyaannya tidak akan mempengaruhi pekerjaannya sebagai akuntan.

**Sebenarnya peran UGM di tengah pendidikan nasional sekarang ini bagaimana, Pak?**

Kalau secara absolut, dalam artian jumlah lulusannya, tentu makin penting. Tetapi secara relatif, dalam artian rankingnya, saya rasa ada penurunan. Pada awal berdirinya, UGM adalah universitas perjuangan, universitas yang pertama kali didirikan di republik ini. Sebagai akibatnya, pada tahun-tahun pertama UGM itu menarik minat putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang berkobar-kobar. Jadi UGM itu universitas yang sifatnya benar-benar nasional. Tapi dalam perjalanannya, UGM makin regional sifatnya. Sekarang orang melihat UGM sebagaimana universitas-universitas di propinsi lain.

Memang di antara universitas regional lainnya, UGM masih yang terbaik dan favorit. Tapi daya tariknya sekarang bagi mahasiswa di seluruh Indonesia tidak seperti dulu. Sekarang yang tertarik ke sana, ya yang tinggal di sekitar sana.

**Gejala itu muncul sejak kapan?**

Sejak ada sistem rayonisasi. Misalnya yang ujian di Medan, kans untuk diterima di UGM tidak sebesar kalau ia ujian di Yogya, sehingga harus jauh-jauh ujian di Yogya. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Kalau kita ingin mempertahankan universitas yang bermutu baik, harus mampu menyaring mahasiswa dari mana saja.

**Dulu setelah Bapak pulang dari luar negeri, apa Bapak menemui kesulitan dalam mengadaptasi ilmu yang didapat dari luar kepada masyarakat kita?**

Ya, adaptasi dalam dunia ilmu itu hanya bisa dilakukan dengan research. Ilmu yang kita dapat dari luar itu khan didasarkan atas research dengan menggunakan data dan informasi dari luar juga. Adaptasinya, ya kita harus menguji ulang dengan data dari Indonesia. Selama ini saya memang tidak melakukannya. Jadi saya tidak melakukan adaptasi secara ilmiah. Adaptasi yang saya lakukan adalah secara intuitif. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di perguruan tinggi. Kalau pengusaha boleh melakukan itu, tapi ilmuwan tidak boleh.

**Selama ini peran dunia usaha terhadap pendidikan masih sangat kurang, misalnya dalam memberi kesempatan magang pada mahasiswa, atau *training* maupun kerja *part time*. Menurut Bapak bagaimana?**

Saya akui dunia usaha memang belum banyak peranannya dalam dunia pendidikan. Pertama dalam hal memberi dana, misalnya dana beasiswa. Kedua kesempatan untuk magang. Tapi ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada dunia usaha. Ini juga bagian dari universitas. Dunia pendidikan itu kan harus memasarkan mereka, tidak hanya pada waktu, mereka lulus, tapi juga pada waktu mereka ingin melakukan *training*. Kalau masing-masing mahasiswa dibiarkan jalan sendiri-sendiri, tentu perusahaan tidak mau menerima. Tapi kalau ini dalam satu kerangka kerjasama, misalnya dekannya atau rektornya sendiri yang datang menjajagi, pasti bisa. Itu kan tinggal *approach*nya bagaimana.

**Kalau Bapak menilai mahasiswa sekarang, apa sudah bisa dikatakan mandiri?**

Kalau mandiri dalam bidang ekonomi, saya rasa sudah. Karena sekarang sudah banyak mahasiswa yang bekerja. Tapi dalam hal memanfaatkan waktu, masih kurang. Secara kualitatif, pendidikan di perguruan tinggi tidak boleh diartikan sebagai kelanjutan pendidikan di SMA. Oleh karenanya, kalau kita lihat jadwal kuliah akan berbeda dengan jadwal pelajaran SMA. Seharusnya mahasiswa menafsirkan jadwal kuliah ini sebagai suatu yang enak, karena banyak waktu kosong. Nah, di sini justru dituntut kemandirian mahasiswa. Dalam sehari kuliah cuma berapa jam, mestinya waktu kosong selebihnya bukan bebas atau libur, tapi harus diisi dengan hal yang bermanfaat. Saya lihat belum banyak mahasiswa yang bisa melakukan ini. Apalagi mandiri dalam hal berpikir, artinya menganalisa, atau punya pendapat sendiri. Pertanyaan atau diskusi di dalam kelas, pasti bertanya minta jawaban. Bukan memberikan komentar atau kesimpulan lain dengan dosennya, meskipun asumsinya sama. Di sini terlihat belum adanya kemandirian itu.


Nur Hidayat

**Antara perguruan tinggi dengan dunia usaha sering saling tuding. Dunia usaha menganggap perguruan tinggi tidak bisa *mensuplay* tenaga kerja. Sementara perguruan tinggi menganggap dunia usaha cuma *bisnis oriented*, dan mencampuri perguruan tinggi sehingga menjadi komersil sekali.**

Tidak. Dunia usaha itu tidak ingin mencampuri. Dunia usaha hanya mengatakan apa yang dibutuhkannya. Kalau perguruan tinggi tidak bisa menghasilkannya, maka dunia usaha tidak akan memakai produknya, tapi akan mengambil dari tempat lain. Sementara dunia perguruan tinggi menganggap dia yang paling tahu bagaimana cara mendidik yang baik.

Sebenarnya secara riil ciri-ciri yang dibutuhkan dunia usaha tidak jauh beda dengan yang dihasilkan perguruan tinggi. *Toh* kenyataannya dunia usaha memakai juga produk perguruan tinggi. Hanya saja dalam persepsi dunia usaha, perbedaan itu besar. Mungkin karena dunia perguruan tinggi tidak pernah mau mendengar atau minta pendapat dari dunia usaha. Jadi dunia usaha menganggap perguruan tinggi itu orang-orang yang sibuk sendiri, tahu sendiri, puas sendiri. Kalau ada masalah, cari pemecahannya dari luar negeri. Coba saja dosen-dosen yang dikirim ke luar negeri. Kalau ide-ide yang diterima di sana, pasti langsung diterima. Tapi kalau ide itu dilontarkan oleh pengusaha Indonesia, dianggap remeh. Kalau yang bilang itu dosennya di luar negeri atau pengusaha di Amerika, pasti dipercaya. Karena menganggap perusahaan-perusahaan di Amerika dikelola dengan baik. Kalau perusahaan Indonesia, bisa apa *sih*?

Jadi mereka itu menganggap lebih pinter, lebih tahu. Coba saja, komentarnya terhadap dunia usaha tidak pernah respek. Ya, ini tentu juga salahnya dunia usaha Indonesia. Tidak semua orang di dunia usaha patut mendapatkan penghargaan atau kehormatan. Tapi di samping itu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap usaha-usaha yang sudah jalan. Kalau akhirnya *economic growth* kita sampai 7% lebih, terus angka ekspor kita naik 15% atau 20% setahun, itu khan hasil dari dunia usaha, bukan perguruan tinggi, bukan pula pemerintah yang menghasilkan ekspor. Ada juga prestasi riil yang dihasilkan dunia usaha.

**Tentang prestasi riil itu Pak, beberapa waktu lalu muncul isu pengusaha klien, yakni pengusaha yang berhasil berkat bantuan birokrasi atau keuntungan-keuntungan khusus.**

Ya, itu tidak banyak. Karena hanya ada dalam pasaran lokal. Pemerintah kan tidak pernah bisa membantu pengusaha yang mau mengekspor. Iya toh? Bantuan apa yang diperlukan? Ekspor itu kan kalau memang dari luar negeri ada permintaan, baru bisa jalan. Kalau tidak ada permintaan, ya apapun bantuan dari pemerintah, tetap tidak akan jalan. Jadi keberhasilan usaha ekspor, itu boleh dikatakan pasti keberhasilan riil.

# JUPEN MAHASISWA

Mahasiswa dan politik seakan-akan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pola hubungan diantara keduanya bersifat interaktif, yakni suatu bentuk hubungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik.

Pengaruh politik; dalam hal ini struktur dan sistem politik; terhadap kehidupan kemahasiswaan (dan kehidupan kemasyarakatan lainnya) merupakan sesuatu yang sudah lazim kita rasakan dan tidak bisa kita sangkal lagi. Besarnya pengaruh politik negara terhadap kehidupan masyarakatnya tidak bersifat tetap, melainkan naik turun sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang sedang berkembang maupun kebijaksanaan pemerintah yang berlaku. Celakanya, di Indonesia tercinta ini kendali negara (baca: pemerintah) terhadap masyarakat cukup besar. Kendali kekuasaan yang ketat ini tentu juga dirasakan oleh para mahasiswa, satu segmen masyarakat terpelajar yang relatif "butuh kebebasan."

Pengaruh mahasiswa terhadap kehidupan politik juga sudah terbukti. Runtuhnya rezim Chun Do Hwan di Korea Selatan; jatuhnya diktator Ferdinand Marcos di Philipina; peristiwa berdarah di Tiananmen-Cina adalah beberapa contoh yang bisa kita sebut.

Di Indonesia sendiri, kepeloporan mahasiswa pernah menunjukkan peranannya dalam beberapa momentum sejarah negeri ini. Dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, detik-detik proklamasi tahun 1945, dan lahirnya Orde Baru tahun 1965.

Dengan mengungkapkan beberapa "peran historis" mahasiswa tersebut tidak dimaksudkan untuk membangkitkan mitos-mitos tentang mahasiswa yang semakin hari semakin tidak realistis, bahkan a-historis. Tetapi dengan memahami "fakta sejarah" dan "peran kesejarahan" kita, diharapkan dapat melahirkan sikap dan tindakan yang lebih bijak didalam "dunia" yang telah banyak berubah.

Menyadari akan adanya zaman yang berubah, pertanyaan yang layak untuk diajukan adalah: apakah mahasiswa masih dapat memainkan peran sejarahnya? Bila dapat, peran apakah itu, dan bagaimana?

Memperhatikan kondisi mahasiswa, baik secara fisik maupun mental, serta mengingat posisi mahasiswa dalam konstelasi sosial masyarakat kita, kaum mahasiswa masih dapat mengambil peranan dalam pembangunan masyarakatnya, tentu saja tidak akan sebesar masa lalu. Jika demikian, apa, dan bagaimana?

Tulisan ini tidak berpretensi untuk dapat menjawab pertanyaan yang tersebut terakhir secara tuntas, dan memang tidak dimaksudkan untuk itu. Dalam kesempatan ini hanya akan membicarakan satu masalah yang berkaitan dengan agenda nasional kita yang paling mendesak, yakni Pemilu. Pertanyaannya kemudian menjadi: peran apa yang dapat dimainkan oleh para mahasiswa dalam pemilu?

Kita semua sepakat bahwa tidak ada larangan berpolitik bagi mahasiswa; bahwa perlu adanya pendidikan politik bagi mahasiswa; bahwa mahasiswa bukan sekedar obyek, melainkan subyek politik; dan bahwa mahasiswa mesti berpartisipasi aktif dalam pembangunan (juga pembangunan politik) masyarakatnya.

Menjelang pemilu ini banyak isu yang berkembang, dari Litsus sampai larangan kampanye di kampus. Isu apapun yang dilontarkan dan siapapun yang meniupnya, mestinya tidak akan membuat kita bingung apabila telah bertekat untuk menjadi subyek politik; kecuali yang ingin menjadi obyek yang terombang-ambing kesana-kemari.

Untuk menjadi subyek kita mesti menetapkan sendiri peran yang perlu dimainkan. Salah satu peran yang dapat dipilih para mahasiswa dalam pemilu adalah dengan melakukan *transpolitisasi* secara aktif. Yakni dengan aktif memberikan informasi dan penerangan untuk membantu pendidikan politik masyarakat secara luas. Sehingga rakyat akan lebih tahu tentang segala permasalahan Pemilu. Informasi yang benar, tidak *manipulatif* dan tidak memihak (salah satu OPP) akan sangat berguna dalam menciptakan pemilu yang berkualitas, partisipatif, Luber dan Jurdil. Dengan demikian, pemberian suara karena adanya tekanan dan perasaan takut dapat diminimalisir.

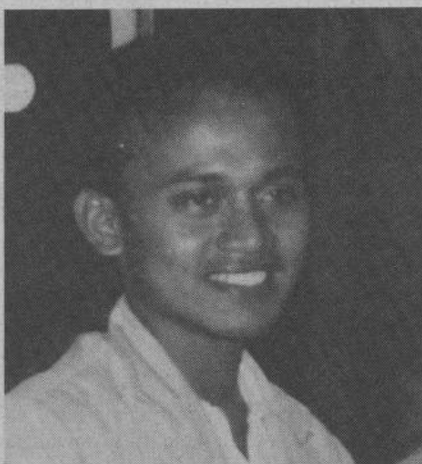
Untuk bisa melakukan *transpolitisasi,* mahasiswa mesti tahu lebih dulu tentang seluk-beluk Pemilu. Disamping itu, untuk menghindarkan pemihakan pada salah satu OPP, diperlukan keberanian untuk bersikap netral serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Memang tidak mudah bersikap demikian dalam zaman yang semakin pragmatis ini. Dan apabila kita ingat kata salah seorang mantan Menlu AS bahwa *neutrality is immorality,* apakah dengan demikian kita akan menjadi *immoral?*

Masalahnya tidak begitu, karena sesungguhnya kita tetap berpihak. Kita hanya tidak memihak pada salah satu OPP, namun tetap berpihak dan tidak netral dalam menentukan tujuan, yakni demi suksesnya pemilu yang berkualitas, demi pembangunan politik yang lebih demokratis.

Nah, apabila para Jupen menjadi Jurkam (dan mereka sudah diijinkan oleh Menpen Harmoko). Para mahasiswa bisa menjadi Jupen yang lebih baik. Semoga.

**WAHYUDI MARHAEN**
Mahasiswa Fisipol Jur. HI UGM.

# GOLPUT: KECENDERUNGAN SIKAP POLITIK MAHASISWA


KELIK SUPRIYANTO

**CHOLILI MOHAMMAD**
Mahasiswa Fak. Sastra
UGM

Salah satu indikator untuk melihat apakah suatu negara menjalankan pemerintahan demokratis atau tidak adalah, dengan melihat dan menanyakan apakah pemerintah tersebut menjalankan Pemilihan Umum secara teratur. Dengan pelaksanaan Pemilu maka rakyat menentukan wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan denggan harapan bahwa wakil-wakilnya akan memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan dukungan dari yang diwakilinya.

Bagi Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sedikit banyak telah memenuhi kriteria tersebut, yaitu dengan teratur melaksanakan Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992 yang akan datang. Namun demikian, keteraturan pelaksanaan Pemilu belumlah cukup untuk melihat keberadaan dari kedaulatan rakyat. Kualitas dari sistem Pemilu itu sendiri tentu saja masih perlu dipertanyakan lagi, apakah benar-benar berjalan diatas suatu pengelolaan yang demokratis dengan slogannya LUBER dan sering ditambah JURDIL (Jujur dan Adil), atau pengelolaan tersebut direkayasa dalam suasana manipulatif dan intimidatif dari kelompok tertentu terhadap masyarakat untuk kepentingan "status quo".

Atas gambaran tersebut maka berbagai diskusi, pertanyaan debat dan juga pernyataan mulai muncul ke permukaan. Kelihatannya semakin hangat menjelang pelaksanaan Pemilu. Ada dua isu yang menerobos ke depan dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem Pemilu di Indonesia. Pertama; masih adanya segmen masyarakat yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Mereka umumnya berasal dari kelas menengah perkotaan (kaum muda dan kaum terpelajar), yang kemudian dikenal dengan sebutan GOLPUT (Golongan Putih). Fenomena ini memang bukan hal baru dan bahkan prosentase mereka hanya kecil sekali dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada. Namun yang menarik,


ISTIMEWA

menurut Lembaga Pemilihan Umum, jumlah mereka secara absolut terus bertambah dalam Pemilu 1971 hingga 1987, mencapai 8.155.843.

Kemudian yang kedua; tentang munculnya kekuatan Golput pada pemilu '92, yang akan banyak dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa dalam menangkap isu-isu nasional yang muncul dikaitkan dengan masalah nasional seperti kasus tanah, tenaga kerja, peranan konglomerat, globalisasi, pemerataan pendapatan, regenerasi pemimpin dan partisipasi dalam proses politik.

Pengukuran secara kuantitatif menunjukkan adanya pergeseran peran politik dari kalangan masyarakat luas secara individual dan berkelompok maupun terorganisasi, kepada kalangan elit kekuasaan. Melemahnya peran organisasi masyarakat dan organisasi politik di dalam proses politik, merupakan petunjuk kuat bagi kemandegan perkembangan institusionalisasi politik, yang justru dijadikan dalih untuk mengendalikan aktivitas politik masyarakat.

Golongan putih tidak hanya disorot saat ini saja tapi setiap lima tahun sekali saat mendekati pemilihan umum. Hanya saja kali ini sorotan bagi kaum yang *emoh* memilih ini tergolong cukup dini. Yang menarik, mencuatnya Golput ke pembicaraan politik kali ini, bukan karena aktor-aktornya melakukan aksi atau 'kampanye' seperti awal kemunculannya tahun 1971, tapi suara-suara yang mempersoalkan Golput kali ini, justru berasal dari pejabat-pejabat pemerintah yang khawatir akan menyebar di dalam Pemilu mendatang.

**Nyamuk Golput Singgah Dimana-mana**

Istilah Golput, kita ketahui mulai dikenal berbarengan dengan diselenggarakannya kampanye Pemilu 1971. Pemilu perta di zaman Orde Baru. Saat itu beberapa eksponen pemuda melakukan gerakan moral yang memperjuangkan agar setiap pemegang hak pilih, diberi kebebasan memilih apa saja, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun, termasuk kebebasan untuk tidak memilih.

Juru bicara Golput ketika itu, Arief Budiman, kepada pers mengatakan bahwa Golput bukanlah suatu pengelompokan politik tapi suatu pengelompokan kultural dengan penekanan pada tradisi Golput bukan suatu organisasi tapi lebih merupakan kelompok-kelompok pribadi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam perjuangannya tidak akan bereaksi taktis, tapi lebih pada hal-hal yang prinsipil.

Pemerintah Indonesia tidak pernah terlalu mengkhawatirkan mereka, apalagi membuat UU Pemilu spesial Golput. Karena Golput dianggap sebagai kelompok kecil yang hanya berjumlah 8,66%, dibandingkan dengan yang berpartisipasi dalam Pemilu. Sebenarnya keberadaan Golput menjadi indikator adanya demokrasi di negara tersebut. Mereka tidak ada pengaruhnya terhadap kelangsungan demokrasi. Bahwa dalam suatu negara itu ada pembangkang-pembangkang merupakan hal yang biasa, selama mereka tidak melanggar hukum, dan mereka menurut undang-undang diperbolehkan,

Lain halnya di luar negeri, seperti Australia, Inggris dan Amerika. Kewajiban ikut memilih diundangkan di Australia ternyata hanya 59% dari mereka yang berhak memanfaatkan haknya pada Pemilu 1922, jauh berkurang ketimbang dasa warsa sebelumnya. Timbul ketakutan bahwa kalau hanya separuh para warga memilih, dan partai yang menang hanya meraih separuh dari suara, berarti pemerintah dipilih oleh minoritas dan dapat kehilangan legitimasinya.

Keberadaan Golput merupakan unsur korektif kritis di dalam membangun sistem secara keseluruhan. Keberadaan mereka, meskipun berbobot, tidak perlu dibesar-besarkan.

Ada dua kelompok besar dalam masyarakat yang potensial menjadi Golput: para masyarakat dan cendekiawan.

Wajar atau tidak kecemasan itu, yang jelas peraturan tersebut melepaskan partai-partai politik dari susah payah mengerahkan pendukungnya untuk hadir pada hari Pemilu (*getting out the vote*), salah satu kesibukan penting untuk partai di Amerika dan Inggris. Bahkan di Amerika yang tidak memilih mencapai 40 persen.

**Kesadaran Politik Mahasiswa dan Para Cendekia**

Ada dua kelompok besar dalam masyarakat kita yang potensial dapat menjadi pengikut Golput itu. Yang pertama adalah para mahasiswa, yang bila ditinjau dari watak dan tradisi mahasiswa serta sejarah orde baru, relatif merupakan lahan subur bagi golputisme. Kelompok yang kedua adalah para cendekiawan lainnya yang berada di kampus maupun diluarnya.

Menurut DR. Nazaruddin Sjamsuddin, kedua kelompok ini memang akrab dengan gagasan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan termasuk dalam bidang politik. Mereka cenderung untuk merasa tidak puas dengan kondisi yang ada di sekitarnya mereka. Dalam manifestasinya, ketidak puasan itu tidak jarang mengambil bentuk-bentuk yang ekstrem terutama menurut takaran orang-orang yang berkuasa. Menolak sistem yang berlaku adalah salah satu diantaranya.

Lebih gamblang lagi, bila kita amati *poll* yang dilakukan DR. Riswandha Imawan bersama sejumlah mahasiswa UGM menunjukkan gejala yang menarik. Dari hasil 613 responden di lima kota besar (Medan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar), Golkar memang masih tetap populer (38,82%). Sementara PDI (19,08%) dan PPP (16,8%). Yang menyatakan Golput cukup besar: 25,30%.

Hasil *poll* ini mirip dengan survei Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (P-4 UI), yang dipublikasikan majalah Editor, tentang aspirasi politik generasi muda di kota Metropolitan Jakarta, bulan Agustus 1989. Dari 972 responden, 47,2% memilih Golkar, PDI (24,0%), PPP (16,8%). Dan Golput: 12%.

Dari hasil poll pertama, bisa dikatakan bahwa anak muda hasil pendidikan Orde Baru ini punya dua pilihan ekstrem: Pilihan Golkar atau menjadi Golput saja!.

Riswandha yang menganalisa poll ini, menegaskan bahwa mayoritas anak-anak muda di perkotaan itu (74,55%) menganggap bahwa pengambilan keputusan politik bukan urusannya. Mereka cenderung memilih Golput karena aktivitas politik apapun juga tak akan mengubah keadaan. Atau bahkan ada pandangan, bahwa adanya Golput itu karena kesadaran bahwa *political efficacy* dianggap rendah.

**Partisipasi Politik: Bagaimana?**

Pengamatan menyeluruh terhadap perkembangan politik Indonesia menyajikan pengetahuan tentang kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga sampai pertengahan Desember tahun kemaren, Presiden Soeharto menghimbau seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilu, menggunakan hak tersebut dalam Pemilu 1992, sehingga diharapkan tidak menjadi golongan putih.

Kepala negara menilai, penggunaan hak pilih itu juga penting untuk menjamin tegaknya negara kesatuan dan kesinambungan pembangunan nasional. Karena peran serta aktif dalam Pemilu merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila yang dianut negara Indonesia.

Memang, bila menengok evaluasi terhadap strategi pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan yang menjadi arah kebijaksanaan bangsa selama ini perlu mendapat penyesuaian pada tingkat operasionalnya. Terutama terasa mendesak aspek pemerataan keikutsertaan dalam proses politik, berupaya meningkatkan partisipasi ikut memberikan 'penyadaran', mempersoalkan dan menuntaskan masalah-masalah bangsa dan negara.

Pelembagaan sosial politik sesuai dengan konstitusi yang telah diletakkan dasar-dasarnya tetap terbuka luas. Justru sekarang inilah yang sangat dibutuhkan adalah peningkatan kemampuan kepemimpinan, pengorganisasian, dan fungsionalisasi lembaga sosial politik, agar kontributif dalam pemecahan masalah. Jawabannya tentu menjadi tanggung jawabnya tentu menjadi tanggung jawab sosial kita bersama, untuk terus menerus, bahu-membahu melaksanakan pendidikan politik untuk rakyat yang relevan dengan tantangan perubahan peluang-peluang politik dan ekonomi yang ada.

Ini berarti intensifikasi upaya memperkuat infra struktur dalam kerangka perwujudan demokrasi, yang membebaskan rakyat dari hambatan tumbuhnya inovasi, kreativitas dan pengembangan produktivitas. Kepemimpinan, pengembangan wawasan, keterbukaan dan dorongan bagi kreativitas dan produktivitas rakyat di dalam budaya dan struktur masyarakat kita sekarang ini, sangat dibutuhkan, terutama bagi 'generasi sangat muda' yang baru tumbuh dan membutuhkan dukungan iklim dan gemblengan, agar dapat menghadapi era baru di abad XXI.

Mari kita jadikan pandangan 'penganut' Golputisme, sebagai unsur korektif kritis di dalam membangun sistem secara keseluruhan. Keberadaan mereka, meskipun berbobot, tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu risau, sebab suksesnya Pemilu itu tidak sematamata ditentukan oleh besarnya orang yang menggunakan hak pilihnya. Prinsip Pemilu adalah menggunakan hak pilih bukan cara bagaimana dia memilih. Di Indonesia sering terbalik dimana cara dan teknik lebih dipentingkan ketimbang prinsipnya!.

# MENAGIH KOMITMEN PENYAIR-PENYAIR ''MUDA''


ISTIMEWA

**TULUS WIJANARKO**
Mahasiswa Fak. Ekonomi UGM Penikmat Sastra

Kalau beberapa waktu lalu dinamika kehidupan politik kita sempat diramaikan oleh debat parihal regenerasi kekuasaan (baca: suksesi), jagat kesastraan kitapun tak luput dari depat sejenis (masalah regenerasi). Tentu regenerasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada persoalan-persoalan senior-senior para aktivis sastra. Dan kita boleh lega, perdebatan tersebut tidak sedikitpun menyebut-nyebut hal kebulatan tekad seperti yang biasa terjadi dalam dunia perpolitikkan setiap pembicaraan mengenai regenerasi/suksesi.

Membanjirnya calon penerus (baca: penyair muda) ternyata tidak selalu menimbulkan optimisme. Setidaknya ini menurut penyair kawakan Iman Budhi Santosa. Dalam sebuah artikelnya disebuah harian lokal Yogya, Iman mengajak kita untuk berhati-hati dalam mensikapi begitu banyaknya pengarang/penyair muda yang bermunculan akhir-akhir ini. Menurutnya, besarnya kuantitas ini belum menunjukkan kepastian adanya kontribusi positif pada jagad kesastraan. Dicontohkan dari sekitar 32 penyair muda yang terlibat dalam antologi puisi TUGU, tidak kurang dari 30% dari mereka kini tidak diketahui lagi sepak terjangnya. Mereka raib meninggalkan komitmen kepenyairannya. iman bercuriga bahwa banyak dari anak muda itu sekedar melakukan *avonturisme kultural* belaka dalam dunia sastra. Mereka dituduh hanya sekedar mencari atribut-atribut (agar disebut penyair misalnya).

Hipotesa Iman itu menjadi menarik ketika kita kontraskan dengan dinamika yang terjadi dikalangan penyair muda itu sendiri seputar perbedaan pendapat mengenai demokratisasi sastra. Ada yang berpendapat, jika demokratisasi yang dimaksud berkaitan dengan diberinya kesempatan merata penyair pemula dibahas kritikus; atau pemerataan ke-

sempatan pemuatan karya penyair-penyair pemula, maka demokrasi macam ini hanya melahirkan tukang-tukang. Oleh karenanya, mereka menolak demokrasi macam ini. Dan regenerasi harus selalu bertumpu pada hirarkhi kualitas karya (antara lain hal ini dikemukakan oleh Afnan Malay).

Di sisi lain, ada yang berpendapat biarlah setiap orang yang ingin, bebas menuliskan puisi atau prosanya – betapapun kualitas yang dikandungnya. Karena setiap orang mempunyai hak untuk itu. Masalah publik menerima atau tidak, itu urusan lain. Toh seperti yang lain, "penyair" hanyalah kata kerja biasa (meminjam istilah Omi Intan Naomi). Regenerasi dalam perspektif seperti ini, barangkali tidak menjadi begitu persoalan, karena stok penyair/pengarang tidak akan pernah menjadi susut, sepanjang masih ada orang yang mau menyair atau mengarang. Sekli lagi kualitas bisa dinomor-sekiankan.

Berbeda dengan segi kehidupan yang lain, dunia sastra bertumpu pada intensitas eksplorasi ide. Bagi para aktivisnya, yang terjadi kemudian adalah sebuah tamasya rohani. Dalam banyak hal, kesastraan sebenarnya tidak menjanjikan kenyamanan secara material. Sastra hanya akan menyuguhkan kesejukan-kesejukan immaterial. Dan secara lebih fungsional, sastra sering menjadi pemicu bagi lahirnya pencerahan-pencerahan (pemikiran baru) dalam rangka membangun kehidupan. Sastra dan segala dimensinya adalah saksi sekaligus inspirator bagi kehidupan. Amanah yang amat mulia ini menjadi tanggung jawab para penyair, pengarang, dramawan dan semua sejawatnya.

Dengan kedudukan yang khas tersebut, mereka sering mendapatkan tempat tersendiri dalam sebuah format sosial masyarakat. Dan agar mereka tetap konsisten dalam menjalankan peranannya seperti tersebut di atas, mereka amat protektif terhadap kebebasannya. Untuk itu sistem sosial yang ada harus memberikan jaminan bagi mereka untuk selalu bebas dari rasa takut, ancaman, agitasi dan sebangsanya. Kebebasan adalah harga mati untuk lahirnya sebuah karya sastra yang jujur.

Tetapi mereka memang bukan kumpulan sebangsa rasul. Artinya kekurangan-kekurangan manusiawi juga tak bisa sepenuhnya dihindari. Itu bisa berupa: usia yang semakin uzur, pergeseran prinsip dan pandangan hidup, kekeliruan memahami kehidupan dan lain-lain. Dari sisi inilah satu alasan muncul, kenapa regenerasi menjadi mutlak, yaitu untuk menjaga fungsi asli pekerja sastra. Karena kekurangan di atas aman potensial bagi lahirnya karya-karya yang "salah jalan". Ini berarti regenerasi tidak sebatas dalam arti fisik, tapi juga pemikiran. Bukankah penyalah-gunaan wewenang kebebasan memungkinkan lahirnya sebuah produk sastra yang "rawan" – dan destruktif – bagi kehidupan?

Jadi pada dasarnya regenerasi bukan untuk kepentingan sastra, tapi bagi kehidupan. Regenerasi sastra adalah hak kehidupan. Ini mempunyai makna, tak satupun kekuatan yang bisa menghalang-halangi proses regenerasi ini: kekuasaan, arogansi senioritas, kekuatan-kekuatan ekonomika dan sebagainya.

Arifin C. Noor pernah mengeluh, jalan kesenian adalah jalan kesepian. Di sisi lain, banyak kalangan berharap besar, bahwa kesenian akan memfungsikan dirinya menjadi juru bicara masyarakat dalam menyuarakan kesumpekan-kesumpekannya. Tetapi begitu kalangan seniman menyahuti harapan ini, ternyata respon masyarakat sendiri adem ayem. Berapa biji yang membaca *Rafilus*-nya Budi Darma? Berapa banyak yang menonton *Tai*-nya Putu Wijaya? Dari kalangan masyarakat manakah yang tertarik mengkaji puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri?

Teater Gandrik memang bagai magnit yang mampu menyedot sekian ribu penonton untuk menyaksikan pementasannya. Juga Rendra dengan puisi-puisi pamflet ditangannya. Tetapi sebenarnya apakah yang diinginkan massa: Rendra atau puisi Rendra? Dagelan Gandrik ataukah tawaran-tawaran kontemplatif Gandrik? Ketika tirai diturunkan, pulanglah para penonton untuk segera kembali kekesibukannya masing-masing. Sementara seniman kembali ke pertapaannya yang sunyi. Masyarakat segera melupakan apa yang baru saja mereka tonton. Tampaknya memang masih terentang jarak yang cukup panjang antara masyarakat dengan nilai intrinsik sebuah produk sastra. Jalan kesenian memang jalan yang terasing.

Ketika hal di atas kita hadapkan dengan persoalan regenerasi, seperti kita menemukan benang merah persoalannya dengan sinyalemen Iman Budhi Santosa di atas. Rontoknya sebagian besar penyair muda untuk terus menerus memegang komitmen kepenyairannya bisa jadi disebabkan oleh fenomena kesepian ini. Bukan saja oleh begitu "jauhnya" masyarakat dari pertapaan mereka, tetapi juga karena dunia ini belum sepenuhnya menjanjikan imbalan materi yang memadai. Dalam hal yang terakhir, ini sebenarnya berkaitan dengan motivasi dan kesadaran kultural seorang penyair.

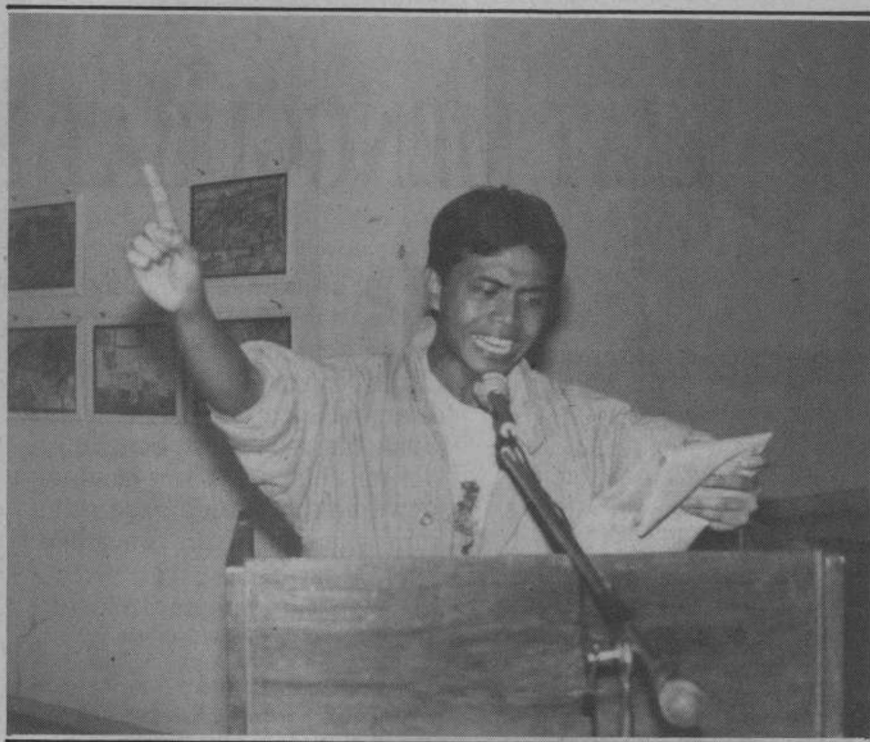
Rontoknya sebagian besar penyair muda untuk terus menerus memegang komitmen kepenyairannya bisa jadi disebabkan oleh fenomena kesepian.

Jika yang diinginkan dari suatu proses regenerasi adalah kesinambungan sebuah perjuangan, perlukah dirancang sebuah rekayasa untuk maksud ini? Dalam term politika, kata rekayasa erat kaitannya dengan sosok kekuasaan. Karena yang biasa melakukan rekayasa adalah penguasa.

Tetapi dalam kesastraan, siapakah penguasa? Siapakah rakyat? Adakah lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif? Jawabnya: tidak ada penguasa dan tidak ada rakyat. Tidak ada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dunia sastra tidak mengenal hirarkhi – kecuali dalam hal kualitas karya (istilah Afnah). Maka bagaimana mungkin sebuah rekayasa bisa dibikin? Tidak satu pihakpun yang memegang tiket kekuasaan untuk melakukan rekayasa.

Seperti selama ini sudah terjadi, alamlah yang sebenarnya akan memfasilitasi proses regenerasi ini. Adakah dahulu yang dengan tekun menggembleng Rendra, Arifin C. Norr, Emha atau Sutardji? Barangkali pernah ada seseorang atau "sesuatu" yang berperan sebagai guru dalam proses pencarian mereka. Tetapi jelas, yang terjadi bukanlah suatu rekayasa, atau sesuatu kekakuan sistem dimana hanya ada satu jalan yang disediakan, tetapi suatu dialog-dialog intensif yang berujung pada suatu keleluasaan dimana nama-nama tersebut di atas berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Besar dengan kesadaran sendiri. Proses tersebut berjalan amat alamiah, mengalir begitu saja.

Oleh karenanya, kenapa harus dicurigai jika kini terjadi banjir pengarang/penyair muda? Memang wajar kalau diantara mereka ada yang ingin sekedar berpetualang saja.


KELIK SUPRIYANTO

Sebaiknya kita biarkan saja. *Biarkan seribu bunga mekar di taman,* kata Mao. Maka biarkan gelombang itu mengalir. Kita akan menyaksikan, mereka yang setia pada jalannyalah yang akan sampai ke pantai kesastraan yang indah ini. Mereka yang setia pada komitmer kepenyairannyalah yang akan tetap eksis.

Tulisan ini pada akhirnya menagih Yayan Sopyan, Abidah El Khalieqy, Omi Intan Naomi, Afnan Malay, Ulfatin Ch dan sederet nama-nama muda lainnya akan kesungguhan mereka dalam mensetubuhi jagat kepenyairan seperti yang telah mereka pilih sekarang ini. Kontribusi mereka kepada kesastraan dan kehidupan selalu kita tunggu. Selamat berjuang kawan!

**Tulus Widjanarko**
Mahasiswa FE UGM/
Penikmat sastra.

Kenapa harus dicurigai jika terjadi banjir penyair muda? Wajar kalau ada yang ingin sekedar berpetualang. Sebaiknya biarkan saja.

# KIAT MENGGUGAT PENGUASA

RADITYA DJATI




Judul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pengarang: Indroharto, SH
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, 1991

Berlakunya Undang-Undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) pantas disambut gembira oleh semua pihak. Karena dengan berlakunya UU tersebut maka upaya untuk mewujudkan konsep negara hukum akan menjadi kenyataan. Agar benar-benar layak disebut sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki dan memfungsikan keempat badan peradilan sebagaimana yang dimanfaatkan oleh UU Nomer 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keempat badan peradilan yang dimaksudkan itu adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Disadari oleh para petinggi hukum kita bahwa untuk memfungsikan badan peradilan yang terakhir itu (PTUN) adalah tidak mudah. Oleh karena itu, UU PTUN ini memerlukan waktu lima tahun untuk bisa berfungsi seperti ketiga badan peradilan lainnya. Jadi, kalau UU PTUN tersebut disahkan pada tanggal 29 Desember 1986 maka paling lambat tanggal 29 Desember 1991 PTUN harus sudah bisa difungsikan. Untuk saat ini, PTUN sudah dapat difungsikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 1991.

Menurut penulis buku ini, PTUN adalah suatu badan peradilan untuk menyatakan sahtidaknya putusan pejabat tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis (beschikking). Tetapi, tidak semua penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa telah dirugikan karena adanya penetapan tertulis itu tadi. Hanya penetapan tertulis dari pejabat tata usaha negara yang bersifat final, konkrit dan individual saja yang boleh digugat dalam PTUN. Bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dari adanya penetapan tertulis itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan bersifat individual, artinya penetapan tertulis itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi sudah tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Berbeda dengan ketiga badan peradilan yang terlebih dahulu ada maka PTUN bukanlah merupakan badan peradilan untuk "menghukum" penguasa karena telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang ternyata cacat hukum. Artinya, PTUN hanyalah berwenang untuk menyatakan sah tidaknya suatu penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Selain tidak menghukum penguasa (baca: pejabat tata usaha negara), PTUN juga bukanlah badan peradilan yang dapat mengabulkan permohonan ganti rugi yang diminta oleh pihak penggugat apabila ia memenangkan perkaranya. Kalaupun si penggugat tetap ingin mendapatkan ganti rugi, ia bisa menuntutnya ke badan peradilan umum.

Badan-badan peradilan administrasi yang lebih dahulu, seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) untuk masalah-masalah perburuhan dan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) untuk masalah-masalah pajak, tetap diakui eksistensinya oleh PTUN. Jadi, dengan adanya PTUN tidak berarti bahwa P4D/P4P dan MPP sebagai suatu peradilan administrasi dalam sistem hukum Indonesia sudah tidak berlaku lagi. Hal ini terdapat dalam Pasal 48 UU PTUN tersebut.

Dalam buku yang cukup tebal ini, penulis mengupas dengan cukup dalam segala hal yang berkaitan dengan PTUN. Bahkan kadang-kadang pembahasannya terlalu mendalam. Walaupun begitu, buku ini memang sangat perlu untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mendalami masalah PTUN. Dan yang menjadikan buku ini punya nilai tambah adalah nama penulis buku ini yang cukup "menjanjikan". Indroharto, SH sebagai penulis buku merupakan nara sumber utama dalam membahas masalah PTUN, karena beliau adalah Ketua Muda Mahkamah Agung urusan PTUN.

**Suseno**

# PERILAKU BIROKRAT DAN POLITISI KITA

BUDAYA dan POLITIK, jelas dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Lain halnya bila kedua kata itu digabung. BUDAYA POLITIK, maka yang muncul dalam benak kita adalah suatu pengertian yang khas sifatnya, erat kaitannya dengan birokrasi dan demokrasi di negara kita. Setidak-tidaknya hal itu terlihat jelas, dalam buku ini.

Apapun pengamatan orang tentang Budaya Politik, lepas atau tidaknya dengan berbagai masalah dan gejala politik dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia hal yang sangat penting untuk kita kaitkan adalah peran Demokrasi Pancasila. Sehingga Budaya Politik yang sedang hidup dan berkembang di bumi ini adalah Budaya Politik Demokrasi Pancasila. Seperti yang ditegaskan pada awal buku ini, Moerdiono sebagai salah seorang penyusun sekali lagi menekankan bahwa Budaya Politik Demokrasi Pancasila adalah cerminan diri kita sebagai bangsa karena merupakan keseluruhan sikap, perilaku, dan perbuatan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Cakupan permasalahan seputar Budaya Politik Demokrasi Pancasila juga dibahas dalam buku ini. Ada enam permasalahan yang dipaparkan oleh Moerdiono: 1) Sosialisasi, internalisasi serta institusional Pancasila; 2) Persepsi tentang kekuasaan; 3) Posisi agama-agama dan kebudayaan daerah; 4) Integrasi antarelite politik; 5) Integrasi elite-massa serta; 6) Masalah pemerataan dan keadilan (hal. 6).

Selanjutnya pembahasan problematika di atas mendatangkan gambaran yang cukup jelas untuk memahami pembahasan berikutnya. Buku ini disusun oleh tujuh belas pakar politik dan pejabat tinggi negara seperti Moerdiono dan Cosmas Batubara. Uraian-uraiannya pun terasa hangat setidak-tidaknya bila Budaya Politik yang ada kita hubungkan dengan sikap-sikap politik kaum birokrat maupun politisi saat ini. Lebih jauh lagi pemahaman tentang kondisi kehidupan politik menyongsong pesta demokrasi 1992.

Melalui pemahaman Budaya Politik ini, beberapa organ penting negara turut mendapat sorotan tajam. Konon, kata beberapa pakar politik, peran organ-organ penting negara "lumpuh" karena tidak berperan sebagaimana mestinya. Sebagian besar penyebabnya adalah perlakuan eksekutif terhadapnya. Di samping itu penggunaan nilai-nilai budaya politik lama yang dikawinkan dengan nilai-nilai budaya baru (baca: barat), di mana nilai-nilai lama mempunyai pengaruh yang lebih kuat, seperti ditulis Isbodroini Suyanto (hal. 187), jadi apa yang kita miliki sekarang ini adalah lembaga-lembaga moderen tetapi dengan jiwa yang tetap tradisionil.

Hal lain lagi yang sangat menarik dalam isi buku ini adalah uraian Hamengku Buwono X yang mengulas tentang "Budaya Politik dalam Kehidupan Masyarakat Jawa". Bagi mereka yang tertarik untuk menganalisa buku ini lebih detail lagi, ada satu warna yang memang masuk dalam perjalanan sejarah bangsa dan dalam perkembangan selanjutnya ikut membentuk budaya politik kita. Warna itu adalah nilai-nilai budaya politik lama di mana budaya jawa memegang peran yang sangat dominan.

Sesuai dengan judulnya, pembahasan buku ini hanyalah berkisar pada masalah-masalah atau gejala politik di Indonesia. Mungkin akan lebih arif lagi bila penganalisaan terhadap buku ini perlu ditambah dengan pemahaman buku lainnya. Pada judul yang nyaris hampir sama, namun isi dan tinjauan yang berbeda, karya Gabriel Almond dan Sidney Verba, BUDAYA POLITIK, turut membantu dalam memahami buku ini. Terutama sekitar pembahasannya mengenai kepercayaan politik, aspirasi, emosi, serta partisipasi aktual dalam arena politik warga negara di lima negara, Jerman, Italia, Inggris, Amerika Serikat, dan Meksiko. Tujuannya untuk memberikan pengertian antara hubungan tingkahlaku warga negara dengan fungsionalisasi negara-negara demokratik moderen.

Sebagai buku suntingan, seperti diakui oleh penyunting buku ini, tak lepas dari kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Pada daftar isi bagian lima, bab limabelas, tertulis dengan judul: Budaya Birokrasi di Indonesia, namun pada halaman pembahasan tertulis dengan judul yang berbeda Budaya Diplomasi di Indonesia (hal. 280). Lepas dari segala kekurangan buku ini memang patut dibaca oleh intelektual muda.

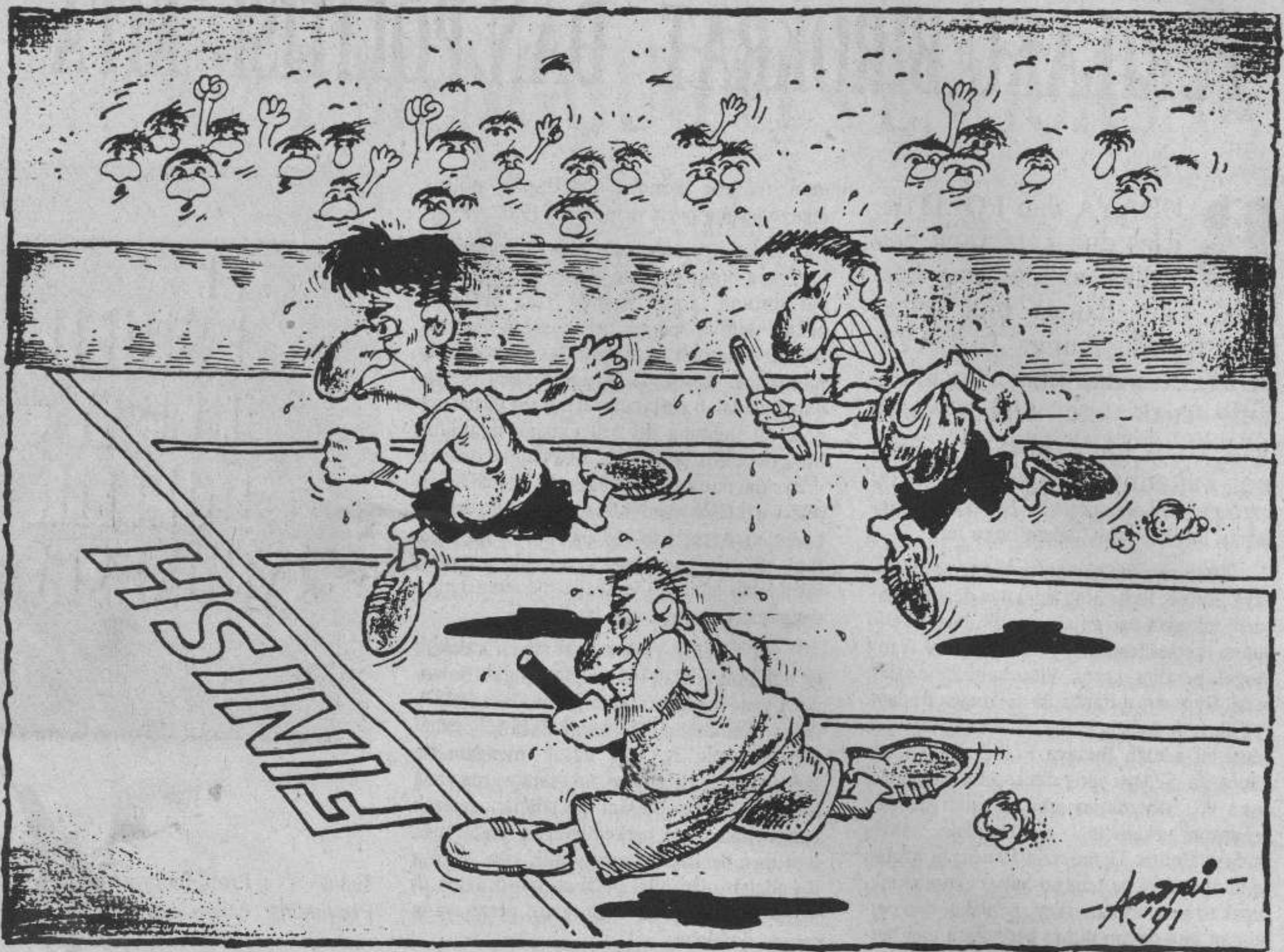
**Rifa'i Arfan**

RADITYA DJATI




Judul : Profil Budaya Politik Indonesia
Penyunting: Alfian dan Nasaruddin Syamsudin
Penerbit : PT. Pustaka Umum Grafiti, 359 hal. 1991.

ANDRIE RISMAN F.




# Kalangan Sendiri

Seorang mahasiswa membuka-buka buletin yang diterbitkan oleh sekelompok mahasiswa Filsafat. Ketika pada sebuah judul artikel yanag menarik, ia berhenti, lalu membacanya sekilas. Merasa belum paham benar ia mengulanginya sekali lagi. Kali ini dengan sedikit mengernyitkan dahi. Karena penasaran diulanginya sekali lagi. Sampai lima kali, ternyata tak juga mengerti. Dengan kesal dibantingnya buletin itu, lalu berdiri dan berlalu. Namun, ia terhenti dan mengangguk-angguk memaklumi, setelah membaca tulisan di bagian bawah cover buletin itu, yang berbunyi. ''Untuk kalangan sendiri''.

# Aktivis

Di stasiun kabupaten, seorang mahasiswa baru yang siap meninggalkan kampung halaman dikerumuni beberapa anggota keluarganya. Ibunya mendekati untuk menyampaikan beberapa petuah dan nasehat.

''Anakku, sesampai di Yogya sampaikan salamku buat ibu kosmu. Ingat, kamu harus rajin belajar, biar cepat jadi orang. Boleh-boleh saja kalau mau aktif di organisasi, tapi pandai-pandailah memilih kegiatan. Dan yang penting, jangan sekali-kali kamu ikut-ikutan demonstrasi!''.

''Percayalah Bu, saya tak akan pernah ikut-ikutan, saya kan jadi pemimpinnya! jawab sang mahasiswa dengan bangganya.

# Terharu

Seusai acara wisuda seorang wisudawan memisahkan diri dari kerumunan dan menyelinap di antara pilar-pilar Gedung Pusat. Kedua orang tuanya yang sedari tadi menunggu untuk dapat menyelami dan memeluk anaknya, dengan terburu menghampiri. Dilihatnya si wisudawan menangis tersedu-sedu. Karena terharu ibunya turut juga berlinang air mata, sambil memeluk dan berkata, ''Setelah kamu diwisuda, ibu bahagia nak!. Dan seperti kamu, ibu juga terharu''.

''Bukan Bu, saya bukan terharu. Saya hanya ingat berita, bahwa 500.000 sarjana menganggur setiap tahunnya!''.

**Abdul Rahman   Amir Fatah Sofyan**

**BEREDAR, BALAIRUNG EDISI 14**

# BULAN PROMOSI

**16 SEP. – 16 OKT. 1991**

**HANYA Rp 1.000,-**




BALAIRUNG

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

### MEMBENAHI STRATEGI PENDIDIKAN TINGGI

Hasil evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi 1989: proses belajar mengajar perlu diperbaiki; pelaksanaan sistem kredit kurang efektif; kurikulum hendaknya fleksibel dan antisipatif. Ternyata masih banyak masalah lain. Bagaimana proses belajar-mengajar selama ini? Bagaimana sebenarnya strategi pendidikan di UGM? Ikuti pengumpulan pendapat mahasiswa Kedokteran dan mahasiswa Hukum!.

### PERAN POLITIK PEMUDA MENJELANG PEMILU 1992

Pemuda cenderung kepada sikap ketergantungan dalam berpolitik?. Bagaimana kemandirian pemuda dalam berpolitik menjelang Pemilu 1992? Ikuti komentar Wahono, Ismail Hassan Metareum, Soerjadi, Jenderal Soemitro, Abdul Hakim & Nusantara dan lain-lain dalam laporan khusus!.

### AMANKAH LINGKUNGAN KAMPUS KITA ?

UGM dan Dep. Kesehatan mulai menjajaki kerjasama pendirian suatu lembaga kesehatan kerja dan keselamatan lingkungan Laboratorium.
Sudah demikian parahkah kondisi lingkungan UGM, sehingga di perlukan lembaga semacam ini ?

### SARASEHAN PERS MAHASISWA SE-INDONESIA DI BANDUNG GAGAL

E. Markum tidak mengizinkan. Beberapa pihak menyesalkan tindakan tersebut dan dianggap berlebihan. Ikuti laporan lengkap di kemahasiswaan edisi ini.

**DAPATKAN DI : KOPMA UGM, KOPMA IAIN, KOPMA UNS SOLO, KOPMA UNDIP SEMARANG, DAN TOKO-TOKO BUKU DI KOTA ANDA.**

# TWO WEEKS WITHOUT YOU

ADA APA YAA...?




SURAT KABAR MAHASISWA BULAKSUMUR UNIVERSITAS GADJAH MADA

**BULAKSUMUR**
**WARNA BARU KAMPUS BIRU**
**BULAKSUMUR B-21 YOGYAKARTA 55281**
**☎ (0274) 88688 Psw. 676**

**DITERBITKAN OLEH**
**BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA**
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

